KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUKU PANDUAN

MUSEUM PERJUANGAN YOGYAKARTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM PERJUANGAN YOGYAKARTA
(MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA UNIT II)
2020

BUKU PANDUAN

MUSEUM PERJUANGAN YOGYAKARTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM PERJUANGAN YOGYAKARTA
(MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA UNIT II)
2020

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab
Drs. Suharja

Penulis
Jauhari Chusbiantoro, S.S., M.A.
V. Agus Sulistya, S.Pd., M.A.

Fotografer
Agus Suprihantoro

Desain Grafis
F. Hendy Irawan, S.Sn.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kami panjatkan. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku Museum Perjuangan Yogyakarta berhasil disusun dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna memudahkan pemahaman tentang koleksi yang disajikan dalam tata pameran Museum Perjuangan Yogyakarta.

Museum Perjuangan Yogyakarta yang merupakan unit II dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah salah satu museum khusus sejarah perjuangan nasional yang mengemban misi pelestarian nilai-nilai luhur kejuangan. Melalui tata pameran yang ada di dalamnya, Museum Perjuangan Yogyakarta berusaha mengajak para pengunjung untuk berkomunikasi dengan masa lampau melalui benda-benda koleksi yang dipamerkan. Interaksi yang terjadi diharapkan akan memberikan kesan tersendiri sehingga masa lampau itu sendiri akan punya arti.

Pada tanggal 27 Mei 2006, Museum Perjuangan Yogyakarta mengalami kerusakan yang cukup parah akibat gempa bumi. Oleh karena itulah maka museum terpaksa ditutup untuk umum karena kondisinya yang tidak memungkinkan dikunjungi oleh masyarakat. Setelah kurang lebih satu setengah tahun ditutup, Museum Perjuangan Yogyakarta diadakan perbaikan. Setelah selesai, berusaha dibuka kembali dengan susunan materi yang telah mengalami perubahan.

Buku Museum Perjuangan Yogyakarta ini disusun dengan maksud untuk membantu pengunjung museum dalam memahami sajian koleksi Museum Perjuangan Yogyakarta. Informasi yang disajikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda pengunjung museum, sehingga mereka dapat memanfaatkan museum dalam fungsinya sebagai sumber informasi.

Tersusunnya buku panduan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak berperan dalam pengumpulan informasi seputar materi koleksi pameran. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan informasi materi koleksi pameran, kami yakin bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf, dan besar harapan kami adanya masukan dalam bentuk apapun.

Meski demikian, kami tetap berharap, semoga buku Museum Perjuangan ini mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya para pelajar dalam pengembangan pengetahuan sejarah. Terima kasih.

Yogyakarta, Agustus 2020

Tim Penyusun

SAMBUTAN KEPALA MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

Nilai-nilai nasionalisme merupakan wujud dari cinta terhadap tanah air dan bangsa. Semangat nasionalisme dan cinta tanah air akan muncul ketika seseorang dapat memahami sejarah perjuangan bangsanya dengan baik dan benar.

Maka, menghadirkan informasi sejarah yang benar menjadi penting di masa-masa sekarang dimana kemajuan teknologi informasi berkembang dengan cepat. Kecepatan perkembangan tekenologi informasi kerap memunculkan kualitas informasi yang tidak berimbang bahkan mengarah kepada hoax.

Disinilah dibutuhkan kehadiran sebuah institusi yang mengemban misi edukasi terkait dengan informasi sejarah perjuangan bangsa. Maka, hadirnya museum di tengah-tengah masyarakat menjadi penting sebagai sarana edukasi informasi kesejarahan tersebut. Museum Perjuangan Yogyakarta atau Museum Benteng Vredeburg Unit II hadir untuk menyajikan informasi sejarah disertai dengan keberadaan benda-benda koleksi yang menjadi saksi bisu perjuangan. Adanya koleksi-koleksi benda perjuangan tersebut, memudahkan kita dalam melihat kembali bagaimana sejarah itu terjadi.

Sebagai simbol 50 tahun Kebangkitan Nasional, Museum Perjuangan Yogyakarta memiliki konteks historis yang penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda dalam memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Maka, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan Museum Perjuangan Yogyakarta dan koleksinya, pengelola museum menyusun buku panduan ini. Diharapkan penyebaran informasi sejarah melalui buku panduan ini akan meningkatkan literasi masyarakat terhadap sejarah Museum Perjuangan Yogyakarta dan koleksi yang ada di dalamnya.

Mari berkunjung ke Museum Perjuangan Yogyakarta untuk mewarisi semangat dan nilai-nilai nasionalisme para pahlawan bangsa. Dan jadikan semangat nasionalisme ini untuk meneruskan perjuangan melalui kontribusi terbaik kita dalam membangun Bangsa Indonesia. Terima kasih, Museum di Hatiku.

Yogyakarta, Agustus 2020
Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

Drs. Suharja
NIP 196508071993031001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA		3
KATA PENGANTAR		4
DAFTAR ISI		5
BAB I	PENDAHULUAN	6
BAB II	SEJARAH BERDIRINYA MUSEUM PERJUANGAN YOGYAKARTA	8
BAB III	TATA PAMERAN MUSEUM PERJUANGAN YOGYAKARTA	18
	A. TATA PAMERAN DI LUAR RUANG (OUTDOOR EXHIBITION)	19
	B. TATA PAMERAN DI DALAM RUANG (INDOOR EXHIBITION)	78
BAB IV	PENUTUP	112
DAFTAR PUSTAKA		114
LAMPIRAN		116

BAB I

PENDAHULUAN

Museum Perjuangan Yogyakarta saat ini adalah merupakan bangunan unit II dari Museum Benteng Vredeburg Yogyarta. Hal itu terjadi sejak diadakannya serah terima pengelolaan Museum Perjuangan Yogyakarta dari Museum Negeri Propinsi Sonobudoyo Yogyakarta kepada Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta tanggal 5 September 1997.

Museum Perjuangan Yogyakarta terletak di Jalan Kolonel Soegiyono Nomor 24 Yogyakarta. Tepatnya di RT 14 RW 6, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Secara astronomis, Museum Perjuangan Yogyakarta terletak pada 7,45 Lintang Selatan dan 110,15 Bujur Timur.

Berdirinya Museum Perjuangan Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dengan adanya peristiwa penting peringatan setengah abad kebangkitan nasional. Pembangunan Museum Perjuangan Yogyakarta adalah ide dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang ingin mengadakan sesuatu sebagai tinggalan terhadap generasi mendatang terkait dengan peringatan setengah abad kebangkitan nasional.

Jika kita menengok kebelakang, adanya pemikiran tentang pembangunan sebuah monumen sebagai tanda peringatan setengah abad kebangkitan nasional adalah bukan sesuatu yang berlebihan. Lahirnya jiwa nasionalisme Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, merupakan sebuah tonggak sejarah Nasionalisme Indonesia. Organisasi Budi Utomo merupakan pelopor berdirinya organisasi modern yang pertama, dalam arti mempunyai pimpinan, anggota, dan ideologi yang jelas.

Berdirinya Budi Utomo ini ternyata segera diikuti oleh organisasi-organisasi lainnya. Organisasi yang semula bergerak dalam bidang sosial, budaya, bahkan keagamaan, lama kelamaan mengalami perubahan, yaitu berbelok kearah politik. Waktu berganti waktu, nilai-nilai nasionalisme yang telah dilahirkan dengan berdirinya Budi Utomo, semakin hari semakin berkembang secara simultan, bukan saja menjangkau partai-partai politik tetapi juga organisasi-organisasi pemuda.

Para pemuda dan pelajar dari berbagai organisasi mulai bergabung dalam satu wadah yang sama yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan tahun 1926. Mereka kemudian menyelenggarakan Kongres Pemuda Pertama yang berlangsung pada bulan Mei 1926. Mereka ingin mengesampingkan perbedaan-perbedaan berdasarkan daerah dan ingin menciptakan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Manifestasi persatuan ini diwujudkan dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung tanggal 27-28 Oktober 1928. Dalam kongres itulah kemudian lahir yang dikenal dengan "Sumpah Pemuda", yang berbunyi :

1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sumpah pemuda merupakan hasil pemikiran dari kaum terpelajar. Merekalah pencipta identitas nasional yang berhasil membangkitkan ekspresi kolektif untuk merealisasikan solidaritas nasional. Tri Tunggal Sumpah Pemuda merupakan tali pengikat nasionalisme Indonesia yang mencakup pengertian wilayah, bangsa dan bahasa. Rumusan Sumpah Pemuda adalah bentuk identitas nasional yang menjadi simbol persatuan dalam menggalang kekuatan untuk menghadapi kekuatan kolonial.

Sejarah membuktikan bahwa perasaan nasionalisme yang lahir karena berdirinya Budi Utomo dan mengkristal dalam Sumpah Pemuda, menjadi modal dasar perjuangan sehingga tercapailah Proklamasi Kemerdekaan. Semangat tersebut semakin hari semakin membesar, sehingga ketika ada kekuatan asing yang akan merongrong kemerdekaan bangsa Indonesia digerakkan oleh suatu kekuatan besar yang tak terbendung oleh kekuatan lawan. Hal itu tidak lain adalah "Nasionalisme" itu sendiri.

Dengan demikian jelas, bahwa nasionalisme menjadi dasar perjuangan dalam merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tanpa adanya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia, niscaya jalannya sejarah bangsa Indonesia akan lain. Oleh karena itu bukan merupakan hal yang berlebihan berdirinya Budi Utomo sebagai jika tonggak sejarah lahirnya nasionalisme Indonesia ditandai dengan berdirinya sebuah monumen. Monumen tersebut sekarang kita kenal dengan nama Museum Perjuangan Yogyakarta.

BAB II

SEJARAH BERDIRINYA MUSEUM PERJUANGAN YOGYAKARTA

Dalam rangka peringatan setengah abad Kebangkitan Nasional, di Yogyakarta dibentuk sebuah panitia yang diberi nama "Panitia Setengah Abad Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta". Panitia tersebut diketuai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan beranggotakan Kepala-kepala Djawatan, wakil-wakil dari kalangan militer dan polisi, pemimpin-pemimpin partai dan organisasi dari segala aliran dan keyakinan yang tergabung dalam Panitia Persatuan Nasional (PPN), kaum cerdik cendekiawan dan karya.

Pada tanggal 20 Mei 1958, di halaman Gedung Agung Yogyakarta diadakan upacara peringatan setengah abad kebangkitan nasional. Selain itu, juga dilakukan serangkaian kegiatan antara lain kerja bakti, gerakan menambah hasil bumi, mengumpulkan bingkisan untuk dikirim kepada kesatuan-kesatuan yang sedang berjuang menumpas pemberontakan, serta mengadakan ziarah ke makam para pahlawan nasional. Meski demikian, panitia merasa ada sesuatu yang kurang. Oleh karena itu, muncul gagasan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku ketua Panitia Setengah Abad Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan suatu peninggalan kepada generasi mendatang.

Setelah upacara tanggal 20 Mei 1958, diadakan rapat panitia. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional yang anggotanya terdiri dari anggota Dewan Pimpinan Panitia Peringatan Setengah Abad Kebangkitan Nasional Yogyakarta. Adapun susunan dari panitia tersebut, sebagai berikut:

Ketua : Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Wakil Ketua I : Sri Paku Alam VIII
Wakil Ketua II : Moh. Djamhari (anggota DPD DIY)
Wakil Ketua III : Letkol Joesmin (Kepala Staf Res. Inf. 13)
Wakil Ketua IV : Mayor R.M. Hardjokusumo (Kom. KMK Jogjakarta)
Wakil Ketua V : Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo (Kepala Daerah Kota Praja Jogjakarta)
Sekretaris : R. Soetardjo (Kepala Djapendi Jogjakarta)

Anggota :

1. Komisaris Besar R. Soemarsono (Kepala Polisi DIY)
2. KRT Kertoprodjo (Kepala Djawatan Keuangan DIJ)
3. R. Rio Darmoprodjo (Kepala Djawatan Sosial DIJ)
4. R. Mangunwasito (Kepala Djawatan PP dan K. DIJ)
5. Prodjosudono (Kepala Djawatan Penerangan Kota Praja Jogjakarta)
6. Lets. Soejoedi (Ketua BKSPM DIJ)
7. Susilo Prawirosoesanto (Angggota PPN dari PNI)
8. Bismo Wignyoamidjojo (Anggota PPN dari PKI)
9. S. Mangunpuspito (Anggota PPN dari Masjumi)
10. RW Probosuprojo (Anggota PPN dari PRN
11. Winoto (Anggota PPN dari PRI)
12. Ds SP Poerbowijogo (Anggota PPN dari Parkindo)
13. Ibnu Mukmin (Anggota PPN dari PSII)
14. Daljoeni (Anggota PPN dari Parindra)
15. Prodjokaskojo (Anggota PPN dari PIR)
16. Nj. Sahir Nitihardjo (Ketua POWJ)
17. KRT Labaningrat (Sekretaris I Pem DIJ)
18. Prof. Ir. Soewandi (Ahli Bangunan dari UGM)
19. RM. Srihandojokusumo (Ahli Kebudayaan)
20. Sudharso Pringgobroto (Ahli Kesenian dari Djawatan PPK DIJ)
21. Kepala Perwakilan Djawatan Kebudajaan PP dan K

Selanjutnya untuk membahas terkait monumen tersebut, panitia monumen setengah abad kebangkitan nasional membentuk panitia khusus. Panitia ini berjumlah sembilan orang, maka sering disebut dengan "Panitia Sembilan". Adapun susunan Panitia Sembilan tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua : S. Mangunpuspito
Sekretaris : Soetardjo
Anggota : Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, Soenito Djojosoegito, Ny. Sahir, Bismo Wignjoamidjojo, Daljoeni, Fadlan AGN, RW. Probosoeprodjo, Mangunwarsito.

Pada tanggal 22 Mei 1958 panitia khusus mengadakan rapat di gedung Djapendi. Rapat tersebut membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepanitiaan, arti penting monumen, letak monumen, bentuk monumen, sumber dana, dan rencana kerja. Dalam rapat pleno tanggal 7 Juli 1958 yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional menyetujui apa yang telah direncanakan dan dikerjakan oleh panitia khusus. Untuk merealisasikannya, maka dalam rapat tersebut dibentuk dua panitia kecil. Adapun susunan kepanitiaan tersebut sebagai berikut :

1. Panitia Teknis, yang terdiri dari:
   Ketua : Prof. Ir. Soewandi
   Sekretaris : diambilkan personel dari Djapendi, dan juga berkantor di sana
   Anggota : Sdr. Bismo Wignyoamidjojo, Sdr. Winoto
2. Panitia Keuangan, yang terdiri dari :
   Ketua : Sunarjo Mangunpuspito
   Anggota : diambilkan personel dari Resimen Infantri, Ds. S.P. Purbowijogo

Dalam rapat tersebut juga menunjuk Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo untuk menghubungi pengurus/panitia yang pernah dibentuk untuk mengambil alih pekerjaan mereka. Selain itu, mereka juga diminta untuk menunjuk seorang wakilnya agar duduk dalam Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional.

Perlu disampaikan bahwa di Yogyakarta sejak tanggal 2 Desember 1952 telah dibentuk Panitia Sementara yang bermaksud merencanakan berdirinya sebuah museum perjuangan yang akan digunakan untuk menyimpan dan memelihara benda-benda yang dipergunakan oleh rakyat Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan. Adapun susunan kepanitiaan pada waktu itu adalah :

Ketua : Sri Paku Alam VIII
Wakil Ketua : Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo
Sekretaris : I. Hutauruk
Bendahara : RM. Dryono
Anggota : Kol. Bachrun, Overste Sarbini, Pemb. Komisaris Besar Polisi Sudjono Hadipranoto, R. Patah dan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo.

Panitia Sementara Museum Perjuangan kemudian menyerahkan barang-barang yang berhasil dikumpulkannya, antara lain berupa:

1. Tas yang dulu dipergunakan oleh Drs. Mohamad Hatta ketika menghadiri perundingan KMB di Den Haag Belanda.
2. Barang-barang berupa senapan (kini tersimpan di Museum Pusat TNI Angkatan Darat Darma Wiratama di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta).
3. Uang dengan jumlah beberapa ratus rupiah.
4. Uang yang dijanjikan oleh Presiden Soekarno sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan catatan supaya panitia Monumen berhubungan langsung dengan beliau.

Sejak saat itu kata "Museum Perjuangan" mulai digunakan lagi dan menggeser kepopuleran kata "Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional". Berita-berita yang muncul di koran-koran juga mendorong perubahan penyebutan dari Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional menjadi Museum Perjuangan.

Karena itu, pada tanggal 14 Mei 1959 Museum Pusat TNI AD menghubungi Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta dengan mengutus

Kapten Kamari Sampurno untuk mengadakan pembicaraan dengan Saudara Soetardjo selaku Sekretaris Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta. Dalam rapat pleno keempat tanggal 19 Juni 1959, ketua panitia teknik Prof. Ir. Soewandi memberikan penjelasan tentang rencana dan bentuk bangunan. Ide bentuk bangunan muncul dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Museum Perjuangan akan berbentuk bulat, sedang ornamen-ornamen akan diambilkan dari macam-macam candi.

Terkait dengan masalah permohonan dana ke pemerintah pusat, ditunjuk Sdr. Soetardjo (Kepala Djapendi Yogyakarta) selaku Sekretaris Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional. Hasilnya pemerintah RI sanggup memberikan dana Rp 8.000.000, serta menyanggupkan diri hadir dalam peringatan 10 tahun Yogya Kembali. Pada tanggal 29 Juni 1959 di Gedung Negara Yogyakarta (Gedung Agung) diadakan peringatan 10 tahun Yogya Kembali yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting selama clash II. Wakil pemerintah pusat yang hadir adalah Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi yang mewakili Perdana Menteri Ir. Djuanda yang waktu itu sedang berada di luar negeri. Dalam acara tersebut Kepala Daerah dan Ketua DPRD Siswosoemarto serta Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi, mewakili pamerintah pusat menyatakan persetujuannya terhadap pendirian Museum Perjuangan di Yogyakarta.

Pada tanggal 1 Juli 1959 bertempat di Gedung Wilis Kepatihan Yogyakarta diadakan rapat pleno yang kelima. Rapat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam rapat tersebut berhasil dibentuk seksi-seksi beserta anggotanya. Adapun seksi-seksi tersebut antara lain :

1. **Seksi I (Pembangunan Gedung Museum)**
   Ketua : Prof. Ir. Soewandi
   Anggota : a. Sdr. Soedarman
   b. Sdr. KRT. Mertosono
   c. Sdr. KRT. Mertopuro
   d. Sdr. Dr. Sahir Nitihardjo
   e. Sdr. Winoto
2. **Seksi II (Pengumpulan Barang-barang dari pihak sipil)**
   Ketua : Sdr. Darmosugito
   Anggota : Sdr. I. Hutauruk
   Wakil dari Sonobudoyo : a. Sdr. Soetardjo
   b. Sdr. Soesilo Prawirosusanto
   c. Sdr. Soenito Djojosoegito
3. **Seksi III (Pengumpulan Barang-barang dari pihak militer)**
   Ketua : Kapten Kamari Sampurno
   Anggota : Dari Resimen Infantri 13 dan dari KMK Jogjakarta

4. **Seksi IV (Usaha sesudah Museum Jadi dan dibuka)**
   Ketua : Sdr. AZ. Djojoaminoto
   Anggota : a. Sdr. S. Mangunpuspito
   b. Sdr. KRT. Kertoprodjo
   c. Sdr. Soekono
5. **Seksi V (Relief)**
   Ketua : Nj. Sahir Nitihardjo
   Anggota : a. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo
   b. Sdr. R.W. Probosoeprodjo
   c. Sdr. Soemardjo, L.E
   d. Sdr. Joemadi
6. **Seksi VI (Administrasi Keuangan)**
   Ketua : Sdr. S. Mangun Puspito
   Anggota : a. Sdr. AZ. Djojoaminoto
   b. Sdr. KRT. Kertoprodjo
7. **Seksi VII (Penerangan dan Propaganda)**
   Ketua : Sdr. Soetardjo
   Anggota : a. Sdr. Prodjosudono
   b. Sdr. Toekidjo Handojo
   c. Sdr. Soedomo Bandjaransari

Laporan pelaksanaan tugas seksi-seksi tersebut disampaikan dalam rapat pleno tanggal 26 Juli 1959.Dengan mempertimbangkan masukan dan laporan-laporan dari tiap seksi maka ditetapkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1959 dilakukan pemasanan patok pertama kali. Upacara pemasangan patok pertama dilakukan di halaman ndalem Brontokusuman Yogyakarta. Upacara ini berlangsung tepat jam 12.00 Wib usai upacara resmi di Gedung Negara Yogyakarta (Gedung Agung) selesai. Hadir dalam acara tersebut antara lain para pembesar sipil maupun militer beserta tamu undangan. Karena Sri Sultan Hamengku Buwono IX sedang menjalankan tugasnya di tempat lain maka pemasangan patok pertama kali ini dilaksanakan oleh Sri Paku Alam VIII. Dengan demikian sudah dapat dijadikan tanda dimana gedung Museum Perjuangan Yogyakarta nantinya akan dibangun.

Pada tanggal 21 Agustus 1959 diadakan rapat pleno yang ke tujuh. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Sri Sultan Hemangku Buwono IX dan bertempat di Gedung Wilis Kepatihan Yogyakarta. Dalam rapat tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX melaporkan hasil kunjungannya selama di Jakarta, antara lain keberhasilannya menemui Perdana Menteri Ir. Djuanda dan Menteri Keamanan Nasional Letnan Jenderal A.H. Nasution.

Mengenai uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari pemerintah pusat, akan diatur dalam 3 termin, yaitu :

- Termin pertama : tahun 1959 sebesar 3 ½ juta.
- Termin kedua : tahun 1960 sebesar 2 ½ juta.
- Termin ketiga : tahun 1961 sebesar 2 juta.

Pada tanggal 1 September 1959 diadakan pertemuan antara Seksi I (Pembangunan Gedung Museum) dengan para pemborong yang datang dari berbagai kota besar di Jawa seperti dari Jakarta, Bandung, Semarang, Sala, Surabaya, Malang dan Yogyakarta. Pertemuan tersebut diadakan di ruang Perpustakaan Japendi. Penjelasan mengenai gambar proyek gedung Museum dan cara-cara memasukkan penawaran diberikan oleh Sdr Soedarman.

Setelah melalui pemikiran, perhitungan biaya dan memasukkan penawaran, maka pada tanggal 28 September 1959 bertempat di Japendi, diadakan pertemuan pelelangan gedung Museum Perjuangan yang dihadiri oleh para pemborong yang telah memasukkan penawaran. Setelah surat-surat penawaran dibuka, penawar yang paling rendah adalah I.E.C. (*Indonesian Engineering Corporation*) dengan penawaran sebesar Rp 3.545.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Menurut taksiran direksi, pembangunan gedung tersebut akan menghabiskan biaya Rp 4.070.000,- (empat juta tujuh puluh ribu rupiah). Pemborong lain yang mengajukan penawaran antara lain AIA sebesar Rp 5.380.000, Santoso sebesar Rp 5.784.000, Sindutomo sebesar Rp 5.364.000, dan lainnya mengajukan penawaran yang lebih tinggi. Tertinggi hingga mendekati Rp 7.000.000. Dengan demikian I.E.C. merupakan pemenang dalam lelang pembangunan Gedung Museum Perjuangan. Surat pemberian pekerjaan dan kontrak telah diselesaikan oleh Ketua direksi Saudara Soedarman (Kepala Djawatan Gedung-gedung Negeri di Yogyakarta).

Pembangunan gedung Museum Perjuangan mulai dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1959 bertepatan dengan Hari Angkatan Perang dengan melakukan pencangkulan pertama. Kegiatan itu dilaksanakan setelah usai upacara peringatan hari Angkatan Perang di Makam Pahlawan Kusuma Negara Semaki Yogyakarta. Upacara pencangkulan pertama berlangsung di ndalem Brontokusuman dengan didahului pembukaan oleh Sekretaris Panitia Saudara Soetardjo, kemudian disusul dari Direksi yang melaporkan jalannya pelelangan. Yang ketiga adalah dari pemborong yang disampaikan oleh Saudara Poegoeh dari I.E.C.. Selanjutnya dibacakan doa oleh Kyai Hadji Badawi. Akhirnya Sri Paku Alam VIII selaku Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memberikan amanatnya. Selanjutnya para hadirin dipersilahkan menuju ke halaman muka mengelilingi patok yang telah dipancangkan tanggal 17 Agustus 1959. Ayunan cangkul pertama dilakukan oleh Sri Paku Alam VIII selaku Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama para pembesar sipil, militer, polisi dan lain-lain. Dengan selesainya upacara pencangkulan pertama ini, pembangunan bangunan gedung museum dimulai.

Sesuai dengan laporan sekretariat dan seksi V (Relief) pada sidang pleno ke sembilan tanggal 7 April 1960, Panita Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta telah membuat dua macam sayembara yaitu :

1. Hiasan Puncak gedung Museum
2. Kesatuan Patung Gerilya di muka Gedung Museum

Menurut rencana, sayembara ini akan ditutup tanggal 30 Juni 1960, tetapi mengingat ada beberapa kiriman naskah sayembara yang tidak sampai kepada alamat yang dituju (kembali) maka atas persetujuan rapat pleno, penutupan sayembara diundur sampai dengan tanggal 31 Juli 1960.

Pada permulaan bulan Agustus 1960, setelah diadakan pemeriksaan, ternyata terdapat 44 gambar yang memenuhi syarat. Gambar-gambar tersebut meliputi gambar hiasan puncak dan kesatuan Patung gerilya. Menurut hasil pemeriksaan panitia ahli selaku juri, tidak ada gambar yang memenuhi keinginan panitia, sehingga tidak ada hadiah pertama yang dapat diberikan. Untuk sayembara hiasan puncak menurut penilian juri hanya ada satu yang mendekati keinginan panitia, yaitu gambar yang berjudul "Purna Swaraj'. Gambar inilah yang dinilai no. 2 dan dapat dipakai meski harus dengan beberpa perubahan. Sebagai penghargaan kepada penciptanya diberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupah). Untuk gambar Kesatuan Patung Gerilya hanya dapat hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada gambar yang berjudul "Mara Hanung"

Selanjutnya kepada Sdr. F.A. Sutjipto, pencipta gambar hiasan puncak tersebut diminta menyempurnakan hasil kerjanya dengan petunjuk dari Panitia ahli, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Sdr. Katamsi sebagai panasehatnya.

Disamping kesibukan menyelesaikan pembangunan gedung museum di Brontokusuman, kesibukan yang lain adalah pembuatan relief, hiasan puncak dengan ornamen-ornamen gedung Museum Perjuangan. Relief dibuat di desa Karangwuni, yang berada beberapa kilometer di sebelah utara kota Yogyakarta. Tepatnya di rumah Sdr. Edhi Soenarso yang diserahi tugas menyelesaikan relief dan patung-patung kepala para Pahlawan kemerdekaan. Sedangkan hiasan puncak dibuat di Muja-muju sebelah timur Kota Yogyakarta.

Semula jumlah relief yang akan dibuat meliputi 33 buah tema, tetapi untuk menyesuaikan dengan panjangnya dinding gedung Museum sebelah luar sepanjang 55,5 meter, maka dari 33 tema tersebut diperluas menjadi 40 thema yang diwujudkan dalam bentuk relief yang mempunyai ukuran 2 x 0,75 meter. Mengenai Pahlawan Nasional yang dibuat patung kepala ialah yang diambil dari tokoh-tokoh nasional yang kepahlawannya telah disahkan oleh Pemerintah. Menurut rencana ada 11 patung kepala pahlawan nasional yang akan dibuat. Namun, berhubung hingga saat museum akan segera dibuka panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta belum dapat menemukan gambar Si Singamangaraja, maka terpaksa baru 10 buah patung kepala yang dibuat.

Karena banyaknya materi relief dan patung yang perlu diselesaikan maka diperlukan pengerahan tenaga para pelukis, pemahat dan pematung. Pembuatan relief dan patung dipimpin oleh Sdr. Edhi Soenarso dibantu oleh Guru-guru ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) dan pemahat / pematung yang tergabung dalam PIM (Pelukis Indonesia Muda), SIM (Seniman Indonesia Muda), dan Pelukis Rakyat, antara lain : Sdr. Soedarso, Abdul Salam, Hendrodjasmoro, Saptoto, Soetopo dan Boediani. Disamping itu masih terdapat pelaksana yang terdiri dari 20 orang pokok dan 20 orang pembantu. Adapun yang membuat rencana sket selain anggota-anggota staf sendiri, juga mendapat sumbangan pikiran dari seniman-seniman lain seperti Sdr. Suromo (SIM), Handrijo (PIM), Abdul Sidik (bekas siswa ASRI), Abdul kadir, Murtihadi dan Sindusawarno (Tamansiswa). Pembuatan relief mulai dikerjakan bulan Oktober 1960 dan pada pertengahan bulan April 1961 sudah dapat dipasang di dinding gedung Museum

Hiasan puncak merupakan sebuah proyek besar dengan ukuran dasar 3 meter dan tinggi 7 meter, maka pengerjaannya tidak dapat dikerjakan sekaligus, dan terpaksa dibagi menjadi 3 bagian. Untuk membuat dasarnya saja dibutuhkan tanah liat kurang lebih seberat 11 ton dan gibs untuk cetakannya sebanyak 6 ton. Jika gibs cetakan telah selesai baru dibawa ke Brontokusuman untuk diatur di atas atap gedung museum.

Menurut keterangan pimpinan pembangunan gedung museum Sdr. Soerodjo dari NV I.E.C. yang dibantu oleh Sdr. Djoko Soenarso Cs dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dianggap sukar adalah pengecoran koepeldak dan hiasan puncak. Potongan-potongan cetakan dari gibs mulai dinaikkan ke atas atap gedung museum. Setelah diatur sedemikian rupa baru masuk tahap pengecoran dengan beton yang dilakukan oleh I.E.C.. Menurut perhitungan bahwa jika seluruh hiasan puncak selesai dicor dengan beton maka beratnya mencapai kurang lebih 15 ton. Hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena kekuatan atap dirancang hingga 45 ton.

Pembuatan proyek hiasan puncak ini diselenggarakan oleh murid-murid SGA III Prabangkara dibawah pimpinan Sdr. Prawito, Saptoto, dan Hendrodjasmoro. Selain hiasan puncak oleh Prabangkara juga dibuat relief, makara dan Candra Sengkala.

Relief dalam hal ini merupakan ornamen perhiasan tiang-tiang dan mengelilingi dinding museum dengan mengambil motif api. Jumlah Makara yang dibuat dua buah dan ditempatkan di kanan dan kiri trap pintu masuk.

Candra Sengkala di atas pintu masuk dengan tulisan yang berbunyi "Anggatra Piriantining Kusuma Nagara" yang memberi catatan 1959. Pencipta dari Candra Sengkala ini adalah Sdr. R.M. Kawindra Susanto. Djuga pengecoran proyek-proyek ini dilaksanakan kerjasama dengan NV. I.E.C..

Setelah pembangunan Museum Perjuangan Yogyakarta mencapai tahap akhir, maka diadakanlah upacara pemasangan batu terakhir yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Panita Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional pada tanggal 29 Juni 1961 pada jam 19.00 Wib. Setelah upacara pemasangan batu terakhir selesai, dilanjutkan upacara penyerahan gedung oleh Wakil NV I.E.C. yaitu Sdr. Poegoeh kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional.

Setelah upacara pemasangan batu terakhir selesai dilaksanakan, maka para anggota panitia mengadakan rapat pleno yang ke sepuluh bertempat di ruang belakang ndalem Brontokusuman. Dalam rapat tersebut selain diperdengarkan laporan dari seksi-seksi, juga dibicarakan hal-hal yang belum selesai terkait dengan persiapan pembukaan museum untuk umum. Setelah rapat selesai, Ketua panitia menyimpulkan bahwa pembukaan Museum Perjuangan Yogyakarta yang semula direncanakan tanggal 6 Juli 1961 diundur menjadi tanggal 5 Oktober 1961, bertepatan dengan peringatan Hari Angkatan Perang. Hal itu dengan pertimbangan, antara lain:

1. Persiapan interior museum belum selesai.
2. Diselenggarakannya Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan RI dari tanggal 6 Juli - 24 Agustus 1961.
3. Adanya pertunjukan Ballet Ramayana di Prambanan, hingga suasana tidak menguntungkan untuk membuka museum untuk umum.

Meski demikian, rencana tersebut juga tidak dapat terlaksana karena suatu hal. Akhirnya museum berhasil dibuka untuk umum pada tanggal 17 November 1961 oleh Sri Paku Alam VIII melalui sebuah upacara pembukaan.

Dari uraian di atas, secara ringkas proses pembangunan Museum Perjuangan Yogyakarta dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Pemasangan patok pertama tanggal 17 Agustus 1959 oleh Sri Paku Alam VIII, sebagai tanda tempat akan dibangunnya Museum Perjuangan Yogyakarta.
2. Pencangkulan pertama tanggal 5 Oktober 1959 oleh Sri Paku Alam VIII, sebagai tanda dimulainya pembangunan Museum Perjuangan Yogyakarta.
3. Pemasangan batu terakhir tanggal 29 Juni 1961 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai tanda berakhirnya pembangunan Museum Perjuangan Yogyakarta.
4. Upacara Pembukaan Museum tanggal 17 November 1961 oleh Sri Paku Alam VII, sebagai tanda dibukanya Museum Perjuangan Yogyakarta untuk umum.

Setelah museum dibuka untuk umum, selanjutnya museum dikelola langsung oleh panitia setengah abad kebangkitan nasional di Yogyakarta. Meskipun demikian secara operasional pengelolaan Museum Perjuangan ditangani oleh Jawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Japendi).

Pengelolaan museum yang ditangani oleh sebuah panitia dan bukan sebuah yayasan yang dibentuk untuk menanganinya menyebabkan kegiatan Museum Perjuangan Yogyakarta mengalami pasang surut. Bahkan sempat tutup beberapa waktu lamanya. Secara garis besar perkembangan Museum Perjuangan Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 1961 – 1963, Museum Perjuangan Yogyakarta dikelola oleh Panita Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta. Pada saat ini museum dibuka untuk umum dan terbuka bagi kunjungan masyarakat.
2. Tahun 1963 – 1969, museum ditutup untuk umum. Urusan perawatan gedung dan koleksi museum diserahkan kepada Museum Angkatan Darat yang waktu itu berkedudukan di Ndalem Brontokusuman tepat di belakang Museum Perjuangan.
3. Tahun 1970 – 1974, museum masih tertutup untuk umum. Pada masa ini Museum Perjuangan Yogyakarta dalam pengawasan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Inspeksi Kebudayaan dinas P dan K Propinsi DIY.
4. Tahun 1974 – 1980, museum tertutup untuk umum. Pada tahun 1974 Museum Perjuangan Yogyakarta oleh Pemda DIY diserahkan kepada Museum Sonobudoyo untuk dikelola sebagai bagian dari Museum Sonobudoyo. Pada masa ini pengelolaannya berada dibawah Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan (PSK) Kanwil Depdikbud Propinsi DIY. Selanjutnya oleh PSK dilakukan pemugaran.
5. Tahun 1980 – 1997, museum berada dibawah pengelolaan Museum Sonobudoyo. Tanggal 30 Juni 1980 museum mulai dibuka untuk umum dibawah Museum Negeri Sonobudoyo / Direktorat Permuseuman Dirjen Kebudayaan Departemen P dan K, dan dipimpin oleh seorang koordinator.
6. Tahun 1997 – 2019 (sekarang), museum berada di bawah pengelolaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Penyerahan pengelolaan Museum Perjuangan Yogyakarta dari Museum Sonobudoyo kepada Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dilakukan pada tanggal 5 September 1997.
7. Tanggal 27 Mei 2006, Museum Perjuangan Yogyakarta rusak akibat gempa dan ditutup untuk umum. Tahun 2007 Museum Perjuangan Yogyakarta diadakan pemugaran dan dibuka untuk umum bulan Juli 2008.

BAB III

TATA PAMERAN MUSEUM PERJUANGAN YOGYAKARTA

"A Museum is a non profit making, permanent istitution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, communicate, and exhibits, for purpose of study, education an enjoyment, material evidence of people and their environment."

Uraian di atas merupakan definisi museum menurut ICOM (I*nternationale Council of Museums*) dalam kongresnya tanggal 14 Juni 1974. Definisi tersebut kurang lebih berarti : Museum adalah lembaga yang tidak mencari keuntungan, bersifat tetap, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan dan memamerkan, untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan hiburan, benda-benda bukti material manusia dan lingkungannya.

Dari definisi tersebut, terdapat satu kata yaitu *"communicates"* atau mengkomunikasikan. Kata ini memegang peranan paling pokok dalam kontek kalimat tersebut. Hal itu jika dikaitkan dengan kata yang ada diatasnya bahwa museum adalah terbuka untuk umum, kata mengkomunikasikan ini menjadi ujung tombak dari sebuah museum. Dalam mengkomunikasikan koleksi museum, cara yang paling efektif adalah melalui pameran.

Koleksi museum meski sebagus apapun tidak akan mempunyai arti apa-apa jika tidak dikomunikasikan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu sungguh bukan tidak beralasan jika Frans Schouten dan M. Hammond Guthrie mengatakan bahwa : "dalam sebuah museum media yang paling penting dalam penyampaian informasi adalah pameran".

Tata pameran Museum Perjuangan Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu tata pameran di luar ruang (*outdoor exhibition*) dan tata pameran di dalam ruang (*indoor exhibition*).

A. Tata Pameran Di Luar Ruang (*Outdoor Exhibition*)

Museum Perjuangan Yogyakarta memiliki tata pameran di luar ruang antara lain terdiri dari: gedung museum itu sendiri termasuk simbol-simbol yang ada didalamnya, relief patung kepala pahlawan nasional, dan relief perisitiwa sejarah.

1. Gedung Museum

Bangunan Museum Perjuangan Yogyakarta secara keseluruhan memiliki arti dan makna sesuai dengan tujuan pendirian bangunan. Gedung Museum Perjuangan Yogyakarta berbentuk bulat silinder dengan garis tengah 30 meter dan tingginya 17 meter.

Bentuk bangunan merupakan perpaduan bangunan model barat dan timur. Model barat terlihat dengan bentuk bangunan yang mirip dengan bangunan di Roma jaman kekaisaran Romawi yang tampak pada bagian atas bangunan. Sedangkan model timur terlihat pada bagian bawah bangunan yang mengambil model candi-candi di Indonesia.

Bangunan Museum Perjuangan Yogyakarta berbentuk bulat silinder dan dikenal dengan "Ronde Tempel". Pada sebelah kanan dan kiri pintu masuk terdapat makara berbentuk binatang laut. Bagian atap bangunan museum berbentuk topi baja model Amerika dengan hiasan puncak berupa : lima buah bambu runcing yang berdiri tegak di atas bulatan bola dunia. Sedangkan bulatan bola dunia itu terletak diatas lima buah trap.

Di bagian atas pintu masuk museum terdapat hiasan berbentuk bintang bersudut delapan dengan peta kepulauan Indonesia di tengah-tengahnya. Dibawahnya terdapat candrasengkala yang berbunyi : "Anggatra Pirantining Kusuma Nagara" ciptaan RM. Kawindro Susanto.

Pada pintu masuk museum terdapat trap-trapan yang jika dihitung jumlahnya 17 buah. Sedangkan daun pintu masuk museum berjumlah 8 buah. Kemudian jendela yang terdapat pada dinding bangunan museum berjumlah 45 buah. Jendela-jendela tersebut dihubungkan oleh pilar-pilar yang berhiasan lung-lungan yang menyerupai perwujudan api yang tak kunjung padam.

Secara keseluruhan, bentuk bangunan Museum Perjuangan Yogyakarta mengandung arti bahwa Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari bangsa lain. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Candrasengkala yang berbunyi "Anggatra Pirantining Kusuma Nagara" memiliki arti sama dengan tahun 1959, yaitu tahun dimulainya pembangunan Museum Perjuangan Yogyakarta ini.

Jumlah trap pada pintu masuk yang berjumlah 17 buah merupakan tanggal ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, yaitu tanggal 17. Sedangkan daun pintu yang berjumlah 8 pada pintu masuk, merupakan angka yang menunjukkan bulan ketika dibacakannya Proklamasi kemerdekaan yaitu 8 yang berarti bulan Agustus. Jendela yang terpasang mengelilingi tembok bangunan Museum Perjuangan Yogyakarta berjumlah 45 buah, merupakan jumlah yang sama dengan tahun ketika Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di Jakarta pada tahun 1945.

Lung-lungan yang berada diantara jendela yang menyerupai perwujudan api yang tak kunjung padam, mengandung arti semangat bangsa Indonesia yang tak kunjung berhenti dalam perjuangan merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

2. Relief Patung Kepala Pahlawan Nasional

Relief patung kepala yang dipasang pada dinding Museum Perjuangan Yogyakarta, adalah patung-patung pahlawan nasional yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Patung-patung tersebut berjumlah 10 buah. Adapun kesepuluh patung kepala pahlawan nasional tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sultan Hasanudin (1631 – 12 Juni 1670)

Sultan Hasanudin adalah putra kedua dari Sultan Malikussaid, Raja Gowa ke 15 yang lahir pada tahun 1631. Beliau adalah Raja Makasar yang memerintah tahun 1654-1669. Beliau gigih melawan VOC yang ingin memonopoli hasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Akibat keberaniannya, maka perang antara VOC dan rakyat Goa tak terelakkan. Belanda dipimpin oleh Cornelis Speelman untuk melawan Goa tahun 1666. Lamanya perang memaksa Hasanudin menerima ajakan damai, sehingga 18 Nopember 1667 diadakan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa. Hasanudin kembali melakukan perlawanan. Tanggal 12 Juni 1669 Pasukan Belanda dapat menaklukkan benteng Somba Opu. Peperangan terhenti, dan Hasanudin mengundurkan diri dari Tahta sampai akhirnya mangkat pada tanggal 12 Juni 1670.

b. Kapten Pattimura (1783 – 16 Desember 1817)

Thomas Matulessy yang kemudian dikenal dengan Kapitan Patimura dilahirkan di Ambon tahun 1783. Beliau pernah masuk dinas militer Inggris dengan pangkat sersan. Tahun 1816 ketika Belanda berkuasa, daerah Maluku mengalami penindasan. Maka Patimura segera menyusun strategi perang dengan Benteng Duurstede di Saparua sebagai sasaran, dan 16 Mei 1817 benteng berhasil dikuasai. Dalam peristiwa tersebut Residen Van den Berg terbunuh. Mulai saat itulah Patimura dan anak buahnya menjadi pasukan yang disegani oleh Belanda. Hingga akhirnya Patimura tertangkap di Siri Sori. Atas putusan pengadilan Belanda, Patimura dihukum gantung dan gugur pada tanggal 16 Desember 1817.

c. Pangeran Diponegoro (11 Nopember 1785 – 8 Januari 1855)

Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 Nopember 1785, dengan nama Pangeran Ontowiryo. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengku Buwono III dari istrinya (bukan permaisuri) yang bernama R.A. Mangkorowati. Semasa kecil beliau tinggal bersama nenek buyutnya Ratu Ageng (janda dari HB I) di Tegal Rejo. Oleh karena sikap Belanda yang menyengsarakan rakyat dengan menetapkan pajak tinggi (pajak pacumpleng), dan perbuatan Belanda yang ingin membangun jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro maka terjadilah perlawanan yang kemudian terkenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa (20 Juli 1825 s.d 28 Maret 1830). Perlawanan Beliau didukung oleh bangsawan, ulama, maupun rakyat biasa. Antara lain Kyai Mojo, Sentot Alibasah Prawirodirjo, Pangeran Mangkubumi dll. Atas siasat licik Belanda, maka pada tanggal 28 Maret 1830 Diponegoro ditangkap dalam sebuah jebakan perundingan di Karesidenan Kedu, Magelang. Kemudian Beliau diasingkan ke Manado. Tahun 1834 dipindahkan ke Ujung Pandang sampai wafat tanggal 8 Januari 1855.

d. Tuanku Imam Bonjol (1772 – 6 November 1864)

Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 di Kampung Tanjung Bungi, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, semula bernama Peto Syarif. Karena beliau berhasil mendirikan negeri Bonjol maka lebih dikenal sebagai Imam Bonjol. Pertikaian antara kaum Paderi (kaum agama) dengan kaum adat telah melibatkan Imam Bonjol dan Belanda. Melihat kekuatan kaum Paderi dibawah Imam Bonjol maka Belanda kawatir dan membuat perjanjian tahun 1824 (Perjanjian Masang) yang akhirnya dilanggar oleh Belanda dengan mengadakan serangan ke daerah Negeri Pandai Sikat. Peperangan berkobar lagi. Ajakan damai dengan maklumat "Palakat Panjang" Belanda tiada digubrisnya. Setelah tiga kali Belanda mengganti panglima perangnya barulah Negeri Bonjol dapat direbut pada tanggal 16 Agustus 1837. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dapat ditangkap dalam sebuah pengkhianatan perundingan Belanda. Kemudian diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon dan kemudian ke Manado sampai wafat tanggal 6 Nopember 1864 dalam usia 92 tahun sebagai pahlawan perjuangan Perang Padri di Sumatra Barat.

e. Teuku Umar (1854 – 10 Februari 1899)

Teuku Umar lahir pada tahun 1854 di Meulaboh. Pada saat usia 19 tahun (1873) Teuku Umar telah melibatkan diri dalam Perang di Aceh. Tahun 1878, markas pasukannya di Kampung Darat diduduki Belanda. Dengan siasatnya menyerah pada Belanda, Teuku Umar dipercaya membawahi 32 orang tentara untuk menumpas pasukan Raja Teunom dan yang kedua membawahi 250 pasukan untuk menumpas pejuang Aceh. Tanggal 29 Maret 1896, Teuku Umar melarikan 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, uang 18.000 dolar, sehingga menyebabkan Belanda marah dan memerintahkan Panglima Tentara Hindia Belanda (Jenderal Van Heuts) untuk menangkapnya. Pada suatu pertempuran (10 Pebruari 1899, malam) Teuku Umar tertembak sehingga gugur sebagai kusuma

bangsa. Dalam perangnya ia selalu didampingi oleh istrinya Cut Nya' Dien. Perang Aceh mampu bertahan lama karena: kepemimpinan para Ulama, daerah yang berbukit-bukit, serta semangat perang jihad. Perang Aceh berlangsung pada tahun 1873-1904 suatu peperangan yang berlarut-larut.

f. R.A. Kartini (21 April 1879 – 17 September 1904)

Raden Ajeng Kartini seorang putri Bupati Jepara yang juga pelopor emansipasi wanita Indonesia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Karena kegemarannya suka membaca buku dan majalah pikirannya menjadi terbuka lebar. Meski pendidikannya hanya tamat setingkat SD, dalam masa pingitan (tradisi adat, sebelum menikah) pikirannya tetap jauh ke depan untuk memajukan wanita Indonesia melalui pendidikan. Oleh karenanya Kartini mendirikan sekolah bagi gadis-gadis di lingkungan Kabupaten Jepara. Muridnya pun hanya berjumlah 9 orang yang terdiri dari kerabatnya sendiri. Disamping itu Kartini giat menulis surat kepada sahabatnya orang Belanda (Tuan dan Nyonya Abendanon), hingga saatnya Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang. Sejak itu pula Kartini pindah ke Rembang. Karena tahu akan cita-cita Kartini maka suaminya (Raden Adipati Joyodiningrat) mendirikan sekolah perempuan di rumahnya sendiri. Kemudian bermunculan pula sekolah-sekolah serupa dengan nama Sekolah Kartini di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dll. Kartini wafat pada usia 25 tahun (17 September 1904), setelah melahirkan putra pertamanya. Surat-surat Kartini terkumpul dalam sebuah buku yang berjudul *"Door Duistermis tot Licht"* (Habis Gelap Terbitlah Terang).

g. Dr. Wahidin Soediro Hoesodo (7 Januari 1857 – 26 Mei 1917)

Wahidin Soediro Hoesodo adalah seorang tokoh pencetus ide lahirnya Boedi Oetomo 1908. Beliau lahir pada 7 Januari 1852 di Mlati, Sleman, Yogyakarta dan wafat pada 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Mlati, Sleman , Yogyakarta. Semasa hidupnya, tahun 1895 bersama rekan-rekannya mendirikan Surat Kabar dua bahasa (Jawa dan Melayu) Retno Dumilah di Yogyakarta. Pada tahun 1906 s.d. 1907 giat melaksanakan perjalanan mengumpulkan Studiefonds (Dana Pendidikan) bagai penduduk pribumi. Setelah bertemu dengan Sutomo seorang pelajar STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), berpadulah gagasan mereka yang teraktualisasi dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Wahidin Soediro Hoesodo beristri seorang wanita Betawi yang bernama Anna. Dari perkawinannya lahirlah dua orang anak. Salah satunya bernama Abdullah Subroto yang kemudian menurunkan Sujono Abdullah dan Basuki Abdullah (keduanya pelukis).

h. Ki Hajar Dewantara (2 Mei 1889 – 26 April 1959)

Ki Hadjar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 dengan nama kecil Suwardi Suryaningrat. Ayahnya adalah bangsawan Kadipaten Pakualaman yang bernama Pangeran Suryaningrat. Pada tanggal 6 September 1913 sampai dengan 5 September 1919 pernah dibuang ke negeri Belanda karena tindakannya yang menentang pemerintahan Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Perguruan Taman Siswa. Tanggal 23 Nopember 1928 secara resmi, disamping namanya yang lama, memakai nama baru yaitu Ki Hadjar Dewantara. Pada tanggal 1 Oktober 1932 bersama dengan segenap lapisan masyarakat dan partai politik serta organisasi rakyat mengadakan perlawanan menentang "Ordonansi Sekolah Liar" atau *Wilde Schoolen Ordonantie*. Pada tanggal 8 Maret 1955 ditetapkan oleh pemerintah sebagai Perintis Kemerdekaan Nasional. Tanggal 19 Desember 1956 mendapat gelar kehormatan dalam ilmu Kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada. Pada waktu wafat tanggal 26 April 1959 diangkat sebagai perwira tinggi dengan upacara negara secara kemiliteran. Tanggal 28 Nopember 1959 oleh Presiden diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Tanggal 6 Desember 1959, hari lahir Ki Hadjar Dewantara (2 Mei) ditetapkan sebagai hari pendidikan nasional.

i. MH. Thamrin (16 Pebruari 1894 – 11 Januari 1941)

Mohammad Husni Thamrin dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Pinggiran kota Batavia. Ayahnya, Thamrin Mohamad Thabrie, pernah menjadi Wedana Batavia tahun 1908. Kakek biologis Thamrin adalah seorang pengusaha berdarah Inggris yang memiliki sebuah hotel dikawasan Petojo. Sepak terjang kegiatan Thamrin dalam pergerakan dimulai sejak menjadi anggota Dewan Kota hingga perjuangannya menghadapi krisis politik dan ekonomi akibat kegagalan langkah yang diambil pemerintah kolonial. Keberhasilan upaya Thamrin kemudian menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh dalam sejarah Indonesia.

Pada tahun 1916, MH Thamrin bersama ayahnya ikut bergabung dengan perkumpulan pemilih melayu (*Kiesvereeniging* Melajoe) yang didirikan oleh Hinloopen Labberton. Pada masa ini pula organisasi Kaoem Betawi yang didirikan oleh Thamrin dan Masserie untuk menghimpun pribumi Betawi elite mulai aktif. Setelah diangkat sebagai anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1919, Thamrin mulai aktif menyampaikan pembelaan dan empatinya terhadap wong cilik, terutama masalah perbaikan kondisi sosial dan sanitasi. MH. Thamrin merupakan pejuang dari Betawi yang banyak memberikan andil perjuangan. Di antaranya memperjuangkan kepada pemerintah Belanda untuk dibentuk Dewan Volksraad, kemudian memprakarsai berdirinya Fraksi Nasional, serta turut membentuk PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. M. Hoesni Thamrin yang diangkat menjadi anggota *volksraad* oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan maksud mengimbangi kaum pejuang nasionalis yang beraliran keras yang dipelopori Ir. Soekarno dan kawan – kawan. Tetapi maksud pemerintah Hindia Belanda tersebut gagal total karena selama ia menjadi anggota *volksraad* bukannya bersifat lunak yang diperlihatkan, tetapi justru sifat yang keras menentang penjajahan yang diperlihatkan, bahkan ia selalu mengadakan pertemuan – pertemuan (rahasia) dengan Ir. Soekarno. M. Hoesni Thamrin pada waktu itu betul – betul melaksanakan fungsinya

sebagai anggota parlemen. Ia bersama dengan Mr. Kusumo Utojo melakukan peninjauan di Sumatera guna mengecek bagaimana asisten – asisten perkebunan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda memperlakukan buruh pribumi (yang terkenal dengan istilah kuli – kuli) secara biadab. Hasil peninjauan (penyelidikannya) itu dengan tanpa ditutup – tutupi dibeberkan secara gamblang oleh M. Hoesni Thamrin dalam sidang *Volksraad* pada tanggal 27 Januari 1930. M.H. Thamrin wafat pada tanggal 11 Januari 1941.

j. Jendral Soedirman (24 Januari 1916 - 29 Januari 1950)

Pangsar Soedirman adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas Karangjati, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Setelah tamat HIS di Purwokerjo, Beliau malanjutkan pendidikan ke Taman Dewasa Tamansiswa dan kemudian memasuki Sekolah Guru Muhammadiyah tetapi tidak tamat. Pada masa pendudukan Jepang mengikuti pendidikan ketentaraan dalam Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor dan setelah selesai diangkat menjadi komandan batalyon di Kroya. Setelah TKR terbentuk ia diangkat sebagai Panglima Divisi V Banyumas dengan pengkat kolonel. Anggota TKR di bawah pimpinannya ikut terlibat dalam perang melawan pasukan Inggris di Ambarawa. Dalam konperensi TKR tanggal 12 November 1945 beliau terpilih sebagai panglima besar TKR ia kemudian dilantik dengan pangkat Jenderal. Pada masa agresi militer Belanda II 19 Desember 1948 Beliau bersama pasukannya keluar kota Yogyakarta dan melakukan perjuangan secara bergerilya sampai akhirnya pada tanggal 10 Juli 1949 masuk kota Yogyakarta kembali. Karena sakitnya yang tidak mendapatkan perawatan secara intensif selama perjuangan maka pada tanggal 29 Januari 1950 Beliau wafat di Magelang. Kemudian dimakamkan di TMP Semaki Yogyakarta.

3. Relief Peristiwa Sejarah

Koleksi relief secara kronologis menceritakan peristiwa sejarah sejak dari masa lahirnya Boedi Oetomo sampai dengan masa bersatunya lagi pemerintahan RI yaitu dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Adapun koleksi-koleksi yang divisualisasikan adalah sebagai berikut :

a. Lahirnya Boedi Oetomo (20 Mei 1908)

Boedi Oetomo merupakan organisasi pergerakan nasional Indonesia modern yang pertama kali berdiri. Organisasi tersebut lahir pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, tepatnya di ruang anatomi STOVIA (*School Toot Opleiding van Inlansche Artsen*) yaitu tempat pendidikan bagi para calon dokter rakyat bumi putera. Berdirinya organisasi Boedi Oetomo ini bermula dari adanya usaha dari Dr. Wahidin Soediro Hoesodo untuk membantu kaum bumi putera yang kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan menyelenggarakan *"Studiefonds"* (dana pendidikan). Pada akhir tahun 1907 di gedung STOVIA terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin dan Sutomo didampingi pelajar Soeradji yang waktu itu sedang disibukkan oleh usahanya untuk memajukan pengajaran di kalangan pelajar bumi putra. Dari situlah akhirnya ide pendirian Boedi Oetomo muncul. Langkah pertama yang kemudian dilakukan oleh Sutomo dan beberapa orang temannya, ialah segera mengirimkan surat untuk mencari perhubungan dengan murid-murid di kota lain di luar Jakarta, seperti Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Magelang. Ternyata persetujuan dan dorongan datang dari mana-mana sehingga lebih memantapkan usaha Sutomo dan kawan-kawan. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908, kurang lebih pukul 09.00 WIB, Soetomo dan kawan-kawannya pelajar STOVIA antara lain M. Soeradji, M. Muhammad Saleh, M. Soewarno, M. Goenawan, Soewarno, R.M. Goembrek, R. Angka dan M. Soelaiman berkumpul di ruang anatomi Gedung STOVIA, mereka mendirikan sebuah organisasi yang kemudian diberi nama Boedi Oetomo yang berarti suatu usaha yang mulia (dalam bahasa Jawa = *budi kang utami*). Boedi Oetomo adalah sebuah nama yang diusulkan oleh M. Soeradji. Adapun susunan pengurus yang berhasil mereka bentuk setelah diikrarkan berdirinya Boedi Oetomo adalah sebagai berikut:

Ketua	:	R. Soetomo
Wakil Ketua	:	M. Soelaiman
Sekretaris I	:	Soewarno
Sekretaris II	:	M. Goenawan
Bendahara	:	R. Angka
Komisaris	:	M. Soewarno, M. Muhammad Saleh, M. Soeradji, M. Goembrek.

b. Lahirnya Serikat Islam 10 September 1912

Serikat Islam (SI) merupakan kelanjutan dan perkembangan nama dari Serikat Dagang Islam (SDI), suatu organisasi Islam yang bergerak dalam bidang perdagangan (ekonomi) yang mula-mula didirikan di Jakarta oleh RM. Tirtoadisoerjo. Pada awal kegiatannya RM. Tirtoadisoerjo berkeliling seluruh Jawa, tetapi hanya kota-kota besar saja yang dikunjungi. Masing-masing dianjurkan untuk mendirikan SDI dengan tujuan kebebasan ekonomi, Islam sebagai jiwanya, guna kekuatan dan persatuan.

Pada Tahun 1911 setiba di kota Solo, RM. Tirtoadisoerjo berhasil mendirikan SDI yang diketuai oleh Haji Samanhoedi, seorang saudagar pedagang batik di Lawean, Solo. Ketika itu di Solo terjadi kompetisi yang tajam dalam perdagangan batik terutama dengan golongan Cina. Kebanyakan mereka (golongan Cina) merupakan leveransir bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat batik, misalnya : mori, soga, lilin. Permainan pedagang Cina tersebut sangat merugikan pedagang-pedagang Indonesia. Sehingga SDI cabang Solo kerapkali melakukan boikot terhadap pedagang Cina. Akibatnya kegiatan SDI baik yang ada di Solo maupun daerah-daerah lain terus diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada saat RM. Tirtoadisoerjo sedang giat mempropagandakan program SDI di Solo oleh pemerintah Hindia Belanda ditangkap dan kemudian diasingkan. Sejak RM.

Tirtoadisoerjo dalam pengasingan, maka kegiatan SDI diteruskan oleh H. Samanhoedi. Setahun kemudian dalam penyusunan Anggaran Dasar, H. Samanhoedi meminta bantuan Umar Said Tjokroaminoto (pegawai perusahaan dagang di Surabaya). Dia berpendapat bahwa kata dagang hanya mempersempit ruang gerak organisasi, disarankan agar gerakan SDI tidak saja pada golongan pedagang, akan tetapi lebih diperluas lagi meliputi seluruh golongan dalam masyarakat dan seluruh kegiatan dalam masyarakat. Selanjutnya Serikat Dagang Islam dirubah menjadi Serikat Islam dengan akta notaris tanggal 10 September 1912. Selanjutnya perserikatan ini terus berkembang dengan pasang surut dinamikanya mewarnai perjalanan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia.

c. Lahirnya *Indische Partij* di Bandung 25 Desember 1912

Indische Partij didirikan oleh EFE. Douwes Dekker (DD) alias Styabudi di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Untuk hal ini Drs. G. Moedjanto, MA dalam bukunya menyampaikan tanggal 6 September 1912. Organisasi ini merupakan organisasi campuran orang Indo dan Bumiputera. *Indische Partij* menjadi organisasi politik yang kuat setelah bekerjasama dengan dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Untuk selanjutnya mereka dikenal dengan "Tiga Serangkai". Pergerakan *Indische Partij* berdasarkan nasionalisme (kebangsaan) India (Nama Indonesia belum dipakai). Yang dimaksud bangsa India ialah setiap orang yang dilahirkan, dibesarkan di India dan mengakui India sebagai tanah airnya.

Adapun tujuan dari *Indische Partij* : 1) Jangka pendek : mempersatukan seluruh bangsa India (termasuk Indo Eropa yang mau mengakui dasar pergerakan tadi), 2) Jangka Panjang : mencapai India Merdeka.

Sikap pergerakan ini terhadap pemerintah Belanda tegas antipati dan non kooperasi yang diilhami oleh perasaan tidak puas : 1) golongan Indonesia karena kehilangan peranan yang berarti dalam politik dan sosial ekonomi, 2) golongan Indo Eropa karena merasa dianaktirikan oleh masyarakat dan pemerintah Belanda dan merasa terjepit dalam pergaulan sosial, kehidupan politik dan ekonomi (merasa diperlakukan lebih rendah daripada orang Belanda totok). Dengan bekerja sama dengan bangsa Indonesia, ada kemungkinan bagi mereka untuk memegang peranan yang berarti.

Reaksi pemerintah Belanda terhadap organisasi *Indische Partij*, adalah pemerintah Belanda menganggap *Indische Partij* merupakan partai yang berbahaya karena tuntutan dan sikapnya. Lagi pula peraturan yang ada tidak memperkenankan adanya perkumpulan politik. Karena itu permohonan *Indische Partij* untuk diakui menjadi badan hukum ditolak pemerintah. Karena ijin berdiri tidak diberikan maka *Indische Partij* bubar pada tanggal 11 Maret 1913.

Namun para pemimpin *Indische Partij* adalah orang-orang yang agresif dan berani dalam menentang pemerintah Belanda. Ketika pemerintah Belanda mempersiapkan

peringatan 100 tahun Nederland bebas dari penjajahan Perancis (Napoleon I). Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat membentuk suatu organisasi dengan nama ironis : Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda, dikenal juga sebagai Komite Bumi Putera.

Menanggapi rencana pemerintah untuk menyelenggarakan perayaan tersebut pada bulan Nopember 1913, para pemimpin *Indische Partij* menulis karangan (artikel) di harian De Expres (Asuhan EFE. Douwes Dekker. Yang pertama adalah tulisan Suwardi yang berjudul "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaan". Suwardi Suryaningrat selanjutnya menulis : Sejajar dengan jalan pikiran ini, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander (pribumi) memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk mengadakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskanlah penghinaan lahir dan batin ini.

Karena tulisan tersebut maka kejaksaan Belanda mengadakan pembeslahan dokumen-dokumen Sekretariat Komite (Suwardi adalah sekretaris Komite, Cipto menjadi Ketua). Karena tindakan kejaksaan tersebut maka kini ganti Cipto menulis karangannya yang dimuat di harian De Expfres juga, berjudul "Kekuatan atau ketakutan". Dikecamnya tindakan sewenang-wenang yang tidak demokratis yang dilakkan pemerintah. Ditulisnya antara lain "Adakah itu suatu pernyataan kekuatan yang dipertontonkan pembeslahan itu? Ah... kasihan, orang toh tak akan mengira kita akan kehilangan jiwa karena berhadapan dengan kekuasaan yang jauh lebih besar dari kami sendiri? Justru di situ terdapat suatu yang menusuk-nusuk untuk menyerang kekuasaan itu, memaksakan dia menggunakan seluruh tenaganya untuk mengalahkan kita. Makin keras tindakannya makin hebat tumbuhnya tenaga kita.

Melihat teman-temannya menulis kecaman pedas terhadap pemerintah Belanda, maka Douwes Dekker tidak mau ketinggalan. Ia pun menulis karangan yang berjudul : "Pahlawan Kita Dr. Cipto Mangunkusumo dan RM. Suwardi Suryaningrat" yang isinya memuji keberanian mereka dalam memperjuangkan nasib bangsa. Karena keberanian mereka mengecam pemerintah dan sikap mereka yang tegas, Gubernur Jenderal dengan mengunakan hak luar biasa (*exorbitante rechten*) sebagai dasarnya, maka ketiga pemuka IP tersebut dikenai hukuman. Cipto dibuang ke Banda, Suwardi ke Bangka, sedang Douwes Dekker dikenakan tahanan (*internering*). Namun atas permintaan sendiri, pemerintah Belanda memperkenankan mereka meninggalkan Indonesia dan tempat pembuangan yang dipilihnya adalah Negeri Belanda. Di Negeri Belanda mereka itu kemudian menjadi anggota Perhimpunan India (*Indische Vereniging*), yaitu perkumpulan sosial yang diorganisir oleh pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di sana. Segera setelah mereka menjadi anggota, maka perkumpulan sosial tadi kemudian berubah menjadi suatu perkumpulan politik, suatu perkumpulan yang memperjuangkan perubahan kenegaraan bagi Indonesia.

d. Lahirnya Muhammadiyah di Yogyakarta 18 November 1912

Kehidupan beragama umat Islam di Indonesia sampai akhir abad XIX dipandang sangat memprihatinkan. Amalan Islam banyak menyimpang dari tuntunan pokoknya, yaitu Al Quran dan As-Sunnah. Praktek-praktek *khurofat* (takhayul), *Bid'ah* (menambah ibadah) dan *syirik* (menyekutukan Tuhan), banyak dicampur aduk dalam pengamalan Islam. Di samping itu kehidupan pendidikan dan sosial dalam masyarakat Islam belum baik, akibat diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keadaan itu mendorong Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk mengadakan Tajdid (reformasi), yaitu pembaharuan pengamalan kehidupan Islam di Indonesia, yang dikembalikan kepada kemurnian sumber aslinya (Al Quran dan As-Sunnah). Upaya untuk mengadakan gerakan tajdid itu diwujudkan dengan membentuk organisasi yang diberi nama Muhammadiyah, artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Gerakan Muhammadiyah ini secara resmi berdiri pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1330 H di Kauman Yogyakarta. Pada awal berdirinya Muhammadiyah didukung oleh para ulama antara lain KH. Abdullah Siraj, KH. Ahmad, KH. Abdurrahman, KH. R. Syarkowi, KH. Muhammad, KH. R. Jaelani, KH. Anies dan KH. R. Fekih. Sebagai ketua adalah KH. Ahmad Dahlan dan sekretarisnya KH. Abdullah Siraj.

Sebenarnya cita-cita untuk mengadakan pembaharuan Islam telah dimulai sejak tahun 1316 H atau 1896 M yaitu mengenai pembetulan arah Qiblat dari langgar-langgar dan masjid-masjid di Yogyakarta yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1912 KH. Ahmad Dahlan mengajukan surat permintaan "recttperson" bagi Muhammadiyah kepada Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta. Permintaan ini dikabulkan dengan surat ketetapan Gouvernement Besluit No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Pengakuan Muhammadiyah sebagai badan hukum mula-mula berlaku hanya di Yogyakarta tetapi kemudian berkembang juga di daerah lain. Pada masa awal gerakannya Muhammadiyah tidak hanya memusatkan kegiatan di bidang dakwah melainkan juga memberikan kursus-kursus dan pelajaran-pelajaran agama Islam, mendirikan sekolah-sekolah umum disamping mendirikan madrasah-madrasah. Dengan perkataan lain, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah membentuk manusia muslim yang berpendidikan intelek, atau mendidik manusia intelek yang berjiwa muslim. Di bidang kemasyarakatan lainnya, Muhammadiyah mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, memelihara anak-anak yatim piatu, menerbitkan buku-buku agama dan buku bacaan lainnya, menerbitkan surat kabar, majalah dan sebagainya. Dengan demikian ditinjau dari segi idiologis, perjuangan Muhammaddiyah untuk memodernisasikan cara menyiarkan dan mengembangkan agama Islam dapat dikatakan berhasil. Ketika Muhammadiyah belum diperkenankan membuka cabang dan rantingnya di luar Yogyakarta, masyarakat yang ingin mendirikan Muhammadiyah di daerah lain dianjurkan menggunakan nama lain. Sehingga sesuai dengan anjuran itu maka di Pekalongan berdiri Nurul Islam, di Makasar berdiri Almunir, di Garut berdiri Alhidayah. Sedangkan di Sala berdiri perkumpulan *Sidik Amanat Tabligh Fathonah* (SATF). Perkumpulan ini merupakan cabang Muhammadiyah di Sala waktu itu. Juga di dalam kota Yogyakarta sendiri KH. Ahmad Dahlan menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam menurut kemampuannya, dengan nama masing-masing yang mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, seperti Ikhwanul-Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Khayatul-Qulub, Priya-Utama, Dewan Islam, Thaharatul-Qulub, Thaharatul-Aba, Ta'awana alal birri Ta'rifu bima kana, Wal-Fajri, Wal-Asri, Jamiyatul Ummahat, Jamiatul Muslimin, Syarihatul Mabtabi dan lain-lain. Oleh karena banyaknya cabang Muhammadiyah yang berdiri di luar kota Yogyakarta ini, maka KH. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan ijin untuk pendirian cabang Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian dikabulkan dengan Besluit dari Pemerintah Belanda No. 40 tanggal 16 Agustus 1920.

Kemudian pada tanggal 7 Mei 1921 KH. Ahmad Dahlan mengusulkan permohonan izin untuk kesempurnaan maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia (dulu *Nederland Indie*). Usul ini disetujui oleh Gubernemen dengan Besluit No. 3 tanggal 2 September 1921. Seiring dengan timbulnya kepanduan di Yogyakarta, maka pada permulaan tahun 1922 dalam organisasi Muhammadiyah juga dibentuk organisasi kepanduan dengan nama Hizbul Wathan dibawah pimpinan Yumaeni.

Dengan lahirnya Muhammadiyah tercatatlah dalam sejarah bahwa gerakan ini adalah merupakan pelopor kebangunan Islam Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari segi nasional, maka Muhammadiyah pun terhitung pelopor kebangunan nasional.

e. Lahirnya Tamansiswa 3 Juli 1922

Keadaan yang dirasakan pada masa kolonial Belanda, bahwa sistem pendidikan yang berlaku lebih banyak berorientasi pada kepentingan bangsa Belanda dari pada rakyat bumi putra. Kepincangan ini menjadi tantangan bagi kaum pergerakan untuk menciptakan iklim baru dalam dunia pendidikan yang berdasarkan kebudayaan dan kepentingan rakyat Indonesia. Keadaan tersebut berhasil menggugah para pemikir sehingga dari mereka lahir ide untuk mengentaskan bangsa Indonesia dari kesengsaraan tersebut. Mereka kemudian membentuk sebuah forum untuk membicarakan masalah nasib bangsa Indonesia yang kemudian dikenal dengan "Perkumpulan Selasa Kliwon" di Yogyakarta. Forum ini beranggotakan antara lain RM. Soetatmo Soerjokoesoemo, RM. Soerjopoetro, BRM. Soebono, Ki Pronowidigdo, RM. Soewardi Soerjoningrat (Ki Hadjar Dewantara), Ki Ageng Soerjo Mataram, Ki Soetopo Wonoboyo dan RM. Gondo Atmodjo.

Dari beberapa perkumpulan, mereka telah berhasil membangun niat untuk membangun jiwa merdeka Bangsa Indonesia. Oleh karenanya dilanjutkan dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. RM. Soewardi Soerjoningrat (Ki Hadjar Dewantara) bertugas dalam masalah pendidikan anak.

2. Ki Ageng Soerjo Mataram bertugas menggarap jiwa merdeka bagi orang dewasa. Media ajarannya terkenal dengan "Kawruh Begja".
3. RM. Soerjopranata (kakak Ki Hadjar Dewantara) seorang tokoh SI dan pemimpin Adidharma bertugas mematangkan pikiran kaum buruh, yang karena keberaniannya mendapat julukan *de staking konig* (raja pemogokan)

Ketika kebutuhan akan pengajaran rakyat bumi putra sedang bergolak, RM. Soewardi Soerjoningrat seorang tokoh Perkumpulan Selasa Kliwon, pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan *National Onderwijs Instituut* Tamansiswa di Tanjung Weg 32 (sekarang Jl. Gadjah Mada 32 Yogyakarta). Sistem pendidikan di dalamnya terkenal dengan Sistem Among yang mendasarkan pada dua landasan pokok yaitu : Pertama, Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir-batin, sehingga dapat hidup berdiri sendiri. Dan kedua, Kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.

Pada tanggal 6 Januari 1923 di dalam National Instituut Tamansiswa dibentuk sebuah majelis yang disebut *"Instituutraad"* yang bertugas memperlancar jalannya pendidikan. Dalam konferensi yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 20 – 22 Oktober 1923, perguruan ini memperluas Instituut menjadi *Hoofdraat* (majelis luhur), dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	RM. Soetatmo Soeryokoesoemo
Ketua II	:	RM. H. Soerjopoetro
Panitera Umum	:	Ki Hadjar Dewantara
Anggota	:	Ki Pronowidigdo, M.Ng. Wiyodihardjo, R. Roedjito, Mr. Soeyoedi, RM. Soeryodipoero
Penasehat	:	Ki Prawirowiworo

Baru pada tahun 1930 nama National Onderwijs Instituut Tamansiswa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Perguruan Nasional Tamansiswa.

f. Perlawanan Rakyat terhadap Penjajahan Belanda

Menggeloranya pergerakan nasional sejak 1908, makin lama makin keras menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah kolonial Belanda. Hal ini menggelisahkan pemerintah waktu itu. Kritik-kritik mulai bermunculan sehingga Belanda memandang perlu memberikan *"Volksraad"* sebuah dewan perwakilan rakyat di daerah jajahan yang dibuka tanggal 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Mr. Graaf Van Limburg Stirum. Akibat adanya gejolak baik di daerah jajahan dan di negeri Belanda tentang tuntutan perluasan hak negeri jajahan, maka pada tanggal 18 November 1918 Volksraad mengadakan sidang istimewa. Dalam sidang itu Gubernur Jenderal De Graaf Van Limburg Stirum menyampaikan janjinya bahwa akan diselenggarakan pemerintahan yang demokratis di daerah jajahan. Janji yang kemudian dikenal dengan "November Belofte" atau Janji November itu tidak pernah terwujud. Karena itulah Haji Agus Salim keluar dari Volksraad.

Kondisi politik di daerah jajahan semakin panas oleh tindakan radikal organisasi-organisasi kiri. Semula arah kiri ini dipengaruhi oleh *"Indische Sociaal Democratische Vereeniging"* (ISDV), yang berdiri pada bulan Mei 1914 di Semarang oleh seorang Belanda yang bernama H.F.J.M. Sneelviet. Waktu itu belum ada aturan untuk tidak bergabung dalam dua organisasi atau lebih, sehingga seorang anggota SI (Sarekat Islam) boleh juga menjadi anggota organisasi lain. Oleh karena itulah maka dalam SI terdapat dua golongan yaitu golongan Islam murni antara lain H.O.S. Cokroaminito, Abdul Muis, H.A. Salim, dll. Sedangkan yang beraliran sosialis – marxis antara lain Semaun, Darsono, Tan Malaka, dll. Oleh karena itu maka pada tahun 1921, dalam kongresnya di Surabaya pecah menjadi dua yaitu SI putih yang tetap konsisten dengan aturan SI, dan SI Merah yang menentang dan kemudian menjadi Serikat Rakyat yaitu susunan bawah dari PKI (Partai Komunis Indonesia).

Sementara itu ISDP mengalami perpecahan. Sayap kanan dibawah pimpinan P.F. Dahler (namanya berganti Amir Dahlan) yang kemudian mendirikan *Indische Sociaal Democratische Party* (ISDP). Sedangkan sayap kiri makin lama makin bercorak komunis. Apalagi setelah berdirinya Komintern pada tanggal 5 Maret 1919. Sifat komunis partai itu semakin lama semakin mantap dan pada tanggal 23 Mei 1920 namanya diganti menjadi Partai Komunis Indonesia dibawah pimpinan Semaun. Partai ini semakin lama semakin besar sehingga sangat besar pengaruhnya dalam jalannya politik daerah kolonial Belanda.

Sejak berdirinya, PKI telah yakin bahwa pemerintah Belanda melakukan berbagai macam kebohongan. Oleh karena itulah maka pada setiap kesempatan digunakan oleh PKI untuk menciptakan kekacauan (anarkhi). Karena PKI memiliki kekuatan yaitu kaum buruh, maka kekuatan inilah yang diandalkan dalam berbagai aksi itu. Tahun 1922 Tan Malaka menggerakkan pemogokan buruh pegadaian. Karena tindakannya ia akan dibuang ke Timor, tetapi atas permintaannya dia meninggalkan Indonesia dan berkelana ke Eropa dan Asia. Tindakan itu ternyata tidak menyurutkan aksi mogok. Semaun pada tahun 1923 menggerakkan aksi mogok buruh Trem dan kereta api. Akibatnya ia harus mengikuti jejak Tan Malaka. Pimpinan selanjutnya dipegang oleh Darsono. Pada tahun 1924 Darsono juga harus mengikuti apa yang dialami oleh Tan Malaka, karena berbagai kegiatan-kegiatannya yang terkait dengan pemogokan.

Melihat apa yang dilakukan oleh Belanda kepada para pemimpin mereka, para tokoh PKI yang masih bebas merasa khawatir. Mereka kemudian mulai memikirkan diadakannya revolusi. Oleh karenanya untuk menghitung kekuatan PKI mengadakan kongres di Kotagede Yogyakarta pada bulan Desember 1924. Karena masih tergolong sedikit maka perlu digalang kekuatan kembali. Caranya adalah dengan merangkul golongan non komunis. Dalam hal ini PKI mendapat dukungan dari K.H. Misbach. Ia

adalah tokoh muslim yang tertarik dengan propaganda PKI tentang sosialisme. Bahkan dia juga yang mencetuskan slogan "sama rasa, sama rata". Bahkan saking semangatnya dia berani berkata bahwa yang tidak ikut berevolusi bukan Muslim.

Untuk menentukan kapan revolusi dimulai maka diadakan kongres di Surakarta pada awal Desember 1925. Namun oleh residen Surakarta waktu itu dilarang. Oleh karena itu para pemimpin PKI seperti Alimin, Muso, Aliarkham, Sarjono, St. Said Ali (mewakili Sumatra), dll segera mengadakan rapat. Hasil rapat terkenal dengan nama "Dokumen Prambanan" (tanggal 12 Desember 1925). Dalam dokuken tersebut termuat pedoman-pedoman praktis dan ketentuan-ketentuan saat revolusi dilancarkan yaitu bulan Juni 1926 ada juga sumber lain yang menyebutkan revolusi ditetapkan bulan Juli 1926. Kebutuhan Senjata diperoleh dari penyelundupan dari Singapura, yang dilakukan oleh para penyelundup yang menyamar sebagai nelayan. Mendengar rencana tersebut, Tan Malaka tidak setuju, karena dia melihat kekuatan PKI waktu itu belum siap. Dia memperingatkan para pemimpin PKI yang masih bebas dengan pamfletnya yang berjudul Menuju ke Republik Indonesia. Dalam pamflet tersebut Tan Malaka mengemukakan bahwa PKI masih perlu tambahan anggota, Persiapan PKI belum memasak, Perlunya strategi yang tepat. Juga dalam pamflet tersebut disampaikan bahwa kekuatan Belanda berpusat di Jawa, antara lain pusat politik di Jakarta, militer di Bandung, dan ekonomi di lembah Bengawan Solo. Untuk di luar Jawa terdapat di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan. Meskipun pamflet ini mendapat perhatian dari PKI, namun gagal menghentikan maksudnya untuk mengadakan revolusi. Akhirnya revolusi meletus meski dengan kekuatan yang belum memadai. Pemberontakan meletus antara lain di daerah Banten dan Minangkabau. Perlawanan Rakyat Banten (12 Nopember 1926) dapat dipadamkan. Perlawanan rakyat Minangkabau yang dipimpin oleh Sutan Said Ali dan Sadrudin mengakibatkan pertumpahan darah. Perlawanan ini dapat dipatahkan (Januari – Pebruari 1927). Mereka melakukan perlawanan bukan karena propaganda komunis akan tetapi lebih mengarah pada kecintaan mereka kepada kebebasan.

Waktu itu pemerintah jajahan menghentikannya dengak aksi kejam yang dikenal dengan "Pendigulan". Dari sinilah dimulainya sejarah pembuangan DIGUL. Tindakan pembuangan ini berpedoman pada hak-hak luar biasa dari Gubernur Jenderal (*Exorbitante Rechten*), hingga orang yang disangka berbahaya dapat dibuang ke Digul tanpa ada putusan hakim. Ribuan rakyat Indonesia menjadi korban dari hak kolonial Gubernur Jenderal ini. Menurut catatan resmi para pemberontak yang berhasil dibuang ke Digul mencapai ratusan orang. Termasuk diantaranya Aliarkham dan Sarjono. Waktu itu Muso dan Alimin berhasil melarikan diri ke luar negeri. Karena peristiwa itulah maka organisasi PKI dilarang dan dibubarkan dan muncul kembali setelah Indonesia Merdeka.

g. Lahirnya PNI 4 Juli 1927

Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) di dirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Tokoh-tokoh PNI yang berperan dalam pendirian partai ini antara lain : Sukarno, Iskak Cokroadisuryo, Cipto Mangunkusuma, Samsi, Sartono, Budiarto, Sunario, Anwari. PNI bermula dari Algemene Studie Club, Bandung. Beberapa hal yang mendorong berdirinya organisasi ini antara lain :

1. Pergerakan yang ada mulai melemah sehingga kurang berpotensi menggerakkan massa.
2. PKI sebagai partai massa waktu itu telah dilarang.
3. PNI bersifat radikal revolusioner, meskipun para pemimpinnya berasal dari kalangan intelektual.
4. Propagandanya menarik dan memiliki propagandis ulung seperti Bung Karno yang merupakan pemimpin kharismatik.

Dasar PNI waktu itu adalah : Marhaenisme (sosio-nasionalime dan sosio-demokrasi). Menurut Sukarno, Marhaenisme adalah ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan merata. Sedangkan cita-cita PNI adalah jelas "Mencapai Indonesia Merdeka". Rapat-rapat penting yang pernah digelar oleh PNI antara lain :

1. Tanggal 14 Agustus 1927 di Bandung, Rapat protes terhadap penangkapan pelajar-pelajar Indonesia di Negeri Belanda.
2. Tanggal 25 Agustus 1927 di Bandung
3. Tanggal 9 Oktober 1927 di Yogyakarta
4. Tanggal 4 Desember 1927 di Jakarta
5. Tanggal 27 – 20 Mei 1928 mengadakan Kongres Pertama di Surabaya
6. Tanggal 30 Agustus 1928 di Gresik
7. Tanggal 14 Oktober 1928 di Semarang
8. Tanggal 24 Maret 1929 di Bandung
9. Tanggal 18 – 20 Mei 1929 mengadakan Kongres Kedua di Jakarta
10. Tanggal 27 Juli 1929 di Surabaya (dengan mengadakan rapat Studie Club)
11. Tanggal 25 Agustus 1929 di Jakarta
12. Tanggal 15 September 1929 di Bandung
13. Bulan Oktober 1929 di Bandung dan Jakarta.

Dalam kongres pertamanya yang dilaksanakan di Surabaya (27 – 20 Mei 1928) PNI yang semula Perserikatan Nasional Indonesia diganti menjadi Partai Nasional Indonesia dengan singkatan masih tetap yaitu PNI. Perubahan ini lebih mempertegas sifat pergerakan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan kemajuan taraf hidup rakyat Indonesia pada umunya. Sesuai dengan watak PNI maka PNI menetapkan Merah Putih dan kepala banteng sebagai lambangnya. Kesemuanya melambangkan berani, suci dan percaya kepada diri sendiri.

Melihat perkembangan PNI maka Pemerintah Hindia Belanda mengawasi dengan ketat perkembangan PNI, meskipun pada waktu itu gerakannya, masih ada dalam taraf kewajaran. Meski demikian akibat propaganda Sukarno yang begitu menarik PNI berkembang dengan pesat, sehingga Gubernur Jenderal dalam pembukaan sidang Dewan Rakyat pada tanggal 15 Mei 1928 perlu memberikan peringatan kepada pemimpin PNI supaya menahan diri. Namun himbauan itu tidak dihiraukan oleh para pemimpin PNI. Peringatan kedua kembali disampaikan oleh pemerintah Belanda pada bulan Juli 1929.

Pada akhir tahun 1929 tersiar kabar provokasi bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan di awal tahun 1930. Oleh karena itu pemerintah Belanda mengadakan penggeledahan dan penangkapan terhadap para pemimpin PNI yaitu Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriadinata pada tanggal 29 Desember 1929. Ir. Sukarno ditangkap sepulang dari Surakarta menghadiri kongres PPPKI yang waktu itu Sukarno masih berada di Yogyakarta. Tokoh PNI pada tanggal 18 Agustus 1930 dihadapkan ke meja pengadilan Landraad Bandung. Pidato pembelaan Sukarno kemudian dikenal dengan judul "Indonesia Menggugat". Dalam pembelaannya itu Sukarno berhasil menguraikan dengan gamblang sisi negatif praktek kapitalisme dan kolonialisme Belanda. Akibatnya pada tanggal 22 Desember 1930 hakim menjatuhkan keputusan antara lain : Sukarno dihukum 4 tahun penjara, Gatot Mangkuprojo 2 tahun, Maskun 1 tahun 8 bulan, dan Supriadinata 1 tahun 3 bulan. Tiga orang pembela yang memperjuangkan nasib para pemimpin PNI waktu itu adalah Mr. Sartono, Ir. Suyudi, dan Mr. Sastro Mulyono. Keputusan hukuman bagi para pemimpin PNI di ditetapkan oleh Raad van Justitie pada tanggal 17 April 1931.

Para pimpinan PNI dituduh melakukan perbuatan mengganggu umum atau menentang kekuasaan pemerintah yang pada dasarnya dikategorikan melakukan kejahatan. Oleh karena itu para pengikut PNI dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dengan pertimbangan itulah maka PNI dibubarkan pada tahun 1931. Sebagai gantinya para pemuka PNI mendirikan parti baru yaitu Partindo (Partai Indonesia) yang dipimpin oleh Sartono. Hal ini dengan maksud agar perjuangan tetap dapat dilaksanakan. Tetapi bagi mereka yang tidak menyetujui pembubaran PNI mereka mendirikan PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) yang dipimpin oleh M. Hatta dan Syahrir.

h. Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia 17 Desember 1927

PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) merupakan sebuah federasi politik yang didirikan oleh wakil dari PSI (Partai Serikat Islam), BU (Boedi Oetomo), PNI (Perserikatan Nasional Indonesia), Pasundan, Sumatranenbond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia dalam sebuah pertemuan di Bandung yang berlangsung tanggal 17 – 18 Desember 1927. Pendirian PPPKI ini dipelopori oleh Ir. Soekarno sebagai sosok yang sangat mendambakan persatuan. Adapun tujuan dari dibentuknya PPPKI ini antara lain :

1. Mencegah perselisihan antar partai.
2. Menyatukan organisasi, arah serta cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
3. Mengembangkan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya yang kemudian diterima oleh berbagai anggotanya : Sang Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan.

Hasil utama dibentuknya PPPKI ini adalah makin meluasnya rasa persatuan kebangsaan Indonesia. Semua partai atau pergerakan tujuannya sama dan tegas : Indonesia Merdeka.

Kongres Pertama PPPKI diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Wakil-wakil dari partai politik berharap agar pembentukan federasi ini menjadi era baru gerakan kebangsaan. Permasalahan yang dibahas antara lain : masalah pendidikan nasional, bank nasional, dan cara memperkuat kerjasama. Komisi-komisi dalam rapat tersebut antara lain : Cokroaminoto (PSI), Sukarno (PNI), Otto Subrata (Pasundan) dan Thamrin (Kaum Betawi). Mereka bekerja gigih menyiapkan program jangka pendek. Sementara itu kongres berhasil membentuk badan pengurus yang bernama Majelis Pertimbangan yang diketuai oleh Dr. Sutomo (BU) dan Anwari (PNI).

i. Kongres Pemuda II di Jakarta 28 Oktober 1928

Berdirinya organisasi Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908, ternyata memberikan inspirasi bagi golongan kaum muda. Mereka tidak ketinggalan segera mendirikan organisasi-organisasi pemuda kedaerahan. Yang pertama adalah Jong Jawa. Semula bernama Tri Koro Dharmo yang didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Anggotanya kebanyakan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena sifat kejawaannya terlalu menonjol maka dalam kongresnya tahun 1918 namanya diganti menjadi Jong Java. Dengan demikian pemuda dari Jawa Barat dapat turut serta.

Berdirinya Jong Java kemudian diikuti oleh pemuda-pemuda dari daerah lain. Seperti Jong Sumatranen Bond yang berdiri tanggal 9 Desember 1917. Jong Minahasa berdiri tahun 1918, Jong Ambon dan Jong Celebes (Sulawesi), Jong Borneo (Kalimantan). Perkumpulan-perkumpulan tersebut bergerak maju menuju persatuan Indonesia. Sejak tahun 1920 Jong Java tumbuh menjadi perkumpulan yang semi politik, yang tidak saja bertujuan membangun Jawa Raya tetapi lebih jauh kedepan menuju Indonesia Merdeka (1926).

Langkah pertama yang diambil oleh perkumpulan pemuda untuk meninggalkan batas-batas kesukuan menuju kesatu-Indonesia-an adalah diselenggarakannya Kongres Pemuda I tanggal 20 April s.d. 2 Mei 1926 di Jakarta yang dipimpin oleh M. Tabrani. Adapun tema dari kongres tersebut adalah Indonesia Bersatu. Persiapan kongres tersebut telah dimulai sejak November 1925 dengan adanya pertemuan-

pertemuan yang dilakukan oleh wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun dan lain-lain. Dalam kongres itu muncul usul untuk menyatukan fusi dari semua organisasi pemuda yang ada di Indonesia.

Setelah kongres itu, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun, *Vereeniging voor Ambonsche Studenenden*, dan Jong Batak, berkumpul lagi dengan komite Kongres dan melahirkan suatu gagasan untuk mendirikan organsisasi baru yang bernama Jong Indonesia dengan tujuan menanamkan nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia Raya. Nama ini kemudian diambil alih oleh Algemeene Studie Club Bandung yang kemudian diterjemahkan menjadi Pemuda Indonesia.

Kongres Pemuda I di Jakarta tahun 1926 mendorong lahirnya organisasi pemuda pelajar I yang diberi nama PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia). PPPI inilah yang akhrinya memberanikan diri memprakarsai diselenggarakannya Kongres Pemuda II tahun 1928 di Jakarta. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia Kedua. Kongres dilaksanakan di gedung *Indonesische Club Gebauw* yang terletak di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta (sekarang Museum Sumpah Pemuda). Hadir dalam kongres tersebut antara lain : Sugondo Joyopuspito (ketua), Muh. Yamin (sekretaris yang merumuskan ikrar pemuda), Abu Hanifah, WR. Supratman, Sukarjo Wiryopranoto, Kuncoro Purbopranoto, M.H. Thamrin. Sebagai realisasi dari keputusan kongres maka pada tahun 1930 diadakanlah fusi berbagai organisasi pemuda lokal menjadi satu wadah, yaitu Indonesia Muda.

Para peserta kongres yang hadir waktu itu mempertegas perasaan persatuan mereka dengan mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Adapun isi dari ikrar itu ialah :

Pertama : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
Kedua : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, bahasa Indonesia
Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Karena pertimbangan politik waktu itu, maka rumusan tersebut mengalami perubahan yang intinya satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, jadi bunyinya tetap sama. Disamping kesepakatan tersebut, peserta kongres juga menerima lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Pada acara penutupan dinyanyikan lagu Indonesia Raya dengan instrumentalia. Keputusan Kongres tersebut dimuat dalam Surat Kabar Persatuan Indonesia tanggal 15 November 1928.

j. Kongres Wanita Indonesia 1928 Di Yogyakarta

Timbulnya kesadaran nasional juga dialami oleh kaum wanita. Hal ini ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan wanita modern. Organisasi mengalami

perkembangan dari lingkup lokal ke nasional sejalan dengan pertumbuhan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Sejalan dengan cita-cita RA. Kartini (1879-1904), pada masa awal pergerakan nasional mucul organisasi-organisasi wanita antara lain Putri Mardika di Jakarta tahun 1912, Kautaman Istri di Tasikmalaya tahun 1913, di Sumedang dan Cianjur tahun 1916, di Ciamis tahun 1917, di Cicurug tahun 1918, Pawiyatan Wanito di Magelang tahun 1915, Wanito Susilo di Pemalang tahun 1918, Wanito Hadi di Jepara tahun 1915.

Setelah tahun 1920 organisasi wanita makin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama organisasi sosial dan politik pada umumnya. Setiap organisasi politik mempunyai bagian wanita seperti Wanodya Utomo dari SI, kemudian menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia (SPII). Bagian wanita Muhammadiyah adalah Aisyiah tidak mencampuri politik. Bagian wanita Sarekat Ambon adalah Ina Tuni. Di Yogyakarta, tempat wanita-wanita terpelajar terdapat beberapa pekumpulan wanita yang tidak hanya belajar kepandaian khas wanita tetapi mepunyai tujuan tertentu. Mereka itu diantaranya adalah Wanita Utomo, Wanita Mulyo, Wanita Katholik yang berdiri sekitar tahun 1920, dan Putri Budi Sejati di Surabaya. Adapun organisasi pergerakan wanita yang merupakan organisasi pemudi terpelajar antara lain Putri Indonesia, *Jong Islamieten Bond Dames Afdeling* (JIBDA disamping JIB), Jong Java bagian gadis-gadis (*Meisjeskring*), organisasi Wanita Taman Siswa dan lain-lain.

Sejalan dengan perjalanan waktu dimana faham kebangsaan semakin tumbuh berkembang, maka pada tanggal 22 s.d. 25 Desember 1928 diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia I bertempat di Dalem Joyodipuran Jl. Kintelan 139 (sekarang Jl. Brigjen Katamso 23 Yogyakarta). Kongres dihadiri oleh kurang lebih 1000 orang wakil-wakil 30 organisai wanita. Diantaranya Wanita Utomo, Aisyiah, Wanita Tamansiswa, Poetri Indonesia, *Jong Islamieten Bond Dames Afdeling*, *Meisjeskring*, dan Wanita Katholik. Organisasi pergerakan yang lain yang juga hadir antara lain Boedi Oetomo, PNI, Partai Syarikat Islam dan Muhammadiyah.

Kongres Perempuan Indonesia I ini diprakarsai oleh Ny. Sukonto (dari Wanita Utomo), Nyi Hadjar Dewantara (dari Wanita Tamansiswa) dan Nn. Sujatin (dari Putri Indonesia) dan didukung oleh tujuh organisasi wanita antara lain Wanita Utomo, Wanita Tamansiswa, Putri Indonesia, Wanita Katholik, Jong Java bagian gadis-gadis (*Meisjeskring*), Aisyiah dan JIBDA (*Jong Islamietend Bond Dames Afdeling*). Pelaksanaan kongres dimulai pada hari Sabtu malam tanggal 22 Desember 1928 dan dipimpin oleh sebuah panitia kongres. Adapun susunan panitia tersebut adalah ssebagai berikut :

Ketua : Ny. R. A. Sukonto (Wanita Utomo)
Wakil Ketua : Nn. Siti Munjiah (Aisyiah)
Sekretaris I : Nn. Siti Sukaptinah (JIBDA)
Sekretaris II : Nn. Siti Sunaryati (Putri Indonesia)

Bendahara I : Ny. R.A. Harjodiningrat (Wanita Katholik)
Bendahara II: Ny. R.A. Sujatin (Putri Indonesia)
Anggota : Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Tamansiswa), Nyi. Driyowongso (Wanita PSII), Nyi. Muridan Noto (Wanita PSII), Nyi. Umi Salamah (Wanita PSII), Ny. Johanah (Aisyiah), Nn. Diah Muryati (JIBDA)

Adapun maksud dari dilaksanakannya kongres Perempuan Indonesia I ini antara lain sebagai berikut :

1. Supaya menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan Indonesia.
2. Supaya dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban, kebutuhan dan kemajuan wanita Indonesia.

Setelah menjalani perbincangan selama 4 hari (22 s.d. 25 Desember 1928), kongres berhasil memutuskan antara lain sebagai berikut :

1. Mendirikan badan federasi bersama "Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia" (PPPI). Adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut :

   Ketua : Ny. RA. Sukonto
   Wakil Ketua : Ny. RA. Sujatin
   Sekretaris I : Ny. St. Soekaptinah
   Sekretaris II : Ny. Moego Roemah
   Bendahara : Ny. R.A. Hardjodiningrat
   Komisaris : Nyi. Hadjar Dewantara, St. Moendjijah
   Anggota : Nyi. Hadjar Dewantara, Ny. Hajinah, Ny. Ali Sastroamidjoyo, Ismudijarti, Rosida.

2. Menerbitkan surat kabar, yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI. Adapun anggota redaksi terdiri dari Nyi. Hadjar Dewantara, Nn. Hajinah, Ny. Ali Sastroamijoyo, Nn. Ismudijarati, Nn. Budiah dan Nn. Sunaryati.
3. Mendirikan *Studie Fonds* yang akan menolong gadis-gadis yang tidak mampu.
4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri.
5. Mencegah perkawinan anak-anak.
6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah (Hindia Belanda), agar :
   a) Secepatnya diadakan *fonds* bagi janda dan anak-anak.
   b) Tunjangan bersifat pensiun jangan dicabut.
   c) Sekolah-sekolah putri diperbanyak.
7. Mengirimkan mosi kepada *Raad* Agama agar tiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.

k. Lahirnya Gabungan Politik Indonesia 21 Mei 1939

PPPKI mengalami kemunduran setelah para pemimpin PNI ditangkap dan partai tersebut dibubarkan. Sebab lain yang menyebabkan mundurnya PPPKI adalah adanya pertentangan partai-partai yang berasas kooperasi dan non-kooperasi, antara yang berdasarkan agama dan kenasionalan belaka. Juga keluarnya PSII (SI dulu) tahun 1930 dari PPPKI karena iri akan kebesaran PNI. Oleh karena itulah maka Bung Hatta memberikan komentar tentang PPPKI yang akan memperjuangkan persatuan justru malah mendapat persatean.

Tahun 1935 kondisi ekonomi mulai pulih setelah diterjang krisis ekonomi tahun 1930. Dengan kondisi seperti itu kaum pergerakan berharap agar hak-hak politik berdasarkan paham demokrasi dipulihkan juga. Harapan tersebut membaik setelah ada pergantian Gubernur Jenderal de Jong oleh Tjarda van Starkenborg-Stachouwer. Gubernur yang baru itu dianggap lebih luwes dan menaruh perhatian terhadap kaum pergerakan. Harapan kaum pergerakan menjadi lebih mantap, selain hal-hal tersebut diatas juga adanya kegentingan dunia akibat aksi Hitler dan ekspansi Jepang. Kondisi tersebut mendorong kaum pergerakan untuk mendesak pemerintah Belanda untuk mengadakan pembaharuan yang demokratis. Tuntutan penting untuk mengadakan pembaharuan itu terkenal dengan Petisi Sutarjo dan Mosi Wiwoho yang keduanya diajukan melalui Volksraad.

Tanggal 15 Juli 1936 Sutarjo Kartohadikusumo, ketua PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputera) bersama 5 anggota Volksraad lainnya yaitu Kasimo (Katolik Indonesia), Ratulangie (Sarekat Minahasa), Datuk Tumenggung (Sarekat Minangkabau), Alatas (Masyarakat Arab) dan Ko Kwat Tiong (Partai Tionghoa Indonesia) mengajukan petisi supaya diadakan suatu sidang permusyawaratan dari wakil-wakil Nederland dan India-Nederland atas dasar kesamaan kedudukan untuk menyusun rencana pemberian hak berdiri sendiri (otonomi) dalam batas pasal 1 Konstitusi kepada India-Nederland dalam waktu 10 tahun, atau di dalam waktu yang dianggap sesuai oleh sidang. Namun petisi tersebut ditolak. Ini menjadi bukti bahwa perjuangan kaum pergerakan yang dilakukan melalui Volksraad tidak membawa hasil. Oleh karena itu jalur yang ditempuh dengan membentuk GAPI.

Hasrat untuk menuju persatuan, tidak mundur. Setelah kemunduruan PPPKI maka pada tahun 1939 berdirilah GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Anggota GAPI terdiri dari Parindra (sebagai peolopornya), Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII (pecahan PSII), Perhimpunan Politik Katolik Indonesia. Untuk mengurus pekerjaan sehari-hari dibentuk sekretarian bersama yang diketuai oleh Abikusno (PSII) dan dibantu oleh MH. Thamrin (Parindra) dan Amir Syarifudin (Gerindo).

GAPI memiliki tujuan antara lain :
1. Pelaksanaan The Right of Self-determination.
2. Persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik, demokrasi sosial dan ekonomi.

3. Pembentukan parlemen yang dipilih secara bebas dan umum, dan yang mewakili dan bertanggung jawab kepada rakyat, parlemen terdiri dari atas dua kamar : Dewan Rakyat diubah menjadi Senat, dan Kamar Rakyat (Volkskamer) sebagai house of representatives harus dibentuk.
4. Membentuk solidaritas Indonesia Belanda untuk menghadapi kekuatan Fascis.
5. Pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dalam berbagai jabatan negara, termasuk Wakil gubernur Jenderal, wakil-wakil direktur pada departemen-depertemen, anggota Dewan India.

Karena itu (tuntutan 3 tersebut) GAPI berslogan "Indonesia Berparlemen", sedangkan GAPI dikenal juga sebagai menuntut "Indonesianisasi" jabatan-jabatan (karena tuntutan 5 tersebut di atas). Tuntutan tersebut belum pernah berhasil hingga Jepang masuk menduduki Indonesia tahun 1942.

I. Perang Dunia II (1939-1945)

Pada tanggal 1 September 1939, Perang Dunia II meletus ditandai dengan adanya penyerangan Jerman terhadap Polandia yang kedaulatannya dijamin oleh Inggris dan Perancis. Waktu itu negara-begara Eropa Barat terancam, begitu pula Belanda yang berada di Indonesia. Sementara itu situasi dunia menjadi bertambah genting. Gerakan tentara Jerman begitu cepat dan dahsyat, sehingga pada bulan Mei 1940, negara Belanda, Belgia, dan Perancis telah diduduki tentara Jerman.

Kebutuhan akan bahan bakar minyak untuk persiapan Perang Pasifik, menyebabkan Jepang tertarik akan Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mulai membuka Perang Pasifik dengan mengadakan penyerangan terhadap Pearl Harbour yaitu pangkalan armada Amerika di Pasifik. Pada hal waktu itu sedang berlangsung perundingan Cordell Hull – Nomura (yang dibantu oleh Korusu) di Washington. Penyerbuan ini, bagi Jepang dimaksudkan untuk melumpuhkan kekuatan Amerika di Pasifik, sehingga penyerbuan Jepang ke negara-negara Asia Tenggara, wilayah yang dijajah Inggris, Belanda, Perancis dan Amerika Serikat sendiri (Philipina) terus ke Australia bisa berlangsung dengan cepat. Sehari kemudian yaitu tanggal 9 Desember 1941 Gubernur Jenderal Tjarda memaklumkan bahwa India – Belanda dalam keadaan perang melawan Jepang.

Penyerbuan daerah-daerah selatan dilakukan oleh baik angkatan darat (Rikugun) maupuan angkatan laut (Kaigun) Jepang. Angkatan darat yang sudah menduduki Indo-Cina bertugas merebut Malaya, Sumatra, Luzon dan Burma. Angkatan laut merebut Pearl Harbour, Mindanau, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan pulau-pulau pasifik. Sesuai dengan tujuan penyerbuan, yaitu mencari dan menguasai sumber alam terutama minyak tanah, maka penyerbuan ke Indonesia dilakukan dengan menduduki daerah-daerah minyak di Kalimantan dan Sumatra terlebih dahulu.

Dari arah barat, kearah Kalimantan Barat, Jepang langsung mengirimkan tentara dari Indo-Cina yang berhasil menduduki tambang minyak tanah Miri di Brunai tanggal 16 Desember 1941. Kearah Malaya dan Sumatra dapat dilakukan dengan baik, karena Inggris mengira kedatangan Jepang dari arah selatan (laut) namun ternyata Jepang datang dari utara sehingga pasukan Inggris dapat dibuat tak berdaya. Sebelum ke Singapura, pasukan Jepang dibagi menjadi dua yaitu sebagian langsung ke Palembang (Januari 1942) untuk menyelamatkan sumber minyak tanah yang menurut rencana akan dibumihanguskan, sedang yang lainnya terus ke Singapura dan berhasil merebut daerah tersebut tanggal 15 Pebruari 1942.

Kemudian dari arah timur, setelah Pearl Harbour jatuh Jepang mendirikan pangkalan operasi di Kepulauan Pulau, yang terletak di sebelah timur Mindanau. Selain dilancarkan serangan ke Philipina, dari Pulau dilancarkan serangan untuk menduduki Tarakan dan Balikpapan (Januari 1942). Setelah Philipina jatuh, Jepang melancarkan serangan ke Selatan dan menduduki Menado (Januari 1942), Ambon (akhir Januari 1942), Ujung Pandang (Makasar, Pebruari 1942), Kepulauan Nusa Tengara (Pebruari 1942), juga Irian.

Melihat hal tersebut, Jawa berada dalam kepungan daerah yang telah diduduki Jepang. Jepang melancarkan serangan serentak dengan mengerahkan ketiga angkatan. Dalam sebuah pertempuran di laut Jawa pada bulan Pebruari 1942, Jepang berhasil menenggelamkan kapal Karel Dorman milik angkatan laut Belanda. Setelah itu dengan mudah tentara Jepang mendaratkan pasukannya di tiga tempat yaitu Banten, Indramayu dan Bojonegoro.

Pendaratan pasukan Jepang ke tempat-tempat tersebut tidak diduga sebelumnya, oleh karena itu Belanda tidak dapat mengadakan perlawanan. Seminggu kemudian, yaitu tanggal 9 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten, Panglima Tentara Belanda di Indonesia menandatangani penyerahan tidak bersyarat (kapitulasi) di Kalijati (Subang) Jawa Barat kepada Imamura. Penandatanganan dilakukan oleh Ter Poorten dan bukan Tjarda (gubernur jenderal) karena Belanda mempunyai tujuan jika perang telah usai akan mempermudah pemulihan kembali kekuasaannya. Hal ini karena yang menyerah adalah bala tentara Belanda dan bukan pemerintah Belanda.

Memang ketika itu gubernur Tjarda di tawan Jepang, namun Belanda membentuk pemerintahan dalam pelarian (*exile government*) di Australia di bawah H.J. Van Mook. Jadi meskipun tentara Belanda menyerah, namun pemerintahan Belanda tetap berjalan dalam bentuk exile government dalam bentuk NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Karena Indonesia diduduki Jepang maka terpaksa berkedudukan di Brisbane, Australia.

m. Penindasan Jepang 1942-1945

Masalah yang dihadapi Jepang sehingga menjadi negara Imperalis, salah satunya adalah masalah kepadatan penduduk, disamping adanya pembatasan imigrasi ke Austalia dan Amerika. Sesudah Perang Dunia I usai, minat Jepang terhadap Indonesia mulai bangkit. Hal itu dilatarbelakangi oleh berbagai pemahaman, antara lain : adanya ajaran Shinto tentang Hakko-Ichiu (ajaran kesatuan keluarga manusia). Jepang sebagai bangsa yang maju berkewajiban menyatukan bangsa-bangsa di dunia dan memajukannya. Khusus untuk Indonesia, pemahaman Jepang diperkuat oleh pendapat antropolog tahun 1930 bahwa antar orang Jepang dan Indonesia adalah serumpun, oleh karena itu masuk akal jika Jepang mengaku sebagai saudara tua. Alasan lain yang lebih riil yaitu masalah ekonomis. Jepang membutuhkan sumber alam yang dimiliki oleh Indonesia yaitu minyak tanah, timah, karet, tungten (pelapis baja), dan kina.

Jauh sebelum Jepang masuk ke Indonesia telah menyusun strategi untuk menarik perhatian dunia, khususnya rakyat Indonesia. Pada tahun 1938 PM Jepang, Pangeran Konoye, memaklumkan berdirinya Dewan Asia Raya yang akan menjalankan Orde Baru dengan doktrinnya : Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya (ATR). Ajaran baru ini dipropagandakan secara giat. Pers pribumi, bahkan pers Belanda, yang mau mempropagandakannya diberi subsidi. Jadi dalam propaganda itu diterangkan bahwa negara-negara yang dimasukkan dalam lingkungan ATR adalah negara-negara yang terbelakang yang akan mendapat bantuan dari Jepang. Cara lain juga dilakukan oleh Jepang yaitu melalu jalur pendidikan. Pelajar Indonesia diundang untuk belajar di Jepang dengan mendapat beasiswa. Untuk itu mereka harus diuji kesetiaannya kepada rencana ATR. Jepang juga berusaha menarik simpati umat Islam Indonesia. Orang Islam Jepang dikirim ke Mekkah menunaikan tugas haji. Di Tokyo didirikan mesjid. Kemudian sautu konferensi agama Islam diselenggarakan di Tokyo.

Politik itu ternyata membawa hasil. Ketika Jepang tiba di Indonesia rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan. Sehingga dengan mudah Jepang menundukkan Belanda dan terjadilah Kapitulasi Kalijati tanggal 9 Maret 1942. Sejak itulah Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang.

Dibawah pendudukan Jepang, Indonesia dibagi menjadi 3 koloni, berdasarkan pertimbangan strategi militer dan politis. Strategi militer berarti disesuaikan dengan organisasi pertahanan Jepang, politis berarti disesuaikan dengan penilaian Jepang terhadap perkembangan sosial politik di Indonesia. Bagi Jepang, Jawa dinilai lebih maju dibanding dengan daerah lain, tetapi hanya kaya akan tenaga. Sementara daerah lain kaya sumber alam dan jarang penduduknya. Karena itulah wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga koloni terpisah :

1. Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta dibawah tentara XVI.
2. Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi dibawah tentara XXV.

3. Pulau-pulau lain dengan pusat di Ujung Pandang (Makasar), dibawah angkatan laut, yang mempunyai penghubung di Jakarta, yaitu Laksamana Maeda.

Untuk memerintah Indonesia Jepang mengalami kesukaran, antara lain : 1) Indonesia terdiri dari wilayah yang luas berbentuk pulau-pulau yang banyak jumlahnya, masyarakatnya serbaneka dan majemuk dengan berbagai macam suku bangsa dan adat-istiadat, 2) Jepang kurang paham tentang sifat-sifat dan karakteristik bangsa Indonesia yang berbeda-beda tersebut. 3) Jepang kekurangan tenaga untuk mengisi jabatan-jabatan yang telah ditinggalkan oleh Belanda. Oleh karena itulah maka Jepang membiarkan dan mempertahankan organisasi pemerintah sebagaimana adanya tetapi pimpinannya harus orang Jepang. Jenderal Imamura yang mengepalai Tentara XVI dan menjadi penguasa tertinggi (Gunsireikan, kemudian Seiko sikikan) dalam pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa menjalankan politik lunak. Namun ketika berkaitan dengan masalah politik Imamura mulai bertindak keras seperti ia mengeluarkan maklumat tanggal 20 Maret 1942 yang melarang segala macam pembicaraan, pergerakan dan anjuran atau propaganda tantang peraturan dan susunan negara dan melarang pengibaran Sang Merah Putih dan penyanyian lagu Indonesia Raya.

Jauh sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, Radio Tokyo telah menerangkan maksud kedatangan tentara Jepang. Mereka datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa barat. Untuk itu mereka mengharapkan adanya bantuan dari rakyat. Mereka diharuskan memberikan bantuan berupa hasil-hasil alam maupun tenaga. Setelah Jepang berhasil mengusir bangsa Barat (Belanda), mereka akan mengusahakan kemajuan Bangsa Indonesia (Asia). Tetapi kenyataannya apa yang dijanjikan oleh Jepang hanya kebohongan. Harapan yang dihembuskan oleh bala tentara Jepang sirna sudah. Dari semula sudah terlihat bahwa Jepang tidak akan memenuhi janjinya. Usaha-usaha untuk memenuhi janji itu mulai muncul setelah Jepang mulai terjepit oleh kekuatan Sekutu. Bahkan kebijakan Jepang merendahkan martabat bangsa Indonesia. Karena sulitnya penghidupan, rakyat terpaksa makan ubi-ubian yang gizinya sangat kurang, bekicot yang dulunya dianggap jijik terpaksa dimakan untuk bertahan hidup, goni terpaksa dipakai sebagai bahan pakaian. Kesengsaraan rakyat masih ditambah dengan merajalelanya penyakit yang muncul seperti beri-beri, penyakit kulit, wabah pes, kutu kepala dan kepinding.

Perampasan kekayaan dalam berbagai bentuk raja brana dan raja kaya, rakyat dikenakan tanam paksa untuk kebutuhan perang : kapas, randu, rami, jarak dan sebagainya. Mereka juga dikenakan kerja paksa (romusha atau narakarya) untuk membangun bangunan-bangunan militer.

Waktu itu Jepang merasa terlalu optimis sehingga tidak memandang perlu mengikutsertakan bangsa Indonesia, buktinya Jepang hanya mendirikan Gerakan Tiga A (Nipon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) yang dibentuk

pada tanggal 29 April 1942 dibawah pimpinan Mr. Syamsuddin. Untuk menggerakkan pemuda dibentuk Gerakan Pemuda ATR (Asia Timur Raya) yang kemudian berubah menjadi Seinendan dibawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto.

Usaha membentuk kerjasama dengan rakyat Indonesia semakin tampak ketika Jepang terpukul dalam pertempuran di Laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Berbagai gerakan massa yang dibentuk oleh Jepang antara lain : *Seinendan* (barisan pemuda), *Seinentai* (barisan murid-murid sekolah dasar), *Gakukotai* (barisan murid-murid sekolah lanjutan), *Fujin-Seinentai* (barisan gadis-gadis), *Fujinkai* (barisan wanita), *Keibodan* (barisan cadangan polisi), *Heiho* (barisan cadangan prajurit /militer), *Romusha* (barisan pekerja paksa).

Karena dipandang tidak berguna maka Gerakan Tiga A dibubarkan. Sebagai gantinya maka dibentuk PUTERA yang didirikan pada bulan Maret 1943. Putera dipimpin oleh empat serangkai yaitu Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Manshur. Putera dalam menjalankan tugasnya selalu berhubungan dengan massa rakyat melalui pidato-pidatonya. Dalam berbagai kesempatan, hal ini digunakan oleh para pemimpin Putera untuk menanamkan nasionalisme. Sebagai sasarannya adalah PETA (Pembela Tanah Air / Boo-ei-Giyugun) sebuah organisasi militer bersenjata yang dibentuk pada bulan Oktober 1943. Organisasi ini diusulkan pendiriannya oleh Gatot Mangkuprojo. Karena kedudukan Jepang yang makin terdesak dengan jatuhnya Guadalcanal pada bulan Agustus 1943, maka Jepang menyetujui pembentukan PETA. Peta berada dibawah pengaruh Putera.

Kebereadaan Putera justru lebih menguntungkan pihak Indonesia maka, Putera dibubarkan pada bulan Maret 1944. Sebagai gantinya didirikanlah Gerakan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai) yang langsung dibawah pengawasan Jepang, meskipun para pemimpinnya tetap sama.

n. Jepang menyerah kepada Sekutu

Sewaktu Jepang melibatkan diri dalam perang dunia II, Jepang salah mengira tentang Amerika Serikat. Diluar perhitungan Jepang, setelah dihancurkannya Pearl Harbour tanggal 8 Desember 1941, Amerika bangkit kembali dengan begitu cepat. Dalam pertempuran untuk menguasai Australia, Jepang terpukul di Pulau Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Peristiwa itu ternyata menjadi *"turning point"* laju ekspansi tentara Jepang. Jenderal Mac Arthur yang semula terpukul di Philipina kembali melancarkan serangan balasan. Satu persatu pulau-pulau antara Australia dan Jepang direbut kembali. Bulan April 1944 Sekutu telah mendarat di Irian Barat. Saat itulah kedudukan Jepang di Indonesia mulai terancam. Keadaan semakin genting ketika Pulau Saipan gugusan kepulauan Mariana jatuh ke tangan Sekutu pada bulan Juli 1944. Keberadaan pulau tersebut sangat penting karena dari Saipan ke Tokyo dapat ditempuh dengan pesawat B 29 USA. Ini berarti ancaman untuk Tokyo dari udara. Karena itulah kabinet Tojo jatuh dan digantikan dengan Kabinet Koiso. Untuk memikat hati bangsa Indonesia

PM Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan pidato di muka parlemen Jepang yang antara lain menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari yang terkenal dengan *"Koiso Declaration"*.

Sepak terjang bala tentara Jepang benar-benar berhenti setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tiga hari kemudian. Akibat dari pengeboman itu sungguh dahsyat. Korban jatuh ribuan jumlahnya. Melihat hal itu maka kedudukan Jepang sudah diujung tanduk. Ditambah lagi bahwa pada tanggal 9 Agustus 1945, Rusia menyatakan perang melawan Jepang. Melihat keadaan tersebut maka pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Induk akte penyerahan ditandatangani di atas kapal penempur Amerika Missouri, diikuti dengan penerahan ditempat lainnya.

o. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Dengan adanya *"Koiso Declaration"* yang menyatakan akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia di kelak kemudian hari, maka pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan rencana pembentukan BPUPKI (*Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai* / Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pada tanggal 29 April 1945 susunan BPUPKI diumumkan. Anggotanya terdiri orang Indonesia dan orang Jepang, sedangkan ketuanya adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut yang dibahas adalah persoalan dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang itulah Ir. Soekarno menyampaikan gagasannya tentang Pancasila. Kemudian sidang yang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 untuk membicarakan batang tubuh UUD 1945 yang menyangkut berbagai hal, wilayah negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bendera nasional dan bahasa nasional. Berdasarkan sidang BPUPKI wilayah Indonesia kelak adalah Nederlandsch Indie ditambah jajahan Inggris yaitu Malaka dan kalimantan Utara serta Timor Portugis. Bentuk negara disetujui kesatuan (Unitaris). Bentuk pemerintahan Republik, Bendera nasional Merah Putih dan bahasa nasional bahasa Indonesia.

Sementara itu kedudukan Jepang semakin terjepit. Komando Tentara Jepang di Wilayah Selatan mengadakan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura. Dalam rapat disetujui bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945. Perubahan begitu cepat terjadi. Tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ *Dokuritzu Zyunbi Iinkai*) yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI. PPKI beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Anggota PPKI secara simbolis dilantik oleh Jenderal Terauchi dengan mendatangkan Sukarno – Hatta ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Terauchi telah menentukan tanggal 24 Agustus sebagai hari pemberian kemerdekaan. Setelah dilantik, maka Ir. Soekarno – Hatta pulang ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945.

Setibanya di Jakarta, Sutan Syahrir yang telah mengikuti perkembangan politik melalui radio gelapnya menyatakan bahwa Jepang telah meminta damai dengan Sekutu. Syahrir mendesak agar pernyataan kemerdekaan disampaikan keesokan harinya yaitu tanggal 15 Agustus 1945. Namun Ir. Soekarno – Hatta yang dituduh sebagai seorang kolaborasi Jepang oleh golongan Syahrir dan Golongan Pemuda, tidak mau ambil resiko. Hal itu karena waktu itu Jepang masih dengan kekuatan penuh. Sementara itu tanggal 15 Agustus 1945, Syahrir telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kembali ia mendesak Ir. Soekarno – Hatta, kembali pula Ir. Soekarno menolak, karena kabar itu hanya dari radio gelap bukan kabar resmi dari pemerintah Jepang.

Sementara itu pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 terjadi dua hal penting, yaitu persiapan rapat PPKI dan rapat Gerakan Pemuda. Setelah diterima kabar Jepang menyerah, maka PPKI akan mengadakan rapat tanggal 16 Agustus 1945 pagi. Rapat akan diadakan di Hotel Des Indes. Bersamaan dengan itu, Gerakan Pemuda mengadakan rapat dibawah pimpinan Sukarni dan Chaerul Saleh. Rapat memutuskan untuk mengamankan Ir. Soekarno – Hatta dari Jakarta ke Rengasdengklok. Alasan pemuda mengamankan Ir. Soekarno – Hatta dengan pertimbangan keamanan karena pemuda akan melakukan perebutan kekuasaan. Namun bagi Hatta, ia berpendapat bahwa para pemuda khawatir jika Ir. Soekarno-Hatta diperalat oleh Jepang sehingga cita-cita mereka kandas.

Mengenai pemilihan tempat pengamanan Ir. Soekarno – Hatta di Rengasdengklok, bukan di tempat lain, karena di sana terdapat kesatuan PETA bersenjata yang cukup besar serta masyarakat di situ didominasi orang yang anti Jepang dan pro perebutan kekuasaan. Hingga sore hari perebutan kekuasaan yang dicetuskan oleh para pemuda tidak terjadi. Sementara itu Laksamana Maeda kebingungan mencari Ir. Soekarno – Hatta untuk menyampaikan resmi penyerahan Jepang.

Dengan bantuan Wikana, Laksamana Maeda mengetahui kalau Ir. Soekarno–Hatta berada di Rengasdengklok. Lalu Maeda mengutus Soebarjo untuk menyampaikan berita resmi tersebut dan mengambil Ir. Soekarno – Hatta kembali ke Jakarta. Soebarjo tiba di Rengasdengklok petang hari. Kabar resmi berhasil diterima, kemudian mereka berangkat ke Jakarta dan tiba pukul 11.00 malam. Kemudian mereka segera menggelar rapat dengan mengundang para anggota PPKI. Rapat akan diadakan di Hotel Des Indes. Tatapi karena ada larangan mengadakan rapat setelah jam 10 malam, maka Maeda menawarkan agar rapat diadakan dirumahnya di Miyokodori (Nassau-Boulevard), kini Jl. Imam Bonjol No 1 (sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi).

Rapat yang semula hanya merupakan rapat PPKI kini diikuti pula oleh anggota Cou Sangi In dan pemimpin-pemimpin pemuda. Rapat berlangsung hingga pukul 6 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Hasilnya adalah rumusan teks proklamasi yang diumumkan pada hari itu juga jam 10 pagi.

p. Gema Proklamasi dalam Peristiwa IKADA

Walaupun Republik Indonesia telah terbentuk, hingga pertengahan September 1945 belum ada tanda-tanda Kabinet bekerja dan berusaha menyingkirkan halangan-halangan dari Tentara Jepang. Melihat keadaan yang tidak menentu dan melihat para pemimpin dari angkatan "tua" selalu ragu-ragu menghadapi Jepang, para pemuda lalu hilang kesabarannya. Maka direncanakanlah mengadakan Rapat Raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atlit Djakarta) di Medan Merdeka sekarng. Seluruh rakyat Indonesia di Ibukota dan sekitarnya dianjurkan hadir.

Jepang yang mencium adanya rencana itu mencoba mencegah terlaksananya rapat tersebut. Jepang rupanya tak ingin menanggung resiko disalahkan Sekutu yang tak lama lagi akan tiba di Jakarta. Jepang lalu mengambil tindakan. Kepada masyarakat Jakarta diserukan untuk tidak menghadiri rapat raksasa Ikada. Kabinet ditekan dan diancam, bahwa mereka akan ditawan, kalau sampai terjadi rapat di Ikada.

Meski demikian, pada tanggal 19 September 1945 rakyat tetap berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Ternyata bukan dari Jakarta saja mereka datang. Juga dari Bogor, Tangerang, Bekasi dan tempat-tempat lain. Lebih dari setengah juta manusia memadati lapangan IKADA saat itu. Mereka berjejal-jejal menunggu pemimpin mereka yaitu Ir. Soekarno.

Ternyata kabinet tak mau ditekan oleh Jepang. Bung Karno dan menteri-menteri lainnya datang ke lapangan Ikada. Rakyat Indonesia tidak lagi mempedulikan ancaman tentara Jepang. Meski senjata berat Jepang mengepung lapangan, namun rapat di Ikada tetap berjalan terus. Hanya 5 menit Presiden Soekarno berpidato, dan menganjurkan agar rakyat tenang, siap sedia menerima perintah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Sesudah itu rapat dibubarkan dan bentrokan dengan tentara Jepang dapat dihindarkan.

q. Konsolidasi Kekuasaan

Proklamasi Kemerdekaan yang telah dikumandangkan disambut dengan gerakan pengambilalihan kekuasaan dan senjata tentara Jepang oleh rakyat Indonesia yang dipelopori pemuda. Hal ini dilakukan dengan cara damai maupun secara kekerasan.

Menghadapi situasi pada waktu itu, yaitu berhubungan dengan konsolidasi RI, masalah pelucutan tentara Jepang serta rencana kedatangan Sekutu, maka Komite Aksi menyusun manifesto yang antara lain berisi :

1. Negara RI sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, karenanya rakyat sekarang sudah merdeka, bebas dari pemerintah asing;
   Seluruh kekuasaan harus ditempatkan dalam tangan pemerintah/negara rakyat Indonesia sendiri;

2. Jepang telah dikalahkan, dan karena itu tidak berhak lagi menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia;
   Rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang;
3. Semua perusahaan (kantor-kantor, pabrik-pabrik, pertambangan dan perkebunan) harus diambil alih dari Jepang oleh rakyat Indonesia.

Dalam bulan September 1945 Komite Aksi telah melakukan pengambilalihan berbagai perusahaan kereta api dan trem. Ini diikuti oleh pengambilalihan perusahaan lain. Semua berjalan secara tertib tanpa melibatkan pimpinan tertinggi pemerintah Jepang. Sementara itu di Surabaya pada tanggal 11 September 1945 terjadi demonstrasi mendukung proklamasi kemerdekaan RI.

Sejalan dengan makin menggeloranya api kemerdekaan pada sebagian besar pemuda Indonesia, pada tanggal 20 September 1945 di Jakarta dilangsungkan konferensi antara pemuda-pemuda, pegawai, polisi, BKR dan Barisan Pelopor dari seluruh Jawa. Konferensi tersebut antara lain menegaskan bahwa pemasangan bendera merah putih makin diperhebat. Di Yogyakarta para pemuda pelajar tidak mau tinggal diam. Hebatnya gelora api revolusi yang mengalir dalam diri pemuda waktu itu sulit dibendung. Sangkur dan mitrliyur Jepang tidak mampu meredam bara api kemerdekaan pada diri pemuda Indonesia yang telah berkobar-kobar. Gedung-gedung baik pemerintah maupun swasta, kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, toko-toko serta bangunan lain menjadi sasaran gerakan pengibaran bendera ini.

Berkaitan dengan gerakan tersebut di Yogyakarta terjadi peristiwa heroik yang luar biasa. Di mana massa rakyat yang didukung oleh ribuan pemuda membanjiri gedung Cokan Kantai (Gedung Agung) untuk mengibarkan bendera Merah Putih walaupun harus menghadapi sangkur dan mitraliur Jepang. Tetapi akhirnya insiden ini berjalan tanpa pertumpahan darah dan Merah Putih berhasil berkibar di atas gedung tersebut menggantikan bendera Hinomaru Jepang. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 September 1945.

r. Insiden Bendera Tunjungan

Hari-hari setelah penyerahan, tentara Jepang dalam keadaan lesu. Penjagaan interniran kurang diperhatikan, sehingga tanpa menanti pelepasan mereka oleh Sekutu, banyak interniran yang telah berhasil kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka menemukan rumahnya masih utuh, tetapi harta bendanya telah habis, mungkin dirampok Jepang, dibeli orang Cina atau diambil oleh orang-orang Indonesia sendiri. Meski demikian tidak pernah terjadi perkosaan atas diri orang-orang bekas interniran, bahkan kerap kali orang-orang Indonesia menolong mereka. Tetapi perkembangan selanjutnya diikuti oleh ketegangan, karena orang-orang bekas interniran itu menuntut kembali barang-barang mereka. Sebaliknya kedatangan Sekutu menimbulkan rasa takut di kalangan rakyat Indonesia. Mereka memandang orang Belanda tidak lagi sebagai bekas interniran, melainkan sebagai alat untuk menegakkan

kembali penjajahan Belanda. Tetapi permusuhan dimulai tidak karena soal kekayaan, melainkan oleh persoalan simbol-simbol kekuasaan, terutama soal pengibaran bendera.

Permusuhan terbuka meledak pertama kali di Surabaya pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato (Hotel Oranye dulu, atau Simpang sekarang) di Tunjungan. Sejumlah bekas interniran mengibarkan Triwarna di muka hotel tersebut. Pemuda-pemuda tidak dapat mentolerir pengibaran bendera itu. Tanpa memperdulikan penjagaan Kempetai, seorang pemuda dengan tangkas memanjat tiang bendera, menyobek bagian bendera itu yang berwarna biru, sehingga tinggallah bendera itu berwarna merah putih. Kemudian peristiwa ini diikuti oleh perkelahian massal antara orang-orang (pemuda) Belanda dan Indo melawan pemuda-pemuda Indonesia yang menjadi biang keladi perkelahian itu, Kapten Poegman, tewas. Pada tanggal 20 September 1945, sesudah rapat umum di Tambaksari, para pemuda bersama rakyat mengadakan pawai kemerdekaan berkeliling. Tanpa memperdulikan larangan Jepang pemuda-pemuda itu membawa bambu runcing. Mulai saat itu bambu runcing dibawa oleh setiap laki-laki yang masih kuat.

s. Pembentukan TKR

Pertama dibentuk, suatu badan yang bertugas menjaga keamanan negara adalah BKR (Badan Keamanan Rakyat) dibawah pimpinan Kasman Singadimeja, pada tanggal 22 Agustus 1945. BKR tersebut bukanlah tentara. Hal itu untuk memberi kesan bahwa bangsa Indonesia tidak meninggikan permusuhan dengan bangsa lain yang waktu itu masih berada di Indonesia (pendudukan Jepang). BKR beranggotakan personil-personil bekas PETA dan HEIHO. Senjata yang disandang anggota BKR hanya sedikit, sebagian besar bersenjata tajam. Persenjataan menjadi bertambah banyak jumlahnya karena terjadinya aksi pelucutan senjata Jepang.

Dengan datangnya tentara Sekutu pada bulan September 1945, eksistensi BKR sulit dipertahankan. Karena kedudukannya yang otonom di bawah KNI (Komite Nasional Indonesia) maka pemerintah sulit mengontrol kekuatannya. Disamping itu ketika terjadi pelucutan senjata Jepang banyak senjata yang jatuh ke tangan pemuda yang bukan BKR, sehingga sangat menyulitkan pengawasan pemerintah. Oleh karena itu maka pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat yang berbunyi, "Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakanlah satu Tentara Keamanan Rakyat". Maklumat tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Sekarang jelas bahwa lembaga ini menjadi tentara yang dibawahkan oleh pemerintah pusat. BKR yang didalamnya terdapat BKR Darat, BKR Laut, BKR Udara kemudian terintegrasi menjadi TKR Darat, TKR Laut dan TKR Udara.

Dalam sidangnya tanggal 15 Oktober 1945 di Jakarta kabinet memutuskan bahwa markas besar umum (MBU) TKR berkedudukan di Yogyakarta. Dan sekaligus menunjuk bekas Mayor KNIL Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Perang

yang bertugas menyusun TKR dan perkembangannya. Semula MBU TKR bertempat di Grand Hotel (sekarang Hotel Garuda), kemudian dipindahkan ke Gedung yang terletak di Jl. Jenderal Soedirman Yogyakarta (sekarang Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama).

Sedang Menteri Keamanan Rakyat waktu itu ditunjuk Moh. Sulyoadikusumo. Dan pemimpin tertinggi TKR ditentukan tanggal 20 Oktober 1945 yaitu Soepriyadi seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar Januari 1945. Karena sejak tanggal tersebut sampai sekarang Soepriyadi belum diketahui jejaknya, MBU TKR berada di tangan Letjen Oerip Soemoharjo.

Pada tanggal 30 Oktober 1945 MBU TKR Yogyakarta juga mengeluarkan pengumuman tentang pengangkatan Anggota Agung Markas Tertinggi bagian MBU TKR yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Susuhunan Paku Buwono XII, Sri Mangkunegara dan Sri Paku Alam VIII. Selain itu diangkat pula sebagai opsir penghubung yaitu Gusti Pangeran Haryo (GPH) Sulyohamijoyo untuk divisi istimewa Surakarta dan Bendara Pangeran Haryo (BPH) Bintoro untuk divisi istimewa Yogyakarta.

Tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR yang dihadiri oleh para panglima dan komandan divisi se Jawa dan Sumatra di MBU TKR. Hasil konferensi antara lain memutuskan mengangkat Pangsar Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar.

Untuk selanjutnya TKR dirubah menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada tanggal 25 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 4/SD. Dan kemudian pada tanggal 3 Juni 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 24 tahun 1947 berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Segenap anggota angkatan perang yang ada dan segenap anggota laskar yang bersenjata dimasukkan secara serentak ke dalam TNI.

t. Kongres Pemuda Indonesia 1945 Di Yogyakarta

Dalam rangka berpartisipasi dalam pembelaan negara banyak diantara para pemuda menggabungkan diri dalam BKR. Banyak juga dengan maksud yang sama masuk dalam badan-badan kelaskaran. Pada tanggal 25 Oktober 1945 di Yogyakarta diadakan rapat yang dihadiri oleh para pemuda. Rapat tersebut berhasil membentuk suatu badan yang bernama Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GERPRI). Untuk selanjutnya GERPRI yang telah terbentuk tersebut mengadakan rapat yang bertempat di Balai Mataram Yogyakarta (sekarang Senisono) untuk membahas pelaksanaan Kongres Pemuda Seluruh Indonesia. Dalam rapat tersebut berhasil dibentuk panitia kehormatan yang terdiri dari Sri Sultan HB IX, Sri Paku Alam VII dan Mohammad Saleh. Sebagai ketua Bendoro Raden Mas (BRM) Hertog dan wakilnya S. Hudoro.

Pada tanggal 31 Oktober 1945 diadakanlah kongres yang dihadiri oleh para utusan dari Markas Besar Barisan Pelopor Jakarta, API (Angkatan Pemuda Indonesia) Jakarta, PRI (Pemuda Republik Indonesia) Bandung dan Surabaya, IPI (Ikatan Pelajar Indonesia) Jakarta, GERPRI Yogyakarta dan Staf Wartawan Kementrian Penerangan. Kongres ini

dimaksudkan untuk memantapkan kongres yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1945.

Pada tanggal 10 s.d. 11 Nopember 1945, badan-badan perjuangan yang dibentuk di luar BKR mengadakan Kongres Pemuda Indonesia di Balai Mataram Yogyakarta. Pembukaan kongres dilakukan di Alun-alun Utara Yogyakarta pada tanggal 10 Nopember 1945. Kongres dipimpin oleh Chaerul Saleh dan dihadiri oleh 332 orang utusan dari 30 organisasi pemuda di Indonesia. Dalam kongres tersebut berkenan memberikan amanat antara lain Presiden Soekarno, Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII. Hadir dalam kongres Drs. M. Hatta, menteri negara dan wartawan asing. Ketika kongres berlangsung peserta dari Surabaya meninggalkan kongres karena bertepatan dengan Pertempuran Surabaya melawan Sekutu. Hasil dari kongres tersebut adalah diadakan penggabungan semua gerakan pemuda dalam satu badan yang dinamakan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI), yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Republik Indonesia dibantu Dewan Pekerja Perjuangan dan Dewan Pekerja Pembangunan.

Semula kongres tersebut bertujuan untuk mempersatukan lebih dari 20 perkumpulan pemuda dalam satu wadah yang bercorak nasional, namun tidak berhasil. Peleburan ke dalam satu perkumpulan tersebut hanya disetujui oleh 7 organisasi yang membentuk Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) pada kongres tersebut.

Sebagai realisasi dari hasil kongres tersebut maka pada tanggal 24 – 25 November 1945 di Yogyakarta dibentuk Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Indonesia Yogyakarta yang diketuai BRM. Hertog dan wakilnya Darwis Tamim.

u. Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan perlu dibentuk lembaga pemerintahan yang layak. Untuk itu perlu dibentuk UUD sebagai pedoman dasar melaksanakan penyelenggaraan negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, UUD yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan disertai penjelasan telah terbentuk. Hari itu juga dipilih presiden dan wakil presiden. Atas usul Otto Iskandar Dinata secara aklamasi PPKI menyetujui pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang lagi. Kali ini memutuskan pembagian wilayah RI menjadi propinsi di seluruh bekas koloni India-Belanda. Jadi tidak termasuk Malaka, Kalimantan Utara, Timor Portugis (seperti yang diputuskan BPUPKI). Ini dengan latar belakang kemudahan dalam memperoleh dukungan internasional dan supaya tidak dicap sebagai penjajah.

Susunan kementrian diserahkan sebuah panitia kecil yang terdiri dari Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo. Jumlah kementrian yang berhasil dibentuk berjumlah 12 kementrian. Karena ada larangan Jepang untuk mengadakan perubahan status, maka kementrian itu baru dilantik tanggal 31 Agustus 1945.

Selanjutnya tanggal 22 Agustus 1945 dipersiapkan pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia). Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta kemudian merekrut 135 orang untuk duduk dalam KNI. Anggota KNI ini kemudian dilantik tanggal 29 Agustus 1945. Sebagai ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimejo.

Anggota KNI setelah dilantik, pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945 mengadakan sidang pleno yang pertama. Sidang tersebut bertempat di Balai Muslimin Jakarta. Dalam sidang itulah kemudian muncul Maklumat Negara Republik Indonesia No. X berisi antara lain : bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk maka KNI diserahi tugas kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Serta pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada KNP.

Berdasarkan maklumat tersebut maka sejak tanggal 16 Oktober 1945 KNIP merupakan sebuah parlemen sementara. Namun karena keadaan genting maka menyerahkan pekerjaannya kepada sebuah Dewan Pekerja yang diketuai oleh Sutan Sjahrir.

v. Peristiwa Bandung Lautan Api Oktober 1945

Pada waktu tentara Sekutu memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945, para pemuda dan pejuang sedang dalam pergulatan untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata serta peralatan dari tangan tentara Jepang. Tentara Sekutu menuntut supaya senjata-senjata yang diperoleh dari pelucutan tentara Jepang dan berada di tangan para pemuda diserahkan kepada Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan untuk menjaga keamanan. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh para pejuang, sehingga sejak saat itu sering terjadi insiden dengan pasukan Sekutu. Batas kota bagian utara dan bagian selatan adalah rel kereta api yang melintasi kota Bandung.

Untuk kedua kalinya tanggal 23 Maret 1946 tentara Sekutu mengeluarkan ulimtatum, kali ini supaya TRI mengosongkan seluruh kota Bandung. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung, tetapi sementara itu dari markas TRI di Yogyakarta datang instruksi lain, yaitu supaya kota Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya TRI di Bandung mematuhi perintah dari Jakarta walaupun dengan berat hati. Sebelum meninggalkan Kota Bandung, pejuang RI melancarkan serangan umum ke arah kedudukan-kedudukan Sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung Selatan. Kota Bandung sebelah selatan pada tanggal 23 Maret 1946 dibakar dan menjadi lautan api, sebelum TRI meninggalkannya.

Selain di Kota Bandung, di Jawa Barat pertempuran-pertempuran dengan Sekutu dan NICA meletus dimana-mana. Di Sukabumi terjadi serangkaian pertempuran yang

dimulai pada bulan Desember 1945 dan berjalan sampai bulan Maret 1946 yang dikenal sebagai "Peristiwa Bojongkokosan". Pertempuran lain terjadi di Gunung Masigit (Pertempuran Cimareme), Balaindah, Dayeuhkolot, Cijoho, Gekbrong, Cileungsir, dan sebagainya.

w. Perpindahan Ibukota RI ke Yogyakarta

Tanggal 29 September 1945 pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI (*Allied Forces for Netherlands East Indies*) dipimpin Letjen Phillip Christison mendarat di Jakarta. Mereka bertugas melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke daerah asalnya, mengevakuasi APWI (*Allied Prisoneer War and Interneer*) yaitu tawanan Jepang dan Belanda, mengambil alih daerah pendudukan Jepang, dan menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemerintahan sipil berfungsi kembali. Sebelumnya, tanggal 20 Oktober 1945 juga didaratkan tentara Sekutu di Semarang dibawah pimpinan Jenderal Bethel yang kemudian menuju Ambarawa dan tanggal 26 Oktober 1945 sampai di Semarang. Semula sambutan rakyat sungguh baik karena pasukan ini disangka hanya akan mengurus tawanan perang dan Jepang.

Namun kemudian konflik terjadi karena tentara Sekutu yang didalamnya terdapat NICA (*Netherlands Indie Civil Administration*) Belanda melepaskan secara sepihak tawanan Belanda. Ditambah dengan adanya provokasi yang dilakukan Tentara NICA Belanda semakin merajalela. Penculikan, pembunuhan dan penangkapan para pemuda pejuang makin sering terjadi di kota-kota besar. Sementera itu keadaan kota Jakarta makin tidak aman. Pembunuhan dan penculikan oleh tentara NICA sering terjadi tiap hari. Adanya usaha pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir tanggal 26 Desember 1945, juga terhadap Amir Sjarifudin tanggal 28 Desember 1945 dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa keadaan di Jakarta kurang menjamin keselamatan para pemimpin negara. Ditambah lagi dengan adanya pendaratan pasukan marinir Belanda yang mendarat di Tanjung Priuk tanggal 30 Desember 1945. Oleh karena itu dalam sidangnya tanggal 3 Januari 1946, kabinet memutuskan untuk memindahkan untuk sementara ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemilihan Yogyakarta sebagai ibukota RI didasari dengan berbagai pertimbangan antara lain :

1. Sikap tegas Sri Sultan HB IX sebagai orang nomor satu di Yogyakarta dalam mendukung berdirinya negara Republik Indonesia.
2. Ketika itu, di Yogyakarta Jiwa kemerdekaan rakyat sedang memuncak.

Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan para pemimpin negara lainnya hijrah ke Yogyakarta dengan menggunakan Kereta Api. Kemudian diikuti oleh pindahnya instansi-instasi dan jawatan pemerintah yang lain. Ketika itu Sutan Sjahrir masih tetap di Jakarta. Hal itu untuk mempermudah jika sewaktu-waktu terjadi perundingan dengan Belanda. Pada tanggal 4 Januari 1946, di Stasiun Tugu Yogyakarta banyak orang menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden beserta para ibu. Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII segera masuk gerbong dan menyambut kedua pemimpin negara terebut. Selanjutnya para pemimpin negara

diantar dengan mobil. Presiden Soekarno satu mobil dengan Sri Sultan HB IX. Wakil Presiden M. Hatta satu mobil dengan Sri Paku Alam VIII. Sedangkan Ibu Fatmawati Soekarno dan Ibu Rahmi Mohammad Hatta satu mobil. Rombongan segera menuju ke Gedung Negara.

Sejak saat itu (4 Januari 1946) Yogyakarta menjadi ibukota RI. Sebagai rumah dinas, Presiden Soekarno menempati Gedung Agung. Sedang Wakil Presiden Mohammad Hatta menempati Gedung di Jl. Reksobayan 4 Yogyakarta (sekarang Makorem 072 Pamungkas Yogyakarta).

x. Perang Puputan di Bali 20 November 1946

Sejak pendaratan NICA di Bali, Bali selalu menjadi arena pertempuran. Sama seperti di daerah lain, pasukan RI di Bali juga menjalankan perang gerilya. Markas Besar Operasi (MBO) sebagai induk pasukan selalu berpindah-pindah. Untuk memperkuat pertahanan di Bali, didatangkan bantuan ALRI dari Jawa yang kemudian menggabungkan diri ke dalam pasukan yang ada di Bali. Karena seringnya terjadi pertempuran, pihak Belanda pernah mengirim surat kepada I Gusti Ngurah Rai untuk mengadakan perundingan. Akan tetapi, pejuang Bali itu tidak bersedia, bahkan terus memperkuat pertahanan dengan mengikutsertakan seluruh rakyat.

Sesuai dengan hasil pertemuan para pucuk pimpinan perjuangan di Bali yang diadakan di desa Bongkasa, Badung, maka diutuslah I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Putu Wisnu, Cokorda Ngurah, I Wayan Ledang ke Jawa untuk melaporkan situasi di Bali dan meminta bantuan senjata serta tambahan pasukan untuk memperkuat pertahanan perjuangan di Bali. Bapak Wijekesuma, Ida Bagus Tantra, Bapak Debes ditugaskan mengadakan konsolidasi perjuangan di Bali sambil menunggu kedatangan rombogan I Gusti Ngurah Rai dari Jawa.

Pada permulaan bulan Maret 1946, bantuan dari Jawa mulai berdatangan dan disiapkan di Banyuwangi, dibawah pimpinan Kapten Markadi. Pasukan yang diberangkatkan ke Bali adalah pasukan Waroka, pasukan I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Markadi. Pasukan Waroka mendarat di pantai Celukan Bawang, pasukan I Gusti Ngurah Rai mendarat di Yeh Kuning dan Pulukan.

I Gusti Ngurah Rai bersama rombongan berangkat dengan membawa pasukan sebanyak 45 orang. Mereka berangkat dari Muncar, sebuah desa nelayan, yang terkenal di daerah Banyuwangi. Dengan menggunakan beberapa perahu nelayan, rombongan berangkat pada waktu malam hari pada tanggal 4 April 1946. Pelayaran dilakukan dengan menyusur pantai Banyuwangi ke arah utara, kemudian memotong Selat Bali pada daerah yang paling sempit, yaitu di derah Ketapang. Pada waktu lewat tengah malam, sekitar jam 02.00 malam, rombongan mendapat serangan dari patroli Belanda yang menggunakan motor boat. Terjadilah pertempuran laut yang seru. Dalam pertempuran laut ini Cokorda Darmaputera dan agen Polisi II Cokorda Ngurah Gambir gugur. Dari anggota ALRI gugur pula Sumeh Darsono. Sedangkan Cokorda Oka, tertawan. Dalam peristiwa ini sebuah boat Belanda berhasil ditenggelamkan.

Rombongan Ngurah Rai terpecah menjadi dua bagian. Sebagian rombongan pada malam itu juga berhasil mendarat di pantai Yeh Kuning, daerah Pulukan, dipimpin oleh Bonjoran Bayupathi ke Muncar. Penyeberangan diulangi kembali pada malam itu juga. Rombogan Ngurah Rai dengan selamat sampai di pantai Yeh Kuning pada waktu pagi hari tanggal 5 April 1946 dan terus melanjutkan perjalanan menuju ke desa Pulukan untuk menantikan hari malam. Seluruh rombongan Ngurah Rai bergabung di Pulukan dan pada malam harinya mereka berangkat menuju ke Munduk Malang, sebuah daerah di Tabanan bagian Barat Laut.

Untuk memudahkan kontak dengan Jawa, I Gusti Ngurah Rai menjalankan strategi pengalihan perhatian Belanda dari barat ke bagian timur Bali. Mengikuti strateginya ini pada 28 Mei 1946 I Gusti Ngurah Rai mengerahkan pasukannya menuju ke timur yaitu dari Munduk Malang ke daerah Karangasem yang terkenal dengan "Perjalanan Juni-Juli" atau Long March. Selama Long March pasukan I Gusti Ngurah Rai sering dihadang oleh tentara Belanda. Pada tanggal 5 Juli 1946 pasukan I Gusti Ngurah Rai tiba di Tanah Aron. Dipilihnya Tanah Aron sebagai markas, karena dusun tersebut terletak di lereng Gunung Agung yang merupakan tanah perbukitan yang kering dan tandus, ditumbuhi beberapa macam pepohonan seperti "belu" dan jambu klutuk. Di sebelah Timur dikelilingi jurang, di sebelah selatan merupakan daerah yang lebih rendah, terletak bukit Pawon. Setelah dua hari, ada laporan bahwa Belanda mulai menempatkan pasukannya di Desa Ababi, Pipid, Abang, dan Culik. Oleh karena itu, I Gusti Ngurah Rai dengan beberapa stafnya mengadakan perundingan tentang pengaturan posisi pertahanan. Pada tanggal 7 Juli 1946 kurang lebih pukul 07.00 I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk mengatur posisi yang telah ditentukan. Setengah jam kemudian dari arah Barat datanglah iring-iringan pasukan Belanda dengan kekuatan 200 orang.

Pada pukul 09.00 pagi terdengar tembakan dari arah bukit Pawon, dimana pada posisi tersebut berkedudukan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Markadi. Tak lama berselang dari arah utara (atas) terdengar tembakan dari pasukan Tabanan yang dipimpin Kapten Wijana. Pasukan Belanda bergerak mundur dan turun pada posisi yang menguntungkan pasukan Republik. Dengan dibatasi sebuah jurang dan jarak sekitar 250 meter, pasukan induk dengan jelas dapat melihat pasukan Belanda. Sebaliknya Belanda tidak menduga dihadapannya telah siap pasukan I Gusti Ngurah Rai. Letnan Dhiasa memerintahkan penembakan dengan senjata kaliber 12,7 mm. Terjadilah kontak senjata hingga pukul 15.00 . Dalam pertempuran itu 82 orang serdadu NICA berhasil dibinasakan, sedangkan di pihak I Gusti Ngurah Rai semuanya selamat. Setelah pertempuran itu pasukan I Gusti Ngurah Rai kembali menuju arah barat yang kemudian sampai di Desa Marga (Tabanan).

Pada waktu staf MBO (Markas Besar Operasi) berada di Marga, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi NICA yang ada di kota Tabanan. Perintah itu dilaksanakan pada 18 November 1946 (malam hari) dan berhasil baik. Beberapa pucuk senjata beserta pelurunya dapat direbut dan seorang komandan polisi NICA ikut menggabungkan diri kepada pasukan Ngurah Rai. Setelah itu pasukan segera kembali ke Desa Marga.

Keesokan harinya, tanggal 19 Nopember 1946 pasukan beristirahat di desa Ole dekat Marga kurang lebih 10 km di sebelah utara kota Tabanan. Dalam keadaan beristirahat itu Letkol I Gusti Ngurah Rai, Kapten I Gusti Wayan Debes, Mayor I Gusti Putu Wisnu dan Kapten Sugianyar serta Wagimin mengadakan musyawarah untuk mengatur taktik perlawanan dalam menghadapi NICA/Belanda. Pasukan Ciung Wanara sebagai induk pasukan di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai, yang telah mendapatkan tambahan personel dan persenjataan, menyiapkan pertahanan di sela-sela tanaman jagung di persawahan Uma Kaang.

Pada tanggal 20 Nopember 1946, pagi-pagi benar sekitar pukul 06.00 pasukan menerima laporan dari penghubung laskar rakyat bahwa di sebelah utara dan selatan desa Marga telah terlihat pasukan Belanda dengan persenjataan lengkap. Kemudian I Gusti Ngurah Rai memerintahkan untuk mengadakan penyelidikan. Desa Marga ternyata telah terkepung rapat-rapat. Seluruh penduduk desa Marga baik tua-muda, laki-laki dan perempuan digiring ke pasar Marga yang kemudian disiksa dengan kejam tanpa mengenal peri kemanusiaan. Sekitar pukul 09.00 terdengar letusan pistol Letkol I Gusti Ngurah Rai sebagai tanda dimulainya penyerangan terhadap serdadu Belanda yang telah masuk pada sasaran tembak. Terjadilah baku tembak yang sangat seru. Banyak serdadu Belanda menjadi korban sehingga membangkitkan kegembiraan pasukan Republik dan keluar dari posisi pertahanannya untuk mengejar musuh.

Dalam keadan gawat I Gusti Ngurah Rai memerintahkan agar pasukan Ciung Wanara tetap tabah dan gigih melawan kavaleri Belanda yang didukung dengan serangan udara. Kapten Sugianyar selaku pimpinan pasukan Markas Besar Daerah Badung gugur terkena peluru Belanda. Mengetahui hal tersebut Letkol I Gusti Ngurah Rai merasa sangat sedih dan dengan kebulatan tekad untuk keteguhan hati pantang menyerah sampai titik darah penghabisan, akhirnya memberikan perintah "Puputan" kepada seluruh pasukannya. Di sinilah pasukan Ngurah Rai mengadakan "Puputan" sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk I Gusti Ngurah Rai sendiri sebagai kusuma bangsa. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa.

y. Berdirinya Universitas Gajah Mada 19 Desember 1949

Sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, maka di Yogyakarta, Solo dan Klaten banyak didirikan lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah. Lembaga pendidikan itu adalah Sekolah Tinggi Teknik yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1946 di Yogyakarta. "Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Klinis pada tanggal 4 Maret 1946 di Solo. Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Pra-Klinis di Klaten pada tanggal 5 Maret 1946. Fakultas Farmasi dan Fakultas Pertanian pada tanggal 27 September 1946 di Klaten. Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran Hewan pada awal tahun 1948 di Klaten. Akademi Ilmu Politik pada awal tahun 1948 di Yogyakarta. Balai Pendidikan Ahli Hukum pada tanggal 1 November 1948 di Solo. Sebelumnya, yaitu pada tanggal 24 Januari 1946, Mr. Budiarto, Ir. Warsito, Mr. Soenarjo dan Dr. Prijono bertemu untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi swasta. Rencana mereka mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kemudian pada tanggal 3 Maret 1946 diresmikanlah Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Yogyakarta yang hanya mempunyai Bagian Hukum dan Bagian Sastra. Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat sebagai Ketua Dewan Kurator dan Ki Hadjar Dewantara sebagai wakil.

Pada tanggal 20 Mei 1946 dibentuklah sebuah komite antar kementrian yang akan membahas masalah pendidikan tinggi di Indonesia. Komite itu memutuskan untuk menggabungkan semua lembaga pendidikan yang ada di Yogyakarta, Solo dan Klaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tanggal 16 Desember 1949 tentang Peraturan Sementara Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit maka perguruan tinggi yang ada di tiga kota tersebut digabungkan menjadi Universiteit Negeri Gadjah Mada yang berkedudukan di Yogyakarta. Universitas tersebut terdiri dari:

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Sosial dan Politik
3. Fakultas Teknik
4. Fakultas Kedokteran
5. Fakultas Kedoteran Gigi dan Farmasi
6. Fakultas Sastra dan Filsafat
7. Fakultas Pertanian
8. Fakultas lain menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan memperhatikan pertimbangan Senat "Universiteit Negeri Gadjah Mada.

Pada tanggal 19 Desember 1949, di Sitihinggil Kraton Yogyakarta diresmikian Universiteit Negeri Gadjah Mada. Prof. Dr. A. Sardjito ditetapkan sebagai Presiden Universiteit yang pertama. Pada hari itu juga ditetapkan senat Universiteit Negeri Gadjah Mada sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Sardjito
Sekretaris : Prof. Mr. Drs. Notonagoro
Anggota : Prof. Ir. Wreksodiningrat, Prof. Mr. Djokosoetono, Prof. Dr. Prijono, Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking, Prof. Ir. H. Johannes, Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, Prof. Dr. Soetopo, Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. Aboetari, Prof. Drs. Soeparwi

Sedangkan universitas yang baru ini, susunan dewan kurator adalah sebagai berikut :

Ketua Kehormatan	:	Sri Sultan HB IX
Ketua	:	Sri Paku Alam VIII
Wakil	:	Soetardjohadikoesoemo
Anggota	:	Dr. Kodijat, Ki Hadjar Dewantara, Prof. Ir. Wreksodiningrat, Mr. Hadi Ir. Goenoeng Iskandar, Mr. S. Poerwokoesoemo, Samadikoen, Moestadjab

Berdasarkan PP No 37 tanggal 14 Agustus 1950 universitas ini mempunyai Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas Sastra, Fakultas Paedagogik, Fakultas Filsafat dimulai tahun 1951. Pada tahun 1954 nama Universiteit Negeri Gadjah Mada diganti menjadi Universitas Gadjah Mada. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang memutuskan untuk menggunakan istilah universitas dan fakultas untuk seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

z. Politik Diplomasi 1948

Dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekan dilakukan dengan dua macam cara yaitu dengan perjuangan bersenjata dan perjuangan dimeja perundingan (diplomasi). Perjuangan dengan menggunakan senjata dilakukan oleh para pejuang dimedan pertempuran dengan cara melakukan perlawanan secara bergerilya. Sedangkan perjuangan dengan cara diplomasi dilakukan oleh para pejuang diplomat di meja perundingan. Dengan perjuangan diplomasi ini keberadaan Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Sedangkan perjuangan bersenjata biasanya terjadi setelah perjuangan diplomasi mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya disebabkan oleh Belanda yang selalu menafsirkan secara sepihak hasil perundingan. Beberpa perundingan yang telah ditempuh oleh RI dan Belanda untuk menyelesaikan permasalahannya antara lain : Perundingan pertama RI – Belanda dengan penengah dari Inggris mula-mula Sir Archibald Clark Kerr kemudian diganti Lord Killearn. Perundingan dimulai tanggal 10 Februari 1946. Setelah diadakan penjajagan maka segera digelar perundingan secara resmi yang bertempat di Hooge Veluwe yang berlansung tanggal 14 – 25 April 1946.

Perundingan gencatan senjata RI, Sekutu dan Belanda akhirnya diselenggarakan di Jakarta tanggal 20 September 1946. Indonesia diwakili oleh Jenderal Mayor Soedibjo, Komodor Udara Suryadi Suryadarma (utusan Pulau Jawa, Kolonel Simbolon, dan Letkol Abdullah Kartawirana (utusan Sumatra). Dari pihak Sekutu hadir Mayor Jenderal JFR. Forman dan Brigadir Jenderal IDA. Lauder. Belanda diwakili oleh Mayor Jenderal DH Buurman van Vreeden. Perundingan gencatan senjata tersebut berlangsung hingga tanggal 30 September 1946, meski tidak menghasilkan apa-apa.

Selanjutnya Lord Killearn berhasil membawa wakil-wakil RI dan Belanda ke meja perundingan yang berlangsung di kediaman konsul jenderal Inggris di Jakarta pada

tanggal 7 Oktober 1946. Delegasi RI diketuai oleh PM Sutan Sjahrir, sementara Belanda diwakili oleh suatu komisi yang dikirim oleh Belanda yang diketuai Prof. Schermerhorn. Untuk selanjutnya sebagai kelanjutan dari perundingan-perundingan selanjutnya sejak tanggal 10 November 1946 di Linggajati, dekat Cirebon, dilangsungkan perundingan antara RI dengan komisi umum Belanda. Perundingan itu dipimpin oleh Lord Killearn. Tanggal 15 November 1946 hasil persetujuan diparaf oleh kedua belah pihak, dan kemudian baru tanggal 25 Maret 1947 naskah tersebut ditandatangani.

Namun semua hasil perundingan tersebut dilanggar oleh Belanda yang dengan sepihak menafsirkan hasil-hasil perundingan menurut versinya, sehingga meletuslah Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947. Agresi ini menimbulkan protes keras sehingga atas inisiatif India dan Australia, permasalahan RI dan Belanda berhasil dibahas di PBB. Hasil dari pembicaraan PBB maka perlu dibentuk komisi jasa baik untuk mengawasi gencatan senjata RI – Belanda. Komisi itu kemudian terkenal dengan "Komisi Tiga Negara" /KTN. Dalam sidang kabinet RI tanggal 6 September 1947 RI meminta Australia menjadi anggota KTN, sementara Belanda memilih Belgia. Sedangkan Australia dan Belgia memilik Amerika Serikat. Tiga negara tersebut masing-masing diwakili oleh Paul van Zeeland (Belgia), Richard Kirby (Australia), dan Dr. Frank Graham (Amerika Serikat). Mereka tanggal 27 Oktober 1947 tiba di Jakarta.

Dalam pertemuannya di Sidney, pada tanggal 20 Oktober 1947 KTN memutuskan bahwa tugas mereka di Indonesia adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda secara damai. Atas usul KTN perundingan dilakukan diatas sebuah kapal pengangkut pasukan AL Amerika Serikat "USS Renville". Akhirnya perundingan dimulai tanggal 8 Desember 1947 di atas Kapal Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi RI dipimpin Mr. Amir Syarifudin, dan Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo. Selama perundingan berlangsung untuk membicarakan masalah daerah kekuasaan RI, pada tanggal 13 Januari 1948 di Kaliurang diadakan perundingan antara KTN dengan RI.

Meskipun sudah tercapai persetujuan di atas Kapal Renville, tembak menembak belum juga berhenti. Tanggal 9 Januari 1948 Belanda mengajukan ultimatum kepada RI untuk mengosongkan sejumlah daerah yang luas dan menarik TNI dari daerah-daerah gerilya di Yogyakarta. Dalam suasana seperti itu akhirnya perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak menembak pada tanggal 19 Januari 1948. Persetujuan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerintah RI sehingga mengakibatkan Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh.

Ketika perundingan sedang berlangsung Belanda menyiapkan pasukannya, kemudian berusaha menafsirkan hasil perundingan secara sepihak. Kerena itulah maka kembali Belanda melanggar perjajian Renville dengan mengadakan Agresi Militer Belanda II. Akibatnya kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dan para pemimpin RI ditawan. Namun demikian pemerintahan tetap berjalan dengan *exile gouvernment* di Sumatra

dengan PDRI dibawah Mr. Sjafruddin Prawira Negara. Dengan begitu Belanda menyiarkan kabar bohong bahwa RI sudah hancur bersama TNI. Keadaan ini diketahui oleh Sri Sultan HB IX. Atas idenya maka dilaksanakanlah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Serangan tersebut berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Berkat siaran radio PC 2 informasi ini sampai ke meja DK PBB di New York. Ini menunjukkan bahwa berita yang disampaikan Belanda adalah bohong, dan Belanda menjadi terpojok dalam percaturan internasional dan bersedia mengadakan perundingan dengan RI yang sempat macet beberapa waktu. Maka dibukalah perundingan Roem Royen dengan hasil terpenting yaitu pemerintah RI dikembalikan di Yogyakarta, pemimpin RI yang ditawan 19 Desember 1948 dikembalikan, dan RI siap menghadapi KMB.

Setelah semuanya siap maka KMB dilaksanakan di Den Haag sejak 23 Agustus – 2 November 1949. Hasil KMB Belanda mengakui kedaulatan RIS tanggal 27 Desember 1949

aa. Pengangkutan APWI 28 April 1946

Pada tanggal 29 September 1945 mulai didaratkan AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) dipimpin Letjen Phillip Christison mendarat di Jakarta. Bertugas untuk melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke daerah asalnya, mengevakuasi APWI (Allied Prisoneer War and Interneer) yaitu tawanan Jepang dan Belanda, mengambil alih daerah pendudukan Jepang, dan menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemerintahan sipil berfungsi kembali. Ketika itu tentara Sekutu hanya mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia. Sehingga aksi-aksi militer di daerah RI dengan dalih membebaskan APWI sering terjadi seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Magelang, Surabaya dan Malang. Aksi tersebut mendapat perlawanan keras dari para pejuang RI sehingga jatuh korban besar.

Setelah pertempuran antara RI dan Sekutu berakhir maka pada tanggal 1 dan 2 April 1946 diadakan perundingan tentang pemulangan tawanan perang Jepang selama Perang Dunia II yang akhirnya menghasilkan persetujuan yang dikenal dengan "The Yogya Agreement". Isi dari persetujuan tersebut bahwa pengangkutan dan pelucutan tentara Jepang yang ada di daerah pendudukan RI akan dilakukan oleh TRI. Sedangkan yang berada di daerah pendudukan Sekutu akan dilakukan oleh Sekutu. RI akan membantu segala akomodasi yang diperlukan. Pada tanggal 24 April 1946 mulai dilakukan pengangkutan bekas tawanan perang dan interneeran Sekutu (Allied Prisoneer of War and Interneer) APWI yang pertama kali yang ditawan Jepang selama Perang Dunia II dari daerah RI ke Jakarta. Dalam melaksanakan tugas APWI ini dibentuk suatu panita yaitu "Panitia Oentoek Pengembalian bangsa Djepang dan Asing" yang selanjutnya dikenal dengan POPDA di bawah pimpinan Jenderal Mayor Sudibyo dan Jenderal Mayor Adul Kadir. Untuk pelaksanaannya di setiap daerah dibentuk pos-pos penampungan sementara yang tugas dan pengawasannya dibebankan kepada komandan resimen setempat dibantu dari badan-badan perjuangan yang lain.

Memenuhi apa yang pernah dikemukakan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang disampaikan kepada Sekutu, maka pada tanggal 28 April 1946 dari Yogyakarta diberangkatkan kurang lebih 550 orang tawanan Belanda dan Jepang dengan menggunakan kereta api istimewa menuju Stasiun Manggarai Jakarta. Berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Tugas pengawalan ini dilaksanakan oleh Kompi Widodo.

Ini merupakan pengangkutan yang pertama dari Yogyakarta dan sekaligus menunjukkan itikad baik TRI dalam melakukan tugas internasional bahwa pengawalannya sampai ke Jakarta berjalan baik tanpa insiden apapun. Khusus pengangukutan dengan menggunakan pesawat terbang dilaksanakan di Lapangan Panasan Solo dengan pesawat Dakota milik Sekutu.

bb. Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947

Setelah melalui perdebatan sengit di dalam masyarakat dan dalam lingkungan KNIP akhirnya pada tanggal 25 Maret 1945 persetujuan Linggajati ditandangani di Istana Rijswijk, Istana Merdeka Jakarta. Ketua dan anggota Delegasi Indonesia terdiri dari Sutan Sjahrir, Mr. Moh. Roem, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, dan dr. A.K. Gani membubuhkan tanda tangan mereka dalam persetujuan tersebut. Sedangkan di pihak, Belanda, turut menandatangani Prof. Schermerhorn, Dr. Van Mook dan Van Poll.

Namun pada perkembangan selanjutnya, hasil perundingan tersebut diadakan penafsiran secara sepihak sehingga menimbulkan perselisihan diantara RI dan Belanda. Penafsiran Belanda tentang Persetujuan Linggajati tetap berpedoman pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang menyatakan bahwa Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth dan akan berbentuk federal, sedangkan hubungan luar negerinya akan diatur oleh Belanda. Belanda juga menuntut untuk segera diadakan gendarmerie bersama. Dengan ditambah oleh kesulitan ekonomi negaranya, maka Belanda ingin segera menyelesaikan masalah Indonesia ini dengan cepat.

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota yang berisi ultimatum yang harus dijawab oleh pemerintah RI dalam waktu 14 hari. Adapun nota tersebut berisi :

1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lebaga devisa bersama
3. RI harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah RI yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama)
5. Menyelenggarakan pemilikan bersama atas impor dan ekspor.

PM Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban itu mendatangkan reaksi keras dari kalangan partai politik dan berakibat jatuhnya kabinet Sjahrir. Kabinet penggantinya yaitu kabinet Amir Syarifudin memberikan jawaban yang pada hakekatnya sama.

Dalam notanya tertanggal 15 Juli 1947, Belanda tetap menuntut adanya gendar merie bersama dan minta agar RI menghentikan permusuhan terhadap Belanda. Nota tersebut kemudian disusul lagi dengan sebuah ultimatum bahwa dalam waktu 32 jam RI harus memberi jawaban terhadap tuntutan Belanda. Jawaban RI yang disampaikan oleh Amir Sjarifuddin tanggal 17 Juli 1947 lewat RRI Yogyakarta ditolak oleh Belanda. Kemudian tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan serentak terhadap daerah-daerah RI. Serangan militer ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda Pertama. Jawa digempur dengan pasukan bersenjata lengkap dan modern yang terdiri dari tiga divisi, sementara di Sumatra Belanda mengerahkan tiga brigade. Untuk menguasai Jawa Barat Belanda mengerahkan dua divisi, satu divisi diantaranya melanjutkan serangan ke Jawa Tengah, sedangkan di Jawa Timur didaratkan satu divisi.

Pasukan TNI yang terpencar pada pukulan pertama serangan Belanda itu berusaha mengkonsolidasikan diri dan membangun daerah pertahanan baru. Sistem Wehrkreise diterapkan untuk menggantikan sistem pertahan linear, yang ternyata tidak dapat menahan gempuran Belanda yang memiliki persenjataan dan alat perang yang lebih kuat. Akhirnya, kekuasaan dan gerakan Belanda berhasil dibatasi hanya di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar itu kekuasaan berada di tangan TNI. Di luar negeri, agresi Belanda ini mendatangkan reaksi keras. Wakil-wakil India dan Australia di PBB mengajukan usul agar soal Indonesia dibahas dalam DK PBB. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1947 PBB memerintahkan RI dan Belanda untuk mengadakan gencatan senjata. Dalam sidang tersebut RI mengutus Sutan Sjahrir dan Haji Agus Salim. Tanggal 4 Agustus 1947 RI dan Belanda mengumumkan penghentian tembak menembak. Dengan adanya pengumuman tersebut maka agresi militer Belanda I resmi berakhir.

cc. Kongres Kebudayaan di Magelang, Agustus 1948

Kehidupan kebudayaan di daerah RI mendapatkan perhatian khusus. Meski dalam suasana revolusi perhatian dalam masalah kebudayaan tetap tidak terabaikan. Berbagai perhimpunan seniman, lahir karena adanya revolusi. Bahkan karya-karya terbaik mereka dilahirkan karena inspirasi dari jalannya revolusi. Untuk mencatat dan menghimpun fikiran – fikiran dan aliran – aliran baru di lapangan kebudayaan, maka pada bulan Agustus dilangsungkan "Kongres Kebudayaan" yang pertama. Kongres dibuka pada tanggal 20 Agustus 1948 dan sebagai ketua kongres adalah Mr. Wongsonegoro. Dalam kongres tersebut berhasil diputuskan antara lain : lembaga kebudayaan Indonesia akan didirikan, guna memajukan Kebudayaan seluruh Indonesia.

dd. Pekan Olah Raga Nasional Indonesia I di Solo, September 1948

Pada bulan September 1948, ketika Pemerintah RI masih diguncang oleh berbagai tekanan baik dari dalam berupa Pemberontakan PKI Madiun, maupun dari luar terutama dari Belanda yang berusaha untuk menjajah lagi Indonesia, tetapi

penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional tetap mendapatkan prioritas. PON I ini berlangsung pada tanggal 9 s.d 12 September 1948 di Solo (Stadion Sriwedari). Tetapi upacara pembukaan PON I diadakan di Yogyakarta. Upacara dimulai dengan penyerahan bendera PON di Yogyakarta. Hadir dalam acara tersebut Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati Soekarno, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII, dan para pejabat setempat. Disamping itu hadir juga wakil-wakil KTN. Setelah acara pembukaan yang diselenggarakan di halaman istana negara Yogyakarta (Gedung Agung) selesai, pada tanggal 8 September 1948 dilanjutkan dengan gerak jalan masal dengan membawa bendera PON dari Yogyakarta menuju Solo melalui Jl. Tugu Kulon (sekarang Jl. P. Mangkubumi). Sebagai ketua penyelenggara dalam pelaksanaan PON tersebut adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sedangkan ketua pelaksana di Solo diserahkan kepada P. Soerjohamidjojo. Sesampainya di Solo kemudian bendera PON di kibarkan di Stadion Sriwedarai Solo. Acara tersebut dimeriahkan dengan senam masal yang dilakukan oleh ribuan siswa-siswa sekolah menengah di Solo. Cabang olah raga yang ditampilkan dan PON tersebut meliputi sepak bola, bola keranjang, bola basket, bulu tangkis, atletik, renang, tenis, panahan, pencak silat, dll.

PON I ditutup pada tanggal 12 September 1948. Upacara penutupan dilaksanakan di Stadion Sriwedari Solo. Hadir dalam upacara pentupan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman.

ee. Agresi Militer Belanda II

Kekacauan-kekacauan yang terjadi di dalam pemerintah Republik Indonesia yang diwarnai dengan pertentangan politik yang semakin tajam antara yang pro dan kontra terhadap persetujuan Renville, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang, Pembentukan Negara Indonesia Serikat, ditambah dengan terjadinya pemberontakan PKI Madiun dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusun kekuatan dalam usahanya ingin menjajah lagi Indonesia. Perundingan-perundingan antara RI dan Belanda yang dilakukan dibawah pengawasan KTN (Komisi Tiga Negara) selalu mengalami jalan buntu. Hal ini terjadi karena Belanda selalu mengajukan usul yang jelas tidak mungkin dapat diterima RI. Pada tanggal 11 Desember 1948 delegasi Belanda yang dipimpin oleh Abdul Kadir Wdjojoadmojo, menyatakan tidak dapat melanjutkan perundingan lagi, itu berarti bahwa persetujuan Renville yang telah ditandatangani tanggal 17 dan 19 Januari 1948 mengalami kegagalan.

Pada tanggal 17 Desember 1948 Belanda menyampaikan ultimatun melalui KTN yang meminta RI harus mengakui sepenuhnya kedaulatan Belanda, dan ikut serta dalam pemerintah yang dirancang oleh Belanda. Jawaban RI harus sudah diterima pada tanggal 18 Desember 1948 jam 10.00 WIB. Tetapi jawaban pemerintah pusat RI di Yogyakarta tidak dapat segera dirumuskan dan disampaikan. Hal itu mengingat batas waktu yang terlalu singkat, sehingga tidak sempat merundingkan dulu dengan BPKNIP dan partai-partai. Lagi pula waktu itu hubungan komunikasi Yogyakarta – Jakarta terputus.

Pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 Dr. Beel secara resmi melalui KTN menyampaikan pernyataan bahwa terhitung sejak tanggal 19 Desember 1948 mulai pukul 00.00 WIB Belanda tidak mengakui lagi *de facto* RI dan tidak terikat lagi dengan persetujuan Renville. Pada pukul 06.00 WIB Belanda telah mulai dengan serangannya atas kota Yogyakarta dan sekitarnya. Belanda menyerang lapangan terbang Maguwo dengan 5 buah pesawat pemburu dan disusul dengan 6 buah pesawat lainnya. Pasukan Belanda terus menduduki pos-pos penting di atas dan sekitar lapangan. Para anggota yang bertugas jaga lapangan terbang Maguwo (sekarang Adisucipto) pimpinan Perwira Kadet Udara Kasmiran mencoba melakukan perlawanan. Perlawanan yang dipimpin oleh Kadet Udara Kasmiran berkekuatan lebih kurang 40 orang, berlangsung kurang lebih hampir satu jam (pukul 06.00 s.d. 07.00 WIB). Perwira Udara Kasmiran, Sersan Mayor Tanumiharjo, Kopral Tohir bersama anak buahnya gugur dalam mempertahankan lapangan terbang Maguwo. Pukul 08.00 WIB Maguwo telah jatuh ke tangan Belanda disusul mendaratnya Dakota pertama Belanda. Selang beberapa menit kemudian sudah mendarat 5 pesawat mendarat dengan mengangkut rombongan *Resimen Speciale Troepen* yang kemudian mempelopori serangan atas kota Yogyakarta.

Setelah tentara Belanda berhasil menduduki lapangan terbang Maguwo, pasukan Belanda Brigade T di bawah pimpinan Kapten Van Langen bergerak menuju pusat kota Yogyakarta sambil menghambur-hamburkan peluru menembak apa saja yang ditemui. Sementara pasukan Belanda bergerak menuju kota Yogyakarta, dalam keadaan darurat tersebut Presiden Soekarno mengadakan sidang darurat. Dalam sidang tersebut diputuskan bahwa Presiden, Wakil Presiden dan beberapa menteri tetap tinggal di kota dengan kemungkinan ditawan, namun tetap dekat dengan KTN. Selanjutnya juga diputuskan bahwa Mr. Syaffrudin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Sumatra) dengan perantaraan radio diberi kuasa untuk membentuk Pemerintah Darurat RI. Mandat semacam itu juga diberikan kepada Dr. Sudarsono dan Mr. A.A. Maramis yang berada di New Delhi. Dengan maksud apabila Mr. Syaffrudin Prawiranegara gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatra, keduanya dapat membentuk *Excile Gouverment* (Pemerintahan Pelarian).

Kurang lebih pukul 16.00 WIB tentara Belanda telah berhasil menguasai seluruh kota Yogyakarta. Tempat-tempat penting seperti Istana Presiden (Gedung Agung), Benteng Vredeburg (Sekarang Museum Benteng Yogyakarta), Markas MBKD, dsb sudah jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, H. Agus Salim, KSAU Suryadi Suryadarma ditawan Belanda dan selanjutnya diasingkan ke Bangka dan baru kembali ke Yogyakarta setelah dicapai persetujuan Roem Royen 7 Mei 1949.

ff. Serangan Umum I Maret 1949 di Yogyakarta

Jatuhnya ibukota RI Yogyakarta oleh Agresi Militer Keduanya, dijadikan indikasi oleh Belanda untuk mengkultuskan hancurnya RI bersama TNI-nya. Berita tersebut digembar-gemborkan ke seluruh penjuru dunia. Belanda menganggap aksi-aksi yang dilakukan para pejuang tidak lebih sebagai aksi para perampok dan teroris belaka.

Setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, maka berturut-turut pula dikuasai daerah-daerah lain. Seperti Sleman pada tanggal 20 Desember 1948, Bantul 19 Januari 1949, dan Gunung Kidul 10 Maret 1949. Di setiap tempat yang telah dikuasai selalu didirikan pos-pos penjagaan. Dari pos inilah Belanda mengadakan patroli pada siang hari yang rata-rata jauhnya 3 Km dari pos. Sementara itu pasukan TNI yang berhasil menyingkir ke luar kota memerlukan waktu yang relatif lama untuk mengadakan konsulidasi antar pucuk pimpinan TNI. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, 19 Desember 1948 Letkol Soeharto melalui Kapten Widodo telah memerintahkan Mayor Sardjono untuk menyusun kekuatan di Yogyakarta selatan.

Tanggal 20 Desember 1948, Letkol Soeharto Komandan Brigade X mengadakan perjalanan untuk menghimpun kekuatan militer di daerah Wehkreise III. Perjalanan konsulidasi tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari. Berangkat dari Desa Ngotho menuju ke arah barat, Kalibayem, Godean, Cebongan, Cangkirang, Manisrenggo, Prambanan, Piyungan dan kembali ke Ngotho. Dari hasil konsulidasi yang dilakukan oleh Komandan Wehrkreise III, Letkol Soeharto tersebut dapat dirinci kekuatan pasukan bersenjata di Kota Yogyakarta antara lain :

1. Pasukan Polisi Istimewa dengan kekuatan 2 kompi dibawah pimpinan Mayor Sakri di wilayah Imogiri;
2. Pasukan Taruna Militer Akademi dengan kekuatan 2 kompi dibawah pimpinan Kolonel GPH. Djati Koesoemo di wilayah Cangkringan;
3. Batalyon I dibawah pimpinan Sudjono di Bantul;
4. Pasukan dibawah komandan Sub Teritorium Militer Yogyakarta Mayor Selo Ali (kemudian diganti Letnan Suhud) di Gamping;
5. Batalyon Hadidjoyo di Bantul;
6. Batlayon Basuni di Sleman;
7. Batalyon 151 Haryadi (gugur diganti adiknya Haryo Sudirjo) di Sleman Tengah;
8. Brigade 17/TP dengan kekuatan 1 Kompi dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sudarto di Kulon Progo;
9. Detasemen 3 Brigade XVII dibawah pimpinan kapten Martono berada di Sleman Tengah;
10. Brigade XVI (Laskar Seberang) dengan kepala staf Letnan Kolonel Kahar Muzakar, Yon Andi Matalata, Yon Palar, Yon Peloepessy di Godean.

Dengan melihat cukup besarnya kekuatan pasukan bersenjata yang ada serta simpati rakyat yang begitu besar terhadap perjuangan maka segera direncanakan serangan balasan terahadap Belanda di kota maupun pos-posnya yang berada di luar kota. Pada tanggal 26 Desember 1948 dari markas sementara Ngotho, Komandan Brigade X Letkol Soeharto memberikan briefing kepada para perwira antara lain Mayor Rekso Siswo, Letnan Sudibyo dan Letnan Sugiyono. Hasil dari *briefing* tersebut diputuskan bahwa akan segera diadakan serangan balasan terhadap Belanda. Sore harinya markas dipindahkan dari Ngotho ke sebelah timur yaitu di desa Segoroyoso, Plered, Bantul di rumah Bapak Gardo Utomo.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil yang dicapai maka organisasi pertahanan Wehrkreise III dibagi menjadi 6 Sub Wehkreise (SWK), antara lain :

1. SWK 101 daerah Bantul Timur dengan komandan Mayor Sakri
2. SWK 102 daerah Bantul Barat dengan komandan Mayor Sardjono
3. SWK 103 daerah Godean Selatan dengan komandan Mayor Ventje Sumual
4. SWK 104 daerah Sleman dengan komandan Mayor Sukasno
5. SWK 105 daerah Yogyakarta Timur dan Gunung Kidul dengan komandan Mayor Sudjono
6. SWK 106 daerah Kulon Progo dengan komandan Letnan Kolonel Sudarto

Pembagian tersebut berjalan beberapa saat, tetapi kemudian dirasa adanya kekurangseimbangan pada masing-masing kekutan. Sehingga pada tanggal 16 Januari 1949, Komandan WK III segera mengadakan perubahan. Semula 6 SWK dirubah menjadi 7 SWK, sebagai berikut :

SWK 101 daerah kota Yogyakarta dengan komandan Letnan Marsudi

1. SWK 102 daerah Bantul dengan komandan Mayor Sardjono
2. SWK 103 daerah Gamping dengan komandan Letnan Kolonel Suhud
3. SWK 103 A daerah Godean dengan komandan Ventje Sumual
4. SWK 104 daerah Sleman dengan komandan Mayor Sukasno
5. SWK 105 daerah Yogyakarta Timur termasuk Gunung Kidul dengan komandan Mayor Sudjono
6. SWK 106 daerah Kulon Progo dengan komandan Letnan Kolonel Soedarto

Kota Yogyakarta yang termasuk dalam SWK 101 berada dibawah komandan Letnan Marsudi dibagi menjadi 6 sektor yaitu :

1. Sektor I/SWK 101 meliputi daerah Kraton sebelah barat hingga Jalan Ngabean dibawah komandan Letnan Wuston
2. Sektor II/SWK 101 meliputi daerah sebelah timur hingga Jalan Secodiningratan (sekarang Jl. P. Senopati) dibawah komandan Sudomo
3. Sektor III/SWK 101 meliputi Jl. Ngabean ke utara, Jl. Malioboro ke barat, rel kereta api ke selatan, dibawah komandan Moctar
4. Sektor IV/SWK 101 meliputi Jl. Secodiningratan, Pakualaman ke utara, Jl. Malioboro ke timur, rel kereta api ke selatan dibawah komandan Rakido
5. Sektor V/SWK 101 meliputi rel kereta api ke utara, Jl. Tugu ke timur dibawah komandan Supriyo
6. Sektor VI/SWK 101 meliputi rel kereta api ke utara, Jl. Tugu ke barat di bawah komandan Sudarno.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan kota Yogyakarta, SWK 101 dibawah pimpinan Letnan Marsudi ini, banyak mendapat bantuan yang sangat berarti dari Sri Sultan Hamengku Buwomo IX. Serangan balasan pertama kali yang dilakukan oleh

gerilyawan TNI setelah agresi Belanda II yang telah direncanakan sejak tanggal 26 Desember 1948, dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1948. Serangan tersebut dipimpin oleh Letkol Soeharto. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok yaitu besar dan kecil. Kelompok kecil mengadakan serangan pancingan ke luar kota. Sedangkan kelompok besar berusaha masuk dan menghancurkan pos-pos penjagaan Belanda di dalam kota seperti di sekitar Kantor Pos, Secodiningratan, Ngabean, Patuk, Pakuningratan, Sentul, Pengok dan Gondomanan. Serangan seperti itu diulangi beberapa kali yaitu pada tanggal 9 Januari, 4 Februari, dan 16 Februari tahun 1949.

Keempat serangan balas terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta yang dilakukan pada malam hari, belum melibatkan kekuatan maksimal dan belum mempunyai dampak yang luas. Keempat serangan balas tersebut baru merupakan visualisasi dari sistem pertahanan Wehrkreise III dengan titik berat operasi gerilya.

Akibat dari serangan gerilyawan TNI tersebut maka Belanda mengadakan gerakan pembersihan. Tempat-tempat penting seperti kantor-kantor, sekolah-sekolah dan bahkan sampai barang-barang kecilpun termasuk radio disita oleh Belanda. Hanya radio di Kraton saja yang waktu itu bebas dari sitaan Belanda. Oleh karenanya perkembangan yang terjadi diluar dapat diketahui oleh Sri Sultan HB IX melalui siaran radio. Terutama siaran radio yang dipancarkan ke seluruh dunia yang menyatakan bahwa Belanda telah menduduki Yogyakarta dan RI bersama TNI telah hancur. Jelas berita tersebut telah didramalisir Belanda. Mengetahui hal ini maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX berpikir harus segera diambil tindakan yang menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih tetap eksis. Kemudian melalui kurirnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera memanggil Letkol Soeharto untuk melaksanakan aksi untuk menunjukkan bahwa siaran radio yang digembar-gemborkan Belanda bahwa RI dan TNI telah hancur adalah berita bohong. Oleh karenanya perlu diadakan suatu serangan besar-besaran. Berbeda dengan serangan serentak yang dilakukan sebelumnya, maka TNI harus mengadakan serangan yang mempunyai dampak internasional secara luas. Serangan dilaksanakan pada siang hari sehingga punya nilai politis yang mampu mempengaruhi jalannya sidang di DK PBB.

Untuk mematangkan pikiran yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX tersebut maka pada tanggal 21 Februari 1949 diadakan rapat rahasia bertempat di Sekretariat Dewan Pertahanan Daerah di Kepatihan Yogyakarta (Gedung Wilis). Rapat dihadiri oleh seluruh komandan Sektor SWK 101, komandan SWK 101, wakil pemerintahan kotapraja, dan wakil gabungan rukun kampung. Rapat selanjutnya diadakan di rumah Bapak Atmonadi di Jl. Kadipaten Lor pada tanggal 26 Februari 1949. Hasil rapat diputuskan untuk mengadakan serangan umum dan untuk mohon restu serta petunjuk dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Setelah mendapat restu dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Panglima Besar Jenderal Soedirman (dari markas gerilyanya) maka Serangan Umum ditentukan pelaksanaanya yaitu pada tanggal 1 Maret 1949. Secara teknis pelaksanaannya diserahkan kepada Letkol Soeharto.

Serangan Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949, pada siang hari tersebut mempunyai tujuan. Antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Politik
   Untuk mendukung perjuangan perwakilan RI di Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Lambertus Nico Palar, melawan kampanye Belanda yang menyatakan bahwa "Aksi Polisionilnya" di Indonesia telah berhasil, karena TNI sudah dihancurkan dan Yogyakarta sudah kembali normal.

2. Tujuan Psikologis
   Untuk mengobarkan semangat juang rakyat dan TNI. Serangan ini dimaksudkan untuk memulihkan, memupuk, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap TNI. Karena TNI masih tetap setia pada tugasnya dan dengan gigih terus berjuang menghalau musuh. Serangan umum diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pejuang di seluruh tanah air untuk meningkatkan perlawanan.

3. Tujuan Militer
   Untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI masih tetap utuh, masih merupakan satuan yang tertib, teratur dan disiplin, serta mampu mengadakan perlawanan secara terkoordinasi dan terkonsentrasi. Disamping itu untuk membuktikan pula bahwa keberadaan Belanda di Yogyakarta adalah tidak sah, dan berpengaruh terhadap tekad kesetiaan TNI.

Untuk lebih mempermudah hubungan dengan sektor barat, maka pada tanggal 28 Februari 1949 markas Komando WK III dipindahkan dari Segoroyoso, Plered, Bantul ke Bibis, Bangunjiwo, Bantul. Tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00 WIB bertepatan dengan bunyi sirine berakhirnya jam malam dimulailah Serangan Umum. Komandan WK III, Letnan Kolonel Soeharto menempatkan komandonya di sektor barat. Pos komando taktis WK III bergerak meninggalkan Patuk memasuki Jl. Malioboro. Dari sinilah Letnan Kolonel Soeharto mengendalikan pasukan WK III yang mengenakan tanda pengenal "Janur Kuning" yang menyerang dari 4 jurusan.

Sektor selatan, SWK 102 pimpinan Mayor Sardjono menempatkan pos komandonya di Pagelaran, dengan sasaran Kantor Pos, Gedung Negara, Benteng Vredeburg, Pabrik Anim Wirobrajan, Watson, Kotabaru, Stasiun Lempuyangan dan pabrik paku Lempuyangan. Pasukan ini terdiri dari Kompi Sumarmo, Kompi Ali Affandi, Kompi Widodo, dan Kompi Sudarmo. Selain itu juga diperkuat oleh satu kompi Sudarsono Bismo dari batalyon Suhardoyo yang berkedudukan di Purworejo dan satu kompi Polisi pimpinan Djohan Suparno.

Kompi Sudarmo berhasil menetralisir kekuatan musuh di barongan, Gesikan dan Bantul serta satu peleton untuk masuk kota dan berhasil menguasai pabrik Anim Wirobrajan. Kompi Ali Affandi, seksi Letda Wasil dengan sasaran Kotagede. Kompi Sumarmo dengan sasaran kantor Pos dan Benteng Vredeburg. Kompi Widodo yang diperkuat dengan satu kompi polisi (*Mobil Brigade*) MB Musiman, satu seksi polisi MB

Kohari, dan dua peleton (Tentara Pelajar) TP Tomas Rahardjo menyerang Watson. Dari Sini berhasil mendapatkan amunisi seberat 5 ton, selanjutnya menyerang Kotabaru dan mendapatkan perlawanan yang berat dari Belanda. Kompi Sudarsono Bismo dengan kekuatan 3 peleton tempur dan 1 peleton bantuan menyerang kota Yogyakarta dari arah tenggara dengan sasaran Alun-alun Utara dan Wirogunan. Kompi Polisi pimpinan Djohan Suparno menyerang kedudukan Belanda di Pojok Beteng Timur. Lewat pukul 11.00 Komandan SWK 102 memerintahkan pasukannya menginggalkan kota Yogyakarta dengan lebih dulu mengibarkan bendera Merah Putih di ringin kurung.

Sektor Barat, SWK 103 A pimpinan Ventje Sumual yang terdiri dari batalyon (minus) P.C. Haryo Sudirdjo, 2 kompi dari Batalyon Palupessy. Komandan SWK 103 A memindahkan pos komandonya dari Godean ke Dagen. Sasaran pasukan SWK 103A ialah sepanjang Jl. Malioboro, Hotel Tugu, Hotel Merdeka dan Benteng Vredeburg. Kompi Polisi (*Mobil Brigade)* MB M. Ayatiman tetap mempertahankan Lempuyangan sampai Jl. Maliboro bagian barat. Dalam pertempuran ini gugur seorang anggota polisi. Polisi (*Mobil Brigade*) MB Subroto dengan kekuatan 2 pleton masing-masing dipimpin oleh Sugiyo dan Jilan bergerak menyerang Patuk. Perlawanan yang cukup berat dari sektor barat ini adalah kedudukan Belanda yang berada di Hotel Tugu.

Sektor Utara, SWK 104 pimpinan Mayor Sukasno yang menempatkan pos komandonya di Mrican. Pasukan SWK 104 terdiri dari Pasukan A, Pasukan B, dan Pasukan C. pasukan A terdiri dari Peleton Vandrigt Kadet Sudjamadi yang mendapat tugas mengikat kedudukan Belanda di Maguwo dari arah utara bekerjasama dengan pasukan dari SWK 105. Peleton Nawawi menyerang kedudukan Belanda di MBT (Markas Besar Tentara) dan Pasukan A lainnya menyerang MBT dan kedudukan Belanda di Gondokusuman dan mendapat perlawanan sengit dari Belanda. Pasukan A selanjutnya bergerak ke Klitren terus ke Sapen dan bersama-sama dengan Pasukan Wiyogo Atmo Darminto (Mantan Gubernur DKI) pada jam 11.00 mundur ke Pejambon.

Pasukan B pimpinan Mayor Sakri dengan kekuatan 2 peleton menyerang Hotel Tugu dan Hotel Merdeka. Pada jam 06.00 WIB mereka membuka serangan fajar di Jembatan Kewek dan menewaskan beberapa tentara Belanda, oleh karena disini mendapat perlawanan yang sengit akhirnya mereka mundur ke arah Lempuyangan.

Pasukan C disamping 3 peleton organik yaitu Peleton SS KODM pimpinan Letnan Satu Zidni Nuri, Seksi Polisi Negara pimpinan Inspektur Suragil Sukidi dan Peleton KODM pimpinan Letnan Dua Sudjiman bersama Peleton II Pasukan C dengan sasaran pos kedudukan Belanda di Pingit, Jetis, dan Gondolayu. Jetis dapat segera dikuasai dan Gondolayu dapat segera ditahan. Peleton III Kompi TP Martono pimpinan Letda Aliadi mengikat pos kedudukan Belanda di Medari dan Tempel. Sedangkan Peleton I pimpinan Letnan Satu Sudarsono mengikat pos Belanda di Beran. Seksi (Mobil Brigade)MB Sumarjan, Seksi Polisi Abdul Rahman dan Peleton II TP Martono mempertahankan Bangirejo untuk menutup jalan ke Yogyakarta dari arah utara.

Sektor Timur, SWK 105 pimpinan mayor Sudjono menempatkan pos komandonya di Sri Martani. Sasaran SWK 105 ialah kedudukan Belanda di Maguwo, Tanjung Tirta, Kalasan dan Prambanan dengan tujuan mengisolir tentara Belanda di timur kota dari induk pasukannya. Pasukan SWK 105 berhasil membumihangus bangunan yang dipergunakan Belanda hingga Belanda mundur ke Wonocatur. Ki Mardjuki dan Peleton Zahid Husein diminta komandan WK III untuk memperkuat serangan umum di dalam Kota Yogyakarta. Peleton Pratelo dan Peleton Abdul Kayat serta Peleton Abdul Rahman menjelang Serang Umum 1 Maret 1949 telah aktif mengadakan serangan pendahuluan untuk mengacaukan pertahanan Belanda di Sentul, Kantor Pos, dan Benteng Vredeburg.

Sedangkan SWK 106, yang tidak terlibat langsung dalam serangan umum di Kota Yogyakarta membuka serangan operasi di wilayahnya yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soedarto. Tujuan dari serangan ini untuk mengikat kedudukan Belanda di Pos Jembatan Bantar, dengan mengerahkan Seksi Staf Pengawal untuk menyerang dari arah barat dan Seksi Nur Munir menyerang dari arah timur. SWK 106 ini merupakan lingkaran pengamanan dalam untuk menghambat bantuan pasukan Belanda dari arah barat. Sedangkan sebagai lingkaran pengamanan luar ditugaskan pada Batalyon Suhardoyo dan Batalyon Sudarmo di Kebumen. Batalyon Daryatmo merupakan lingkaran pengamanan luar di Salam dan Magelang untuk mencegah bantuan Belanda dari arah utara.

Bantuan musuh pada jam 11.00 dari Magelang tiba di Yogyakarta dengan kekuatan 1 Batalyon Infantri Brigade V yang terdiri dari pasukan lapis baja, pasukan Anjing NICA dan Pasukan Gajah Merah pimpinan Kolonel Van Zanten yang terkenal keganasannya waktu bertugas di Kerawang. Berdasarkan pertimbangan taktis dan kekuatan senjata yang tidak seimbang, serta pertimbangan keselamatan rakyat, maka pada jam 12.00 pasukan dan gerilyawan mengundurkan diri ke basis masing-masing. Dengan demikian TNI dan gerilyawan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam (jam 06.00 s.d. 12.00). Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, pihak RI timbul korban lebih kurang 353 gugur, sedangkan pihak Belanda menurut beritanya tidak kurang dari 213 tentaranya tewas.

Berita tentang keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Komandan WK III Letnan Kolonel Soeharto yang terkenal dengan 6 Jam di Yogya, berhasil disebarluaskan melalui jaringan radio AURI dengan sandi PC-2 di Playen, Wonosari, Gunung Kidul secara beranting menyusuri jaringan radio AURI di Sumatra. Selanjutnya dipancarluaskan ke luar negeri melalui Birma dan diterima pemancar All India Radio, akhirnya sampai kepada perwakilan RI di PBB, New York USA. Di sisi lain, peristiwa itupun diseberluaskan melalui jaringan radio pemerintahan RI melalui Wonosari dan Balong sampai ke stasiun radio PDRI Sumatra.

gg. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta, 29 Juni 1949

Serangan Umum yang dilancarkan pada tanggal 1 Maret 1949 berhasil membuka mata dunia bahwa apa yang selama ini diberitakan oleh Belanda tentang hancurnya RI dan TNI hanyalah omong kosong belaka. Oleh karena itu atas inisiatif komisi PBB untuk Indonesia (UNCI : *United Nations Commision for Indonesia*) pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan antara RI dan Belanda yang diadakan di Hotel Des Indes Jakarta. Perundingan dipimpin oleh Merle Cochran (wakil dari PBB). Pihak RI dipimpin oleh Mr. Roem sebagai ketua, dan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua. Sedangkan anggotanya terdiri atas Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latuharhary yang disertai dengan 5 orang penasehat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Royen. Anggotanya antara lain Mr. N.S. Blom, Mr. A.S. Jacob, Dr. J.J. Van der Velde dan 4 orang penasehat. Setelah berjalan sangat alot, maka berkat usaha keras Merle Cochran akhirnya dicapai kesepakatan yang berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Persetujuan tersebut kemudian dikenal dengan Persetujuan Roem Royen, diambil dari dua nama ketua delegasi, RI dan Belanda.

Adapun prinsip-prinsip dari persetujuan Roem Royen tersebut bahwa RI bersedia untuk:

1. Sesuai dengan resolusi DK PBB, Indonesia sanggup menghentikan perang gerilya
2. Bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan dan ketertiban
3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dengan tidak bersyarat.

Selanjutnya Ketua Delegasi Belanda Dr. Van Royen membacakan pernyataannya yang antara lain berisi :

1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan satu panita bersama di bawah pengawasan komisi PBB
2. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatannya sepatutnya dalam satu daerah, meliputi daerah Yogyakarta
3. Menyetujui adanya RI sebagai satu negara
4. Membebaskan dengan tidak bersyarat pemimpin-pemimpin RI dan tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 19 Desember 1948
5. Konferensi Meja Bundar akan segera diadakan setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Dengan adanya kesepakatan dari persetujuan Roem-Royen tersebut maka Presiden Soekarno yang berada di Sumatra segera memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku menteri negara koordinator keamanan untuk menyiapkan segala sesuatunya menjelang pengembalian Yogyakarta dari tangan Belanda, termasuk penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta. Pada tanggal 10 Mei 1949 Komandan Brigade T Kolonel Van Langen, memerintahkan kepada pasukannya yang berada di

Karesidenan Yogyakarta untuk menghindarkan pertempuran-pertempuran dengan pasukan RI. Selanjutnya Menteri Negara Koordinator Keamaman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan kepada komandan TNI di Yogyakarta untuk menghindarkan pertempuran dengan Belanda.

Pada tanggal 23 Juni 1949 baru ada berita dari Pihak Belanda yang memberitahukan kepada pihak RI di Yogyakarta, bahwa tentara Kerajaan Belanda akan ditarik dari Karesidenan Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949 dari Pos Wonosari. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta akan dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 1949 yang diatur dalam empat tahap mulai dari selatan ke utara dan keluar kota ke jurusan Magelang.

Pada tanggal 24 Juni 1949 rombongan yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII, Honggowongso (dari pamong praja), Sumardjan (dari pamong praja) dan Taya (dari kepolisian negara), serta dari Milobs yang ditempatkan di pihak Indonesia adalah Letnan Jenderal Alexander dan Kapten Marshal dan dari Milobs yang ditempatkan di pihak Belanda adalah Mayor Goedfroy dan Mayor Laksos. Mereka berangkat dari Lapangan Terbang Maguwo menuju Gading Wonosari. Kemudian mereka disambut oleh Kolonel D.B.A. Van Langen. Dengan demikian dimulailah penarikan tentara Belanda yang pertama kali dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menjaga dan menjamin keamanan kedua belah pihak, maka selama pasukan Belanda ditarik dari posnya, penduduk di sekitar pos itu disepanjang jalan yang akan dilalui pasukan Belanda, dilarang keluar rumah. Seruan ini dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku menteri negara koordinator keamanan dua hari sebelum penarikan mundur tentara Belanda dari kota Yogyakarta dilaksanakan (27 Juni 1949). Satu hari kemudian yaitu tanggal 28 Juni 1949 telah dilaksanakan penyerahan semua lembaga-lembaga dan kantor-kantor serta perusahaan-perusahaan sipil dari pihak Belanda yang dipimpin oleh Leyklama kepada pihak RI yang dipimpin oleh Ir. Suryomihardjo.

Tanggal 29 Juni 1949 dibawah pengawasan UNCI (*United Nations Commision for Indonesia*) penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dimulai. Pengawasan dari udara dilakukan dengan menggunakan dua buah pesawat Mo-Hawk dan sebuah pesawat capung Belanda.

Sesuai dengan rencana yang diusulkan Belanda, penarikan tentara Belanda diatur dalam empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap I: Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 07.00 ditarik dari Kota Yogyakarta bagian selatan (Jl. Sentul, Secodiningratan, Ngabean, Wirobrajan). Selanjutnya TNI masuk bagian kota tersebut sampai kurang lebih 500 meter dari garis jalan tersebut.
2. Tahap II: Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 09.30 ditarik dari bagian kota antara jalan-jalan disebut pada tahap I dan jalan kereta api. Selanjutnya TNI masuk ke bagian kota tersebut sampai garis kurang lebih 500 meter di sebelah selatan jalan kereta api.
3. Tahap III : Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 11.30 ditarik dari bagian kota di sebelah utara jalan kereta api dan sebelah barat Sungai Code. Selanjutnya TNI menduduki bagian kota tersebut.
4. Tahap IV : Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 14.30 ditarik dari Kota Yogyakarta menuju Magelang. Selanjutnya TNI menduduki seluruh Kota Yogyakarta. Sore itu tanggal 29 Juni 1949 seluruh Kota Yogyakarta berhasil kembali ke tangan RI. Sehingga tanggal 29 Juni selalu diperingati sebagai hari "Yogya Kembali".

Pasukan MA yang dipimpin oleh Letnan Wiyogo Atmodarminto masuk kota pada tahap III. Sebelumnya mereka menyiapkan diri di Gejayan. Kemudian di Gejayan dijemput oleh Sri Paku Alam VIII didampingi oleh 2 orang dari Milobs. Pukul 12.00 pasukan mulai masuk kota didampingi Sri Paku Alam VIII dengan rute Pelemkecut – Demangan – Pengok dan kemudian menmpatkan pos komandonya untuk sementara di Rumah Sakit Pusat (Bethesda sekarang) dan dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih di halaman rumah sakit tersebut.

hh. Para Pemimpin Negara kembali ke Yogyakarta 6 Juli 1949

Dengan adanya kesepakatan dari persetujuan Roem-Royen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 maka Presiden Soekarno yang berada di Sumatra segera memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku menteri negara koordinator keamanan untuk menyiapkan segala sesuatunya menjelang pengembalian Yogyakarta dari tangan Belanda, termasuk penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta. Dalam persetujuan tersebut juga memuat prinsip bahwa Belanda akan membebaskan para tahanan politik yang ditawan Belanda sejak tanggal 19 Desember 1949 dengan tidak bersyarat. Ini berarti bahwa Presiden Soekarno, Drs. M. Hatta dan para pemimpin lainnya yang ditangkap sewaktu Belanda manjalankan aksi militernya yang ke dua akan segera dikembalikan.

Setelah tentara Belanda meninggalkan Kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949, tugas pengamanan Daerah Istimewa Yogyakarta sepenuhnya menjadi tanggungjawab komadan WK III, Letkol Soeharto. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang baru ini, Komandan WK III tidak hanya bertanggunjawab kepada Gubernur Militer III/Divisi III (Kolonel Gatot Subroto), tetapi juga bertanggunjawab kepada Menteri Negara Koordinator Kemanan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Berkat perhatian Sri Sultan Hamengku Buwono IX terhadap kehidupan rakyat di pedesaan sekaligus memberikan motivasi dan semangat baru bagi rakyat, serta dengan adanya disiplin yang tinggi pasukan TNI dan pasukan pejuang bersenjata lainnya yang berada di bawah WK III, dan seringnya beliau meninjau daerah-daerah bekas basis-basis gerilya maka keamanan kota Yogyakarta dan sekitarnya cepat pulih dengan penuh kewaspadaan.

Dengan keamanan yang makin mantap ini, maka persiapan untuk menerima kedatangan para pemimpin RI makin sempurna. Pada hari Rabu Kliwon, tanggal 6 Juli 1949, jam 12.25 rombongan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Drs. M. Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, menteri Pendidikan Ali Sastoamidjojo, Ketua delegasi Muhammad Roem, Kepala Staf Angkatan Perang Suryadi Suryadarma, beserta para pemimpin lainnya tiba di Lapangan Terbang Maguwo (Adisucipto, sekarang) dengan pesawat milik UNCI (*United Nations Commision for Indonesia*). Di lapangan terbang Maguwo rombongan dari Bangka ini disambut oleh Menteri Negara koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, menteri-menteri yang ada di Yogyakarta dan panitya penyambutan pemerintah RI beserta pembesar-pembesar lainnya dengan upacara resmi. Presiden segera mengadakan pemeriksaan barisan kehormatan. Setelah itu barulah menuju gedung negara Yogyakarta (Gedung Agung). Disepanjang jalan disambut oleh rakyat dengan pekik "Merdeka".

Sesampai di Istana disambut pula dengan upacara penyambutan yang amat sederhana. Hanya upacara singkat dengan pidato sambutan wakil ketua panitya penyambutan yang diwakili oleh Wakil Ketua BPKNIP dan pidato terima kasih dari Presiden Soekarno yang menegaskan bahwa :

…….kembalinya Pemerintah ke Yogyakarta adalah nyata bahwa perjuangan kemerdekaan harus dilanjutkan. Dua faktor utama yang memungkinkan kembalinya pemerintah itu, ialah kekuatan dan keuletan rakyat dan bantuan dunia internasional. Dengan berdoa bersyukur kepada Tuhan atas berkah dan ridho-Nya lebih dari yang sudah-sudah, kita harus insyaf hendaknya, bahwa hanya dengan persatuan yang menjadi sendi perjuangan kita, akan tercapailah cita-cita kita.

ii. Konferensi Meja Bundar (KMB), Agustus – Nopember 1949

Setelah permasalahan intern dapat dipecahkan melalui Konferensi Inter Indonesia tahap pertama di Yogyakarta (19 – 22 Juli 1949) dan tahap kedua di Jakarta (31 Juli – 3 Agustus 1949), maka bangsa Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Tanggal 4 Agustus 1949 telah ditetapkan delegasi RI untuk KMB antara lain Drs. M. Hatta, Mr. Mohammad Roem, Prof. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro Amidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soejono Hadinoto, Dr. soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, dan Mr. Soemadi. Sedangkan perwira-perwira TNI yang duduk dalam delegasi tersebut antara lain Kolonel TB. Simatupang, Komodor Suryadi Suryadarma, Kolonel Soebijakto, Letkol Daan Jahja, dan Mayor Haryono. Untuk Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Tanggal 23 Agustus 1949 bertempat di Riderzaal, Den Haag dibuka sidang KMB. Dalam sidang tersebut delegasi RI diketuai oleh Drs. M. Hatta, delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen sedangkan UNCI (*United Nations Commision for Indonesia*) diketuai oleh Chritchley.

Setelah sidang berjalan dengan alot, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan Piagam Persetujuan tentang konstitusi RI di kota Scheveningen, Nederland. Pada tanggal 2 Nopember 1949 dilangsungkan upacara penutupan KMB di Riderzaal, Den Haag dengan hasil ketentuan bahwa Kedaulatan Belanda di Indonesia akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Mengenai masalah Irian Barat akan ditunda satu tahun kemudian, meski dalam kenyataannya berlarut-larut dan resmi menjadi bagian RI sejak 1 Mei 1963 serta dikuatkan melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang berisi bahwa rakyat Irian ingin tetap menjadi bagian dari NKRI.

jj. Pengakuan Kedaulatan RIS oleh Belanda 27 Desember 1949

Setelah permasalahan intern dapat dipecahkan melalui Konferensi Inter Indonesia tahap pertama di Yogyakarta (19 – 22 Juli 1949) dan tahap kedua di Jakarta (31 Juli – 3 Agustus 1949), maka bangsa Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Tanggal 4 Agustus 1949 telah ditetapkan delegasi RI untuk KMB antara lain Drs. M. Hatta, Mr. Mohammad Roem, Prof. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro Amidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soejono Hadinoto, Dr. soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, dan Mr. Soemadi. Sedangkan perwira-perwira TNI yang duduk dalam delegasi tersebut antara lain Kolonel TB. Simatupang, Komodor Suryadi Suryadarma, Kolonel Soebijakto, Letkol Daan Jahja, dan Mayor Haryono. Untuk Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Tanggal 23 Agustus 1949 bertempat di Riderzaal, Den haag dibuka sidang KMB. Dalam sidang tersebut delegasi RI diketuai oleh Drs. M. Hatta, delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen sedangkan UNCI (*United Nations Commision for Indonesia*) diketuai oleh Chritchley. KMB (Konferensi Meja Bundar) berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Riderzaal, Den Haag, Belanda. Setelah sidang berjalan dengan alot selama kurang lebih 3 bulan, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan Piagam Persetujuan tentang konstitusi RI di kota Scheveningen, Nederland. Hasil terpenting dari diadakannya konferensi tersebut adalah bahwa kedaulatan Belanda di Indonesia akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

Pada tanggal 14 Desember 1949, berkumpul di Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta wakil-wakil pemerintah RI dan pemerintah negara daerah (negara bagian) yang akan menjadi bagian dari RIS serta Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari masing-masing negara bagian tersebut. Mereka bermaksud mengadakan musyawarah federal. Dari hasil pembicaraan dalam musyawarah tersebut berhasil disetujui naskah Undang-Undang Dasar Sementara yang sebelumnya telah disetujui oleh Delegasi RI dan wikil-wakil BFO di Scheveningen 29 Oktober 1949. Undang-undang tersebut disepakati sebagai Konstitusi RIS.

Pada tanggal 15 dan 16 Desember 1949, sesudah hasil KMB diterima oleh Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera diadakan sidang pemilihan Presiden RIS

dengan calon tunggal Ir. Soekarno oleh suatu Dewan Pemilihan Presiden RIS di Kepatihan Yogyakarta. Ketua Panitia Pemilihan Nasional (PPN) adalah Mr. Mohammad Roem. Panitia tesebut beranggotakan wakil-wakil RI dan wakil negara bagian. Sore harinya hasil sidang Dewan Pemilihan Nasional disampaikan kepada Presiden Soekarno oleh Ketua Panita Pemilihan Nasional, Mr. Mohammad Roem. Pada tanggal 17 Desember 1949, bertempat di Bangsal Manguntur Tangkil, Sitihinggil, Kraton Yogyakarta, Ir. Soekarno dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumah Atmadja sebagai Presiden RIS pada pukul 08.00 dengan disaksikan para undangan yang hadir antara lain : Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Roem, Anak Agung Gde Agung, Mr. Sugiyo Pranoto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sri Paku Alam VIII. Hadir pula wakil-wakil dari negara bagian termasuk RI Yogyakarta, pejabat Belanda dan wakil dari UNCI (United Nations Commision for Indonesia).

Setelah selesai acara pelantikan, dilanjutkan dengan penghormatan terhadap presiden RIS dengan defile militer di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta yang dipimpin oleh Kolonel Soeharto. Sementara itu Drs. M. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Kabinet dan perdana menteri dilantik pada tanggal 20 Desember 1949 di Istana Kepresidenan Yogyakarta oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS. Adapun susususnan kabinet RIS yang pertama, yang diumumkan oleh Panitia Persiapan Nasional adalah sebagai berikut :

Perdana Menteri	:	Drs. M. Hatta
Menteri Pertahanan	:	Sri Sultan HB IX
Menteri Dalam Negeri	:	Anak Agung Gde Agung
Menteri Keuangan	:	Mr. Syafrudin Prawiranegara
Menteri Perekonomian	:	Ir. Juanda
Menteri Perhubungan, Tenaga dan PU	:	Ir. Laoh
Menteri Kehakiman	:	Prof. Mr. Soepomo
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan merangkap		
Menteri Kesehatan	:	Dr. Leimena
Menteri Perburuhan	:	Mr. Wilopo
Menteri Sosial	:	Mr. Kosasih
Menteri Agama	:	Wahid Hasyim
Menteri Penerangan	:	Arnold Mononutu
Menteri Negara	:	Sultan Hamid II
Menteri Negara	:	Mohammad Roem
Menteri Negara	:	Dr. Soeparno

Guna manandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS yang telah disetujui dalam KMB tersebut, maka pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Drs. M. Hatta segera berangkat ke negeri Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS. Upacara penandatangan naskah pengakuan kedaulatan RIS tersebut

dilangsungkan di dua tempat yaitu di Belanda dan Jakarta. Di Belanda, tepatnya di ruang tahta istanan Kerajan Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Mr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AMJA. Sassen dan Ketua delegasi RIS Drs. M. Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan dalam naskah pengakuan kedaulatan RIS.

Sedangkan di Jakarta penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS dilakukan di Istana Gambir (Istana Merdeka sekarang). RIS diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Belanda diwakili oleh Wakil Tinggi Mahkota AHJ. Lovink.

Pada tanggal yang sama, 27 Desember 1949 di Yogyakarta terjadi peristiwa penting. Di istana kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung) dislenggarakan upacara penyerahan jabatan Presiden Republik Indonesia dari Ir. Soekarno kepada Mr. Asaat (ketua KNIP waktu itu). Ir. Soekarno akan menjabat tugas yang baru yaitu Presiden Republik Indonesia Serikat. Sedangkan tugas Mr. Assaat sebagai ketua KNIP kemudian digantikan oleh Prawoto Mangkusasmito.

kk. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Agustus 1950

Terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat) bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Hasrat untuk kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin berkobar-kobar. Cukup parah tindakan Belanda yang telah memecah belah negara Indonesia menjadi negara-negara kecil yang puluhan jumlahnya. Hal ini dilakukan tidak lain hanya untuk melemahkan Republik belaka. Rekyat segera sadar akan apa arti pentingya persatuan yang telah menjadi amanat proklamasi.

Pada tanggal 16 Januari 1950 wali negara Jawa Timur menyerahkan mandatnya dan melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain seperti Madura, Jawa Tengah, Daerah Padang Sabang, Negara Indonesia Timur, Kota-kota Sulaswesi dan juga negara Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Bangka dan Pontianak. Pemuda sebagai pelopor gerakan persatuan bangsa berperan aktif dalam aksi demonstrasi pembubaran negara boneka dan jerih payah mereka tidak sia-sia.

Sementara itu pada tanggal 21 Januari 1950, pemerintah RI di Yogyakarta berhasil membentuk kabinetnya yang ke XII. RI sebagai bagian dari RIS tetap memperjuangkan terwujudnya NKRI. Hal ini terlihat dari program kabinetnya yang mencantumkan tujuan utamanya untuk mewujudkan terbentuknya NKRI.

Usaha-usaha untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi di berbagai daerah. Gerakan rakyat menuntut dibubarkannya negara atau daerah bagian dan menggabungkannya dengan Repbulik Indonesia di Yogyakarta. Penggabungan daerah yang satu dengan yang lain atau negara bagian yang satu dengan negara bagian yang lain secara konstitusional dimungkinkan oleh pasal 43 dan 44 Konstitusi RIS dengan ketentuan penggabungan tersebut dikehendaki oleh rakyatnya dan diatur dengan UU Federal.

Pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Dengan dasar tersebut berturut-turut negara-negara bagian menggabungkan diri dengan RI Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 5 April 1950 hanya tinggal terdiri dari tiga negara bagian yaitu RI, Negara Sumatra Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Melihat gejala-gejala yang muncul di masyarakat akan hasratnya yang besar untuk kembali ke bentuk negara kesatuan maka pemerintah RI menganjurkan kepada pemerintah RIS agar mengadakan perundingan dengan NST dan NIT. Perundingan RIS, NST dan NIT berlansung tanggal 13 Mei 1950. Setelah RIS mendapat kuasa penuh dari NST dan NIT untuk berunding dengan Pemerintah RI, maka pada bulan Mei 1950 diselenggarakanlah perundingan antara RI dan RIS.

Pada tanggal 19 Mei 1950, kedua belah pihak telah tercapai persetujuan yang kemudian dituangkan dalam "Piagam Persetujuan". Pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk membentuk sebuah negara kesatuan sebagai penjelmaan RI berdasarkan UUD yang diperoleh dengan mengubah Konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan konstitusi RIS dapat masuk di dalamnya. Selanjutnya oleh pemerintah RI dan RIS dibentuk sebuah panitia bersama yang diberi tugas untuk melaksanakan piagam persetujuan 19 Mei 1950 tersebut, khususnya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan.

Pada tanggal 14 Agustus 1950, parlemen dan senat RIS mengesahkan UUDS Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil panita bersama. BPKNIP di Yogyakarta sebelumhya telah menyetujui RUUDS tersebut pada tanggal 12 Agustus 1950.

Akhirnya dalam rapat gabungan parlemen dan senat RIS tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI. Pada hari itu juga Presiden Soekarno terbang ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Mr. Asaat. Demikian tamatlah riwayat RIS. Sebaliknya NKRI seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terwujud kembali. Pada tanggal 17 Agutus 1950 bertepatan dengan HUT RI ke 5 dirayakan besar-besaran. Dan hari itu pulalah bendera pusaka Sang Merah Putih berkibar untuk pertama kali di halaman Istana Merdeka Jakarta. Di daerah-daerah perayaan HUT RI ke-5 tersebut dirayakan dengan meriah dan penuh suka cita.

B. Tata Pameran Di Dalam Ruang (*Indoor Exhibition*)

Tata pameran di dalam ruang adalah tata pameran yang digelar di dalam ruang pameran Museum Perjuangan Yogyakarta. Tata pameran didalam ruang ini menyajikan koleksi-koleksi museum Perjuangan Yogyakarta yang terkait dengan peristiwa sejarah sejak kedatangan bangsa barat ke Nusantara sampai dengan kembalinya bentuk negara dari RIS (Republik Indonesia Serikat) menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Adapun koleksi-koleksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meriam

Koleksi ini merupakan meriam yang ditemukan di kompleks Benteng Vredeburg Yogyakarta. Meriam ini merupakan bukti sejarah tentang keberadaan pasukan Belanda yang berada di dalam Benteng Vredeburg Yogyakarta. Menurut hasil penelitian bahwa Benteng Vredeburg Yogyakarta (semula bernama Rustenburg) merupakan benteng Belanda di Yogyakarta yang dimanfaatkan secara sempurna oleh VOC sebagai benteng pertahanan mulai tahun 1788. Meriam model seperti itu biasa di pasang di depan pintu gerbang atau di sudut-sudut bastion benteng. Dilihat dari bentuknya, meriam tersebut dulunya terdapat roda yang memungkinkan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi.

2. Miniatur Kapal Angkatan Laut Belanda

Koleksi ini merupakan miniatur dari Kapal Angkatan Laut Belanda yang berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Eropa. Berawal dari penemuan kompas, kapal, dan teori-teori (teori Copernicus), maka dimulailah penjelajahan dunia, yang kemudian mengakibatkan munculnya penjajahan oleh Bangsa Barat atas Bangsa-bangsa Asia dan Afrika sejak abad XVI. Dengan modal itulah, maka Portugis dan Spanyol mulai melakukan penjelajahan dunia. Mereka bersemboyan *Gold, Gospel* dan *Glory* yang berarti emas (kekayaan), agama, dan kejayaan (keharuman nama). Dari situlah maka dua negara besar tersebut berkembang menjadi negara imperialis kuno.

Penjelajahan dunia diawali dengan diadakannya Perjanjian Tordesilas di Pulau Verdi yang diadakan pada tahun 1494. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa dunia telah dibagi menjadi dua bagian. Pulau Verdi kearah barat adalah milik Spanyol, dan Pulau Verdi ke arah timur adalah milik Portugis. Waktu itu armada Portugis dipimpin oleh Alfonso D'allbuquerque. Pada tahun 1509 armada ini tiba di Malaka. Mereka baru dapat menguasai Malaka pada tahun 1511 karena adanya perlawanan. Pada tahun 1512, armada Portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Di Maluku juga tidak bertahan lama karena mendapat perlawaan dari Sultan Baabulah Raja Ternate. Selanjutnya Portugis pindah ke Ambon tahun 1605, dan pindah lagi ke Timor sampai tahun 1976.

Bangsa barat yang datang ke Indonesia kemudian adalah Bangsa Belanda. Motivasi utama dari Bangsa Belanda untuk datang ke Indonesia adalah adanya larangan membeli rempah-rempah di Lisabon pada tahun 1585. Hal itu terjadi menyusul adanya Perang 80 Tahun, dimana Belanda terlibat permusuhan dengan Spanyol. Peperangan terjadi karena tindakan Spanyol yang beragama Katolik dibawah Philip II terhadap Nederlan yang mulai pindah ke agama Kristen Protestan (Calvinis), dianggap sangat sewenang-wenang. Tahun 1850, ketika Philip II juga menjadai raja Portugis, para pedagang Belanda mulai dilarang melakukan transaksi yang biasa di Lisabon dan

Pelabuhan Porutis yang lain. Pelayaran yang dipimpin Cornelis de Houtman ke Nusantara pada tahun 1895 merupakan salah satu percobaan Belanda menerobos ketidakpastian akibat politik Philip II itu.

Meskipun Belanda merupakan armada yang kuat tetapi mereka lebih mengutamakan perdagangan dari pada kekuatan. Armada Belanda pertama di Banten pada tanggal 22 Juni 1596. Armada ini dipimpin oleh Cornelis De Houtman seorang pedagang dari Belanda. Dia berangkat dari Tessel tanggal 21 Maret 1595 dan merupakan sebuah Liga atau Gabungan. Sebagai liga atau serikat, para pedagang Belanda itu mewakili organisasi mereka "Sang Kumpeni dari Jauh" (*de Copagnie van Verre*). Mereka datang dengan empat kapal milik Perhimpunan Pedagang Amsterdam.

Dalam lima tahun setelah Cornelis de Houtman ke Nederland, tahun 1597 dikirim ke Nusantara tak kurang dari 65 kapal (hanya 54 kepal yang kembali). Sementara itu kota-kota di Nederland yang terlibat dalam pengiriman misi dagang tersebut terlibat persaingan sengit. Seperti wilayah Friesland, Holland Utara, Holland Selatan, memberangkatkan kapal tersendiri. Keadaan tersebut menambah semakin runyamnya keadaan Nederland. Untuk itu, guna mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok dan kerugian dagang, maka dibentuklah organisasi perdagangan yang tetap untuk Nusantara yaitu VOC (*Verenigde Oost Indie Compagnie*). Organisasi itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Atas nama Parlemen Nedherlan, VOC diberi kekuasaan mengikat hubungan dan memelihara angkatan bersenjata, dan melaksanakan pemerintahan.

3. Mata uang koin VOC

Mata uang VOC ini merupakan bukti material telah berlangsungnya sistem perdagangan yang memasukkan VOC dalam posisi penting di Nusantara.

Banyaknya pedagang Belanda yang berdagang dengan penduduk pribumi, menimbulkan persaingan antar pedagang Belanda sendiri. Dalam rangka mencegah persaingan antar pedagang, 6 kamar dagang dari propinsi dan kota negeri Belanda yaitu Amsterdam, Delf, Middleburg, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen mendirikan perusahaan dagang dengan nama *Verenigdee Oostindies Compagnie* (VOC) pada tahun 1602. Pemerintah Belanda kemudian mendukung usaha VOC tersebut dan menunjuk seorang komisaris berpangkat Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Batavia. Untuk pertama kalinya Gubernur Jenderal dijabat oleh Pieter Both (1610 – 1614). Untuk mempermudah lalu-lintas perdagangan dan gaji pegawai, kepada VOC diberikan ijin untuk membawa mata uang yang berlaku di negeri Belanda sebagai alat pembayaran, oleh karena banyak uang pecahan kecil (uang receh) yang diperlukan, maka VOC juga diijinkan mencetak mata uang di Indonesia.

4. Replika senjata VOC

Merupakan replika dari senjata VOC (laras pendek) yang merupakan atribut VOC dalam rangka menegakkan monopoli dagangnya di Nusantara sebagai wujud ekploitasi terhadap rakyat bumiputera.

Keberhasilan para pedagang Belanda dalam mengambil rempah-rempah di bumi Nusantara mendorong bertambahnya kapal-kapal Belanda yang lain untuk datang ke Nusantara. Dengan banyaknya para pengusaha dan pedagang Belanda di Nusantara rentan akan adanya persaingan dan perselisihan diantara mereka, oleh karena itu perlu dibentuk adanya persatuan dagang. Karena itulah maka berdiri VOC (*Verenigde Oost Indie Compagnie*). Organisasi itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Atas nama Parlemen Nederlan, VOC diberi kekuasaan mengikat hubungan dan memelihara angkatan bersenjata, dan melaksanakan pemerintahan.

Niat semula yang hanya ingin berdangang, namun terdorong oleh keuntungan yang luar biasa maka niat tersebut berubah menjadi nafsu yang tak terkendalikan ialah dengan jalan monopoli dan akhirnya ekploitasi. Dari sinilah maka kewenangan yang telah diberikan oleh Parlemen Nedherlan untuk memelihara angkatan bersenjata dan melaksanakan pemerintahan mulai dijalankan. Dengan kekerasan senjata mereka berusaha memaksanakan kehendaknya terhadap rakyat.

5. Replika Duaja Jong Java

Duaja Jong Java merupakan panji atau lambang organisasi Jong Java. Pada awalnya, organisasi ini bernama "Tri Koro Darmo" (Tiga Tujuan mulia) yang didirikan tanggal 7 Maret 1915 dan diresmikan di Gedung Budi Utomo. Organisasi ini didirikan atas prakarsa Dr. Satiman Wirjosandjojo yang kemudian menjadi ketuanya, duduk sebagai wakil ketua adalah Wongsonegoro, sekretarisnya Sutomo, anggotanya Muslich, Mosodo dan Abdul Rahman.

Pendirian Tri Koro Darmo dimaksudkan untuk mengadakan suatu tempat latihan bagi calon-calon pemuda nasional. Cinta tanah air harus menjadi dorongan, tanah air kekurangan sekali pemuda-pemuda yang cakap. Disamping itu berusaha menarik perhatian umum untuk kebudayaan Jawa seluruhnya, dan akan mempertebal persaudaraan diantara semua suku-suku bangsa Indonesia yang hidup disini.

Anggotanya merupakan murid-murid sekolah menengah yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Murid-murid yang berasal dari Sunda (Jawa Barat) dan Madura berpendapat bahwa perkumpulan itu terlalu sempit. Maka, untuk mengatasi masalah ini dalam kongres I di Solo tanggal 12 Juni 1918, namanya dirubah menjadi "Jong Java". Perubahan nama ini dimaksudkan supaya perkumpulan ini mendapat pengikut yang lebih luas termasuk Sunda, Madura dan Bali (Daerah-daerah yang berdasarkan kebudayaan Jawa).

6. Replika Duaja Indonesia Moeda

Duaja Indonesia Moeda merupakan lambang atau panji organisasi. Indonesia Moeda merupakan organisasi pemuda yang didirikan tanggal 31 Desember 1930 sebagai hasil fusi antara Jong Java, Pemuda Indonesia dan Pemuda Sumatera. Ide penyatuan diprakarsai oleh Jong Java yang mengundang beberapa wakil perkumpulan pemuda untuk rapat di Jl. Kramat No. 106 Jakarta (sekarang Gedung Sumpah Pemuda) tanggal 23 April 1929. Keputusan pertemuan adalah mengadakan Kongres Pemuda di Solo antara tanggal 28 Desember 1930 - 2 Januari 1931.

Pendirian Indonesia Moeda bertujuan untuk:

a. memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda dan pelajar,
b. membangun kesadaran bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu: Indonesia.

Indonesia Moeda secara tegas mengakui Sumpah Pemuda, memajukan peradaban Indonesia, mengakui bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, dan bendera Merah Putih sebagai identitas organisasi. Secara resmi tidak berpolitik, tetapi bercita-cita menuju Indonesia merdeka.

7. Mesin Ketik milik RM. Soeryopranoto

RM. Soeryopranoto adalah seorang bangsawan Pakualaman, putra pertama dari KPH. Suryaningrat (putra Paku Alam III) yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1875 dengan nama kecil RM. Iskandar. Pada masa kecil dia mempunyai kebiasaan senang berkelahi. Sampai menginjak usia dewasa kebiasaannya tersebut masih terus dilakukan, sahingga kemudian ia terkenal dengan sebutan "Den Mas Iskandar Pendekar Jalanan". Kemudian dengan tubuhnya yang tegap tinggi dan besar, beliau mendapat julukan lagi "Den Mas Landung".

Dengan status keistimewaannya sebagai cucu seorang raja, RM. Soeryopranoto berkesempatan menempuh pendidikan formal di sekolah rendah Eropa atau *Europeesche Lagere School* (ELS). Lulus dari ELS kemudian meneruskan ke Klien Ambtenaren Cursus (Kursus Pegawai Rendah), dan setelah lulus ia diterima sebagai pegawai pada *Controleurs-kantoor* di Tuban Jawa Timur. Karena pernah menempeleng seorang *Controleur* Belanda, maka RM. Soeryopranoto dikeluarkan dan segera kembali ke Yogyakarta. Di Yogyakarta oleh pamannya KPH Suryokusumo diangkat sebagai Wedana Sentana Praja Paku Alaman dengan pangkat Panji dengan tugas mengurusi administrasi kerabat Paku Alaman. Selama di Yogyakarta, RM. Soeryopranoto mendirikan Mardi Kaskaya pada tahun 1900. Satu tahun kemudian juga mendirikan Societeit Soetrohardjo sebuah klub yang identik dengan sebuah kelompok belajar (*biblioteek*).

Oleh karena kiprah RM. Soeryopranoto ini, dia dipandang membahayakan oleh Belanda, sehingga dengan dalih melanjutkan pendidikan ke *Middlebare Londbouw School* (MLS) dia harus meninggalkan Yogyakarta dan pergi ke Bogor. Tahun 1907 pendidikan di MLS Bogor selesai dan RM. Soeryopranoto berhak atas *Landbouw Kundige* (Ahli Pertanian), dan *Landbouw Leerar* (Guru Pertanian). Dengan ijazah yang dimilikinya itu ia ditugaskan di Kejajar, Wonosobo sebagai *Lanbouw Consulent* (Kepala Dinas Pertanian).

Sewaktu di Wonosobo ini, RM. Soeryopranoto berhasil mendirikan SI (Sarekat Islam) dan dia sendiri menjadi anggota Komisaris Central Sarekat Islam (CSI). Pada tahun 1916, karena ada konflik dengan pejabat Belanda, RM. Soeryopranoto keluar dari pekerjaannya di Wonosobo, ia coba mendirikan Mardi kiswa, suatu koperasi petani, namun gagal. Ia lalu aktif dalam BO, dan menjadi pemimpin Adhi Dharma.

Adhi Dharma adalah organisasi para pangeran Pakualaman yang bertujuan meningkatkan kehidupan spiritual, moral, dan intelektual yang serasi. RM. Soeryopranoto berhasil mengubah organisasi itu dari sekedar klup para pangeran menjadi jaringan perlindungan yang diberikan oleh pangeran dan priyayi kepada bermacam-macam orang dan golongan masyarakat (*patronage*). Program dari Adhi Dharma ini adalah menolong kaum cacat, memberi pinjaman kepada yang memerlukan, memajukan perdagangan, dan mendirikan sekolah.

Pada bulan November 1918, RM. Soeryopranoto mempelopori berdirinya PFB (Personeel Fabrieks Bond). Selanjutnya pada bulan Februari 1919 terbentuk pengurus pusat PFB yang disebut Komite Sentral (*Centrale Comite*). Pengurus pusat ini terdiri dari RM. Soeryopranoto sebagai ketua, Soemodihardjo sebagai sekretaris, dan Soemoharjono sebagai anggota. Dalam waktu sebulan jumlah anggota telah mencapai 750 orang. PFB ini mampu mempengaruhi gerakan buruh pabrik diseluruh Jawa pada musim tebang dan giling tebu (April – Agustus). Pengaruh itu akibat kecenderungan melapor ke kantor pusat PFB setiap kali buruh di suatu pabrik hendak bergerak. Tuntutan mereka berkisar pada kenaikan upah, persamaan upah antara karyawan Eropa dan Bumiputera, peningkatan mutu lingkungan kerja, masa kerja delapan jam sehari, sehari libur yang dibayar dalam seminggu, dan upah lembur. Pada akhir tahun 1919, PFB menjadi organisasi buruh terbesar di Hinda-Belanda dengan 90 cabang, 10 ribu anggota di seluruh Jawa, satu surat kabar Boereh Bergerak, dan Soerjopranoto sebagai Si Raja Pemogokan. Perkembangan pesat dari PFB ini tidak dapat dilepaskan dari ketenaran seorang RM. Soeryopranoto yang waktu itu merupakan seorang komisaris CSI (Central Serikat Islam) dan juga Ketua SI (Sarekat Islam) Yogyakarta. Ia juga merupakan pemimpin Adhi Dharma, suatu paguyuban para pangeran. Dengan posisinya dan segala otoritasnya RM. Soeryopranoto mampu menggerakkan elemen-elemen yang dibawahnya untuk mendukung gerakan PFB. Ketika timbul kerusuhan buruh di pabrik gula Padokan Yogyakarta, RM. Soeryopranoto berhasil mendirikan "Tentara Buruh" (*Arbeidsleger*) yang juga disebut Prawiro Pandojo

Ing Joedo sebagai cabang dari Adhi Dharma. Oleh karena keberaniannya melakukan pemogokan, kemudian RM. Soeryopranata mendapat sebutan "de staking konig" yang berarti raja pemogokan.

Pada tanggal 15 Oktober 1954, R.M. Suryopranoto meninggal dunia dalam usia 88 tahun di rumah menantunya di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Dua hari kemudian yaitu tanggal 17 Oktober 1954, dengan diiringi ribuan pelayat, jenazah R.M. Suryopranoto dimakamkan di makam keluarga "Rachmat Jati", Kotagede, Yogyakarta. Upacara pemakaman jenazah R.M. Suryopranoto dilakukan secara militer sebagai seorang perwira tinggi.

Untuk menghargai jasa-jasanya dan perjuangannya dalam merintis kemerdekaan maka dengan Keputusan Presiden RI tanggal 30 November 1959, Nomor : 310, tahun 1959, R.M. Suryopranoto diangkat sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Sukarno menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Tingkat II kepada Almarhum R.M. Suryopranoto.

Mengingat benda tersebut memiliki nilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 2 Oktober 2002 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 591/SB/UPT/BD/02.X/2002, Mesin Ketik, udheng, piring dan sendok tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

8. Tombak dan Keris

Bangsa asing awalnya masuk ke nusantara dengan tujuan untuk berdagang. Namun, semakin lama niat tersebut berubah menjadi usaha untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara.

Perlawanan pun dilakukan oleh para raja-raja karena tindakan bangsa asing tersebut membuat penderitaan rakyat. Dengan persenjaraan yang sederhana seperti tombak dan keris, para raja dan rakyatnya melakukan perlawanan untuk mengusir bangsa asing. Tombak dan keris ini merupakan visualisasi senjata tradisional yang digunakan untuk melawan kolonialisme Belanda.

9. Replika bahan makanan pada masa pendudukan Jepang

Kemenangan tentara Jepang di Perang Pasifik menjadi jalan untuk memasuki negara-negara Asia, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Jepang menganggap dirinya saudara tua dan disambut gembira tetapi mengecewakan rakyat Indonesia. Alasan Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah dan alumunium. Diperkirakan, persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik.

Pada 8 Maret 1942, Jenderal Ter Poorten atas nama komandan pasukan Belanda di pihak Sekutu, menandatangani penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati, Subang. Peristiwa ini disebut Kapitulasi Kalijati, menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia.

Masa penjajahan Jepang merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Jepang menduduki Indonesia selama tiga setengah tahun yang membawa perubahan besar dengan membagi Indonesia menjadi tiga wilayah. Sumatra di bawah Angkatan Darat ke-25, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, dan Kalimantan serta Indonesia bagian Timur di bawah Angkatan Laut. Pada masa ini, Jepang mengubah sistem pemerintahan di Jawa dan Madura dengan membagi wilayahnya menjadi 17 Syuu (Karesidenan).

Berbagai cara dilakukan pemerintah Jepang untuk mencapai tujuannnya diantaranya mengenalkan varietasi padi dan tanaman baru, perubahan inovasi pertanian yaitu merubah dari sistem tradisional dengan sistem larikan, mengadakan propaganda baik melalui media, mengadakan perlombaan pertanian tanaman padi serta mendirikan sekolah pertanian, penggunaan pupuk kompos karena pupuk kimia sulit didapat. Dalam bidang perkebunan, pemerintah Jepang melakukan pengurangan areal tanaman perkebunan yang dianggap kurang bermanfaat seperti kopi dan dialihkan ke tanaman pangan dan juga tanaman kapas. Dengan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah pendudukan Jepang berdampak pada kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat yakni rakyat mengalami kemerosotan kemakmuran yang dilukiskan dengan rakyat mengalami kekurangan sandang dan pangan.

Benda-benda koleksi ini merupakan visualisasi beberapa bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat saat pendudukan Jepang. Kekurangan pangan mengakibatkan rakyat mengkonsumsi berbagai makanan alternatif bahkan diantaranya tidak pernah di konsumsi rakyat.

10. Ikrar Pengabdian KBI

KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) merupakan sebuah organisasi kepnaduan yang terbentuk pada tanggal 13 September 1930, dan merupakan bentuk baru hasil fusi dari organisasi Pandu Kenagsaan, Pandu Pemuda Sumatra, dan Indonesische Nationale Organitatie (INPO). Untuk memantapkan organisasi tersebut maka disusun ikrar yang menjadi acuan dan membangkitkan semangat anggota KBI.

Benda merupakan sumbangan dari Jawatan Penerangan DIY yang diserahkan kepada Musuem Perjuangan Yogyakarta pada 17 November 1961. Kemudian benda ini diserahkan kepada Museum Negeri Prop. DIY Sonobudoyo dan pada tanggal 5 September 1997 Ikrar Pengabdian KBI ini diserahkan kepada Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

11. Miniatur Kepanduan

a. Miniatur Pandu HW (Hizbul Wathan)

Sejalan dengan perkembangan sejarah yang terjadi, organisasi kepanduan tumbuh bersama dengan organisasi pergerakan. Setiap organisasi pergerakan baik itu yang berasaskan kebangsaan ataupun agama akan membentuk organisasi kepanduan yang bernaung dibawahnya. Pada tahun 1918 atas prakarsa KHA. Dahlan, Muhammadiyah mendirikan organisasi kepanduan yang bernaung dibawahnya dengan nama "Padvinders Muhammadiyah" di Yogyakarta. Organisasi ini dipimpin oleh Siraj tjilikDahlan dan Sarbini. Setelah berkembang selama dua tahun, kemudian tahun 1920 R.H. Hajid mengusulkan agar nama Padvinders Muhammadiyah diganti. Adapun nama yang diajukan adalah "Hizbul Wathan" yang kemudian disingkat dengan HW.

Pandu HW berseragam warna hijau muda kecoklatan dengan celana pendek sampai di bawah lutut terlipat keluar warna biru tua, memakai topi dari bambu warna coklat kehitaman, berkalung dook warna hijau bergambar lambang Muhammadiyah, mamakai kaos kaki panjang dan bersepatu.

b. Miniatur KBI

KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) merupakan sebuah organisasi kepanduan yang terbentuk pada tanggal 13 September 1930 dan merupakan bentuk baru hasil fusi dari Pandu Kebangsaan, Pandu Pemuda Sumatra (PPS) dan *Indonesische Nationale Organisatie* (INPO). Adapun para perintis berdirinya KBI adalah : dari PK terdiri dari Dr. Muwardi, Suratno, dan Sugandi. Dari INPO terdiri dari Suwarjo Tirtosupeno, Dr. Supardan, dan Pentor. Dari PPS terdiri dari Prof. Dr. Bhader Johan, Dr. Nazir, dan Dr. Syagaf. Pandu KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) berseragam baju warna hijau kecoklatan, dengan celana pendek warna sama dengan bajunya, memakai kaos kaki panjang, bersepatu, memakai topi terbuat dari bambu warna coklat tua, berkalung dook warna merah putih.

c. Miniatur Pandu Rakyat

Dalam rangka mewujudkan cita-cita persatuan, maka atas prakarsa KBI, pada akhir bulan April 1938 di solo diadakan pertemuan dengan mengundang beberapa pimpinan kwartir besar kepanduan lainnya. Dalam pertemuan tersebut dapat disetujui untuk mendirikan suatu badan untuk mengurus penyelenggaraannya, yang kemudian dikenal dengan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) yang berkedudukan di Solo.

Ketika bangsa Indonesia mengalami masa pendudukan Jepang, maka seluruh organisasi pergerakan, termasuk gerakan kepanduan dilarang mengadakan kegiatan. Kegiatan mereka lebih diarahkan pada kegiatan disiplin militerisme demi keuntungan Jepang. Sebagai gantinya akan muncul PETA, Heiho, Seinendan, maupun Keibodan. Api semangat kepanduan kembali muncul setelah Indonesia memasuki jaman kemerdekaan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada akhir bulan September 1945 di Gedung Balai Mataram Yogyakarta berkumpul berberapa pemimpin pandu dari KBI, HW, SIAP, NATIPIJ, Tri Dharma, Kepanduan Azaz Katolik Indonesia, dan Pandu Kasultanan. Dari perkumpulan itu berhasil memutuskan untuk : a). Membentuk Panitia kesatuan Kepanduan Indonesia. b). Menganjurkan pembentukan satu organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia, c). Membentuk satu Panitia Kerja untuk melaksanakan anjuran itu. d). Mengadakan secepat mungkin Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Selanjutnya Kongres Kepanduan Indonesia berhasil diselenggarakan di Surakarta tanggal 27 – 29 Desember 1945. Kongres dihadiri para mantan pemimpin kepanduan antara lain KBI, HW, SIAP, NATIPIJ, JPO, Kepanduan Azaz Katolik Indonesia, Teruna Kembang, Tri Dharma, Al Wathoni, Hizbul Islam, Sinar Pandu Kita, Kepanduan Rakyat Indonesia, Pandu Kasultanan, Pandu Indonesia dan Pandu Pasundan. Semuanya berjumlah kurang lebih 300 orang. Pada tanggal 28 Desember 1945, kongres memutuskan untuk membentuk organisasi kesatuan kepanduan dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Kongres juga memutuskan bahwa para mantan pimpinan KBI ditunjuk sebagai pengurus besar yang pertama. Merka adalah dr. Muwardi sebagai ketua, Hertog sebagai Komisaris Besar umum bagian putra, dan Ny. Suhariah sutarman sebagai komisaris umum bagian putri.

Pada upacara pelantikan yang dipimpin Dr. Muwardi para pemimpin pandu menyatakan ikrar bersama yang dinamakan "Panji Ikatan Sakti", yang bunyinya :

1) Melebur segenap perkumpulan kepanduan Indonesia dan dijadikan satu organisasi kepanduan Pandu Rakyat Indonesia.
2) Tidak akan menghidupkan lagi kepanduan yang lama
3) Tanggal 28 Desember diakui sebagai "Hari Pandu" bagi seluruh Indonesia.
4) Mengganti setangan leher yang beraneka warna dengan warna hitam.

Pandu Rakyat Indonesia yang didukung oleh segenap pemimpin pandu dan diikat kuat dengan "Janji Ikatan Sakti" diakui oleh pemerintah RI sebagai satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia. Pengakuan ini berdasarkan Keputusan Menteri PP dan K Nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947.

Pandu Rakyat berseragam baju warna hijau kecoklatan, dengan celana pendek warna sama dengan bajunya, memakai kaos kaki panjang, bersepatu, memakai topi dari bambu warna coklat tua, berkalung dook warna hitam berplisir ganda warna merah.

d. Miniatur Pramuka

Sementara itu ketika terjadi pengakuan kedaulatan RIS tanggal 27 Desember 1949, kemudian bentuk negara menjadi NKRI tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa itu demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi yang dipilih pemerintah. Partai-

partai berlomba mendapatkan kedudukan, percekcokan dan pertikaian muncul sebagai kembang-kembang sejarah. Hal ini ternyata memberikan dampak pula dalam perkembangan kepanduan di Indonesia. Organisasi kepanduan yang dulu dilebur kedalam satu organisasi yaitu Pandu Rakyat Indonesia, satu persatu mulai memisahkan diri.

Tanggal 8 Januari 1952 bekas pandu KBI putra dan putri Mataram berkumpul di Dalem Tegalrejo Yogyakarta untuk menyatakan berdirinya kembali KBI. Peristiwa ini kemudian diikuti oleh bekas pandu KBI di kota-kota lain, dan banyak diantara mereka yang menggabungkan diri dengan KBI cabang Yogyakarta (Mataram). Pada bulan Maret 1952 di Yogyakarta diselenggarakan kongres kilat KBI yang dihadiri para pimpinan KBI daerah. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk Pengurus Besar Sementara dan Menyusun pedoman kerja sampai pada kongres yang akan datang. Sebagai Ketua pengurus Besar dan Komisaris Besar Sementara dipilih Dr. Sahir Nitiharjo dan Hertog. Sejak itu tugas-tugas di cabang-cabang dipergiat termasuk Cabang KBI Mataram.

Pada pertengahan bulan September 1953 KBI berhasil mengadakan kongresnya yang pertama. Dalam kongres itu diputuskan mengesahkan Dr. Sahir Nitiharjo dan Hertog masing-masig sebagai Ketua Pengurus Besar dan Komisaris Besar KBI. Sewaktu KBI mengadakan ulang tahun ke 25, berhasil mendirikan pusat tempat latihan bagi calon pemimpin pandu. Pusat tempat latihan ini didirikan Di Babarsari Yogyakarta dan diresmikan tanggal 17 September 1955.

Tanggal 9 Maret 1961 pukul 20 para tokoh dan pimpinan pandu yang mewakili organisasi kepanduan yang ada di Indonesia berkumpul di Istana Merdeka untuk mendengarkan amanat Presiden Roekarno. Dalam amanat beliau memutuskan untuk mengambil tindakan tegas membubarkan semua organisasi kepanduan, untuk dilebur dalam satu organisasi baru yang bernama "Gerakan Pramuka". Gerakan Pramuka ini sebagai satu-satunya organisasi yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia.

Kemudian pada tanggal 30 Juli 1961 para wakil organisasi kepanduan termasuk KBI berkumpul di Istana Olah Raga Senayan Jakarta. Mereka bersama-sama dengan sukarela membuat pernyataan untuk meleburkan diri ke dalam satu organisasi kepanduan yang bernama Gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka. Tanggal 30 Juli 1961 kemudian disebut sebagai hari Ikrar Gerakan Pramuka. Selanjutnya baru pada tanggal 14 Agustus 1961 organisasi Gerakan Pramuka dengan resmi diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 14 Agustus ini kemudian disebut sebagai hari Pramuka.

Pramuka berseragam baju warna kuning kecoklatan, lengan baju bagian atas bertanda huruf Yogyakarta warna merah di atas dasar putih, dalam susunan melengkung, pada saku bajunya bertanda lambang Pramuka, memakai kaos kaki, memakai celana pendek warna coklat tua, memakai lambang Pramuka, berkalung dook warna merah putih berbentuk segitiga dalam lipatan.

12. Tugu KBI

Tugu KBI merupakan tanda atau peringatan peristiwa meleburnya organisasi kepanduan di Indonesia ke dalam satu wadah yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia, pada tanggal 13 September 1930 di Jakarta.

Dasar ide pendirian kepanduan diletakkan oleh Lord Robert Baden Powell of Gilwell, seorang bekas Jenderal Kolonial Inggris yang lama mengabdikan diri sebagai tentara kolonial Inggris. Menurutnya kepanduan adalah organisasi sport yang bersifat kemiliteran, organisasi pendidikan sosial dengan dasar humanisme yang bercita-cita persudaraan dan perdamaian.

Berbeda dengan kepanduan yang ada di Indonesia pada awal-awal berdirinya. Kepanduan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pergerakan nasional pada umumnya dan pergerakan pemuda pada khususnya. Organisasi kepanduan waktu itu lebih cenderung menjadi objek pendidikan bagi organisasi perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia.

Munculnya organisasi kepanduan di Indonesia ditandai dengan adanya sebuah organisasi kepanduan yang ditujukan untuk para pemuda dan remaja Belanda di Indonesia. Organisasi tersebut adalah cabang dari *Nederlands Padvinderij Organisation* (NPO) yang didirikan pada tahun 1912 oleh PJ. Smits dan Mayor De Yager. Akibat meletusnya Perang Dunia I, hubungan Indonesia Belanda menjadi terputus, sehingga cabang NPO di Indonesia pada tanggal 4 September 1914 diberi wewenang untuk berdiri sendiri, sehingga berdirilah *Nederlandsche Indische Padvinderij Vereeniging* (NIPV).

Berdirinya NIPV memberikan inspirasi kaum bumi putera untuk membentuk organisasi kepanduan. Oleh karena itulah maka pada tahun 1916 atas prakarsa KGPAA Mangkunegoro VII di Surakarta didirikan organisasi kepanduan nasional yang pertama dengan nama *"Javaansche Padvinderij Organisatie"* atau JPO, yang kemudian segera disusul dengan berdirinya organisasi "Teruna Kembang" di daerah kasunanan dibawah pimpinan Pangeran Suryobroto.

Dengan banyaknya berdiri organisasi kepanduan Belanda, maka organisasi kepanduan kolonial Belanda memandang perlu dibentuk sebuah organisasi kepanduan yang mampu menghimpun kepanduan anak Belanda. Organisasi itu diberinama *"de Nederlands Indische padvinders Organisatie"* atau NIPO. Organisasi ini merupakan bagian dari organisasi kepanduan di negeri Belanda, yaitu *"Nederlandsche – Padvindery"* atau NP. Akan tetapi keberadaan organisasi itu tidak menjadi penghalang berdirinya organisais kepanduan Indonesia. Bahkan setiap organisasi pemuda maupun organisasi pergerakan nasional dalam perkembangannya mempunyai organisasi kepandauan. Dengan demikian menjamurlah organisasi-organisasi kepanduan yang tumbuh bersama organisasi pemuda dan pergerakan nasional sebagai naungannya

antara lain : Kepanduan Jong Java yang kemudian diberinama *"Jong Java Padvindery"* atau JJP yang pada tahun 1928 menjadi "Pandu Kebangsaan". Pada tahun 1918 atas inisiatif KHA. Dahlan organisasi Muhamaddiyah mendirikan organisasi kepanduan dengan nama "Padvinders Muhamaddiyah" yang kemudian tahun 1920 diganti menjadi "Hizbul Wathan". Dari SI muncul "Sarekat Islam Afdeeling Padvindery" atau SIAP yang pada kongresnya tanggal 2 – 5 Februari 1928 namanya diubah Serikat Islam Afdeeling Pandu (Serikat Islam Bagian Pandu). Tahun 1924 dari PKI juga muncul organisasi kepanduan yang diberinama "International Padvinder Organisasi" atau IPO di Semarang. Dari Jong Islamieten Bond muncul *"Nasionale Islamietische Padvindery"* atau NATIPY. Dari *Algemeene Studi club* muncul *Nasional Padvinders Organisatie* (Organisasi Pandu Nasional) yang kemudian disingkat NPO. Dari Boedi Oetomo muncul *Nasional Padvinderij* (Kepanduan Nasional), sedangkan dari Tamansiswa berdiri organisasi kepanduan Siswo Projo. Organisasi kepanduan lain yang berasaskan agama antara lain Kepanduan al Irsyad, Tri Dharma (dari Kristen), Kepanduan Azas Katolik (dari Katolik), dan Al Kasjaaf van Wal Fadjrie.

Perkembangan tersebut menunjukkan betapa besar antusias para pemuda untuk mendirikan organisasi kepanduan. Sejalan dengan perkembangan kesadaran nasional, dipandang perlu untuk dibentuk sebuah badan untuk mengkoordinasi berbagai organisasi kepanduan tersebut. Oleh karena itulah maka pada tahun 1927 dibentuk badan federasi antara organisasi kepanduan Indonesia yang diberi nama "Persaudaraan Antar Pandu Indonesia" atau PAPI yang dipimpin oleh Mr. Sunario. Beberapa organisasi kepanduan yang menjadi anggota PAPI antara lain : IPO, JJP, NATIPIJ, SIAP, Al Kasjaaf van Wal Fidjrie, *Nationale Padvinderij*, dan Siswo Projo. Sedangakan HW tidak masuk.

Kesadaran nasional untuk mempersatukan semua organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan berlangsung dengan sukses. Perkembangan tersebut memberikan inspirasi bagi organisasi kepanduan untuk menyatukan diri dalam organisasi kepanduan nasional. Untuk mencapai maksud tersebut maka pada tanggal 15 Desember 1929 di Jakarta dilangsungkan sebuah konferensi yang dihadiri oleh pimpinan pusat berbagai organisasi kepanduan yang ada. Dalam konferensi itu Pandu Kebangsaan (PK) yang dipimpin Dr. Muwardi mengusulkan supaya diadakan fungsi oleh semua organisasi kepanduan untuk mewujudkan satu organisasi kepanduan Indonesia. Oleh karena tidak semua yang hadir dapat menyetujui maka diambil kesimpulan untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang berazaskan kebangsaan, dan yang berazazkan agama (Islam). Pandu-pandu kebangsaan dari Jong Java, *Indonesische Nasional Padvinder Organisatie* dan Pandu Indonesia, pandu Pemuda Sumatra dari Jong Sumatra sepakat untuk berfusi. Untuk selanjutnya pada bulan Februari 1930 terbentuklah komisi untuk mempersiapkan fusi.

Sesuai dengan semangat persatuan, maka pada tanggal 13 September 1930, atas prakarsa "Pandu Kebangsaan" di Jakarta lahirlah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). KBI

merupakan peleburan dari Pandu Kebangsaan, Pandu Pemuda Sumatra (PPS) dan *Indonesische Nationale Organisatie* (INPO). Adapun para perintis berdirinya KBI adalah : dari PK terdiri dari Dr. Muwardi, Suratno, dan Sugandi. Dari INPO terdiri dari Suwarjo Tirtosupeno, Dr. Supardan, dan Pentor. Dari PPS terdiri dari Prof. Dr. Bhader Johan, Dr. Nazir, dan Dr. Syagaf.

Sedangkan organisasi yang berasaskan Islam tidak turut bergabung mengadakan fusi, tetapi kemudian membentuk Federasi Kepanduan Islam. Organisasi kepanduan yang masuk dalam federasi ini antara lain Hizbul Wathan dari Muhamaddiyah, SIAP dari SI, NATIPIJ dari *Jong Islamieten Bond* dan Al Kasjaf Wal Fadjri. Sedangkan kepanduan Siswo Projo dari Tamansiswa tetap berdiri sendiri.

KBI berasas kebangsaan, tidak berhaluan politik dan tidak menjadi bagian dari suatu partai. Namun demikian KBI tidak melarang pandu-pandunya yang telah berusia 18 tahun, ikut dalam pergerakan politik di luar kepanduan.

Adapun tujuan dari KBI antara lain : a) Ikut serta mendidik putra dan putri Indonesia supaya menjadi warga negara yang sehat, bahagia dan berguna bagi nusa dan bangsa. b) Mempersatukan kepanduan yang berasaskan kebangsaan dan bersama-sama dengan organisasi kepanduan lain mengurangi rasa kedaerahan c) Meluaskan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sampai seluruh pelosok wilayah Indonesia, sera memberi dasar perjuangan kemerdekaan dari bangsa Indonesia, dan d) Menghasilkan tenaga yang sanggup memikul kewajiban yang berat untuk kepentingan bangsa dan tanah air sebelum dan sesudah Indonesia merdeka.

Sebagai pengurus besar KBI yang pertama adalah :

Ketua	: Suwarjo Tirtosupono
Wakil Ketua I	: Suratno Sastroamijoyo
Wakil Ketua II	: Bahder Johan
Penulis Umum	: Sugandhi Pringgiatmojo
Penulis II	: Kuncoro Purbopranoto
Bendahara	: Sukarman Kartorejo
Pembantu	: Patah, Hendrosartono dan Kustio

Sedangkan pengurus Kwartir Besar KBI terdiri dari :

Komisi Besar	: Muwardi
Ajun Komisaris Besar	: Sunarjo Atmodipuwo
Penulis	: Suardiman
Komisaris Penuntun	: Surip Suwowidagdo
Komisaris Pandu	: Abdul Aziz Saleh
Komisaris Pandu Muda	: Santo
Komisaris Go. Putri	: Ny. Suratman, Ny. Suratmi, Saleh, Aminah, Sunarti dan Prabandari
Pembantu untuk kursus-kursus	: Santoso

Kemudian pada bulan September 1930 di Yogyakarta berdiri KBI Cabang Yogyakarta, adapun pengurus Kwartir Cabang Mataram terdiri dari :

Ketua	:	Hertog
Bendahara	:	Ruswo
Komisaris Pandu Muda	:	Samsu
Komisaris Golongan Pandu	:	Deblod Sundoro
Komisaris Golongan Penuntun	:	Supeno
Komisaris Golongan Putri	:	Peni Sundoro

Sejak KBI Cabang Mataram berdiri, selalu mengikuti program-program yang disusun dari pusat. Selain dari itu KBI Cabang Mataram juga mengadakan program kegiatan sendiri antara lain setiap hari Sabtu sore dan Minggu pagi mengadakan latihan seperti baris-berbaris, menyanyi, ketrampilan dan sebagainya. Sedang untuk Minggu sore dipergunakan untuk kursus para kelapa regu. Keculai itu, pada setiap Minggu sore juga diadakan rapat dewan pimpinan cabang. Untuk sebulan sekali KBI Cabang mataram mengadakan latihan bersama dari ketujuh kelompok (regu) KBI cabang Mataram yang disebut algemene oefening. KBI Cabang Mataram mempunyai tujuh kelompok, yaitu : Kelompok I Bumijo, Kelompok II Baciro, Kelompok III Joyodipuran, Kelompok IV Kuncen, Kelompok V Klitren, Kelompok VI Jetis, Kelompok VII Bausasran. Dari kelompok-kelompok tersebut yang paling disegani adalah kelompok Bumijo dan mendapat sebutan amstrotp. Hal ini disebabkan anggotanya sebagian besar adalah para siswa AMS.

Pada akhir bulan Desember 1930, KBI mengadakan kongres pertamanya di Ambar Binangun, Yogyakarta. Kongres itu juga dikenal sebagai Jambore Nasional KBI Pertama. Kongres KBI pertama ini dihadiri oleh 38 cabang atau 2/3 dari serluruh cabang yang berjumlah 57 buah. Dari 38 cabang KBI yang hadir dalam kongres hanya 15 cabang yang telah diakui syah sebagai cabang KBI. Cabang lainnya belum karena syarat-syarat untuk diakui belum lengkap. Adapun ke 15 cabang KBI itu adalah Jakarta, Surabaya, Bogor, Mataram, Solo, Semarang, Salatiga, Magelang, Purworejo, Madiun, Kediri, Malang, Tabanan (Bali), Bakupai (Kalimantan), dan Bukit Tinggi (Sumatra). Waktu itu utusan KBI Mataram (Yogyakarta) adalah Darmosugito, Hertog, Ruswo, dan Peni Sundoro.

Kongres KBI pertama ini dipimpin oleh Suwarjo Tirtosupono dan Muwardi, masing-masing sebagai Ketua Pengurus Besar dan Komisaris Besar. Titik berat pembicaraan dalam kongres tersebut mengenai perumusan peraturan yang sudah ada dan berasal dari ketiga organisasi kepanduan yang telah menjadi satu untuk dipakai sebagai pedoman kerja KBI. Ketika kongres tersebut akan berakhir, tiba-tiba daerah sekitar Muntilan tertimpa bencana alam meletusnya gunung Merapi. Saat itu KBI segera mengerahkan pandunya untuk mengurangi penderitaan para korban. Dalam musibah tersebut KBI Mataram mengerahkan anggotanya untuk membantu masyarakat yang terkena musibah.

13. Pakaian Pandu Mataram bagian wanita

Pakaian Pandu Mataram bagian wanita ini adalah milik RR. Soetimah, seorang anggota Pandu Mataram yang dipakainya dalam mengikuti PERKINO I di Yogyakarta. Waktu itu berada dibawah ketua PKP Hitam Merah yang bernama Djokowaluyo.

Pandu Mataram adalah merupakan nama lain yang dipakai oleh anggota KBI Cabang Yogyakarta. KBI Cabang Yogyakarta berdiri pada bulan September 1930. Sebagai ketua KBI Cabang Mataram (Pandu Mataram) adalah Hertog. Sejak Pandu Mataram berdiri maka kegiatannya selalu mengacu pada program KBI pusat. Dalam perkembangannya Pandu Mataram dibagi menjadi 7 kelompok atau Regu yang terdiri dari Kelompok I Bumijo, Kelompok II Baciro, Kelompok III Joyodipuran, Kelompok IV Kuncen, Kelompok V Klitren, Kelompok VI Jetis, Kelompok VII Bausasran. Di dalam kelompok-kelompok itu terdapat juga bagian putri.

Pada tanggal 11 Pebruari 1941 BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) mengadakan koferensi di Solo. Dalam konferensi tersebut diputuskan bahwa Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem (PERKINO) Pertama akan diselenggarakan pada tanggal 19 – 23 Juli 1941. Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan adalah di Lapangan Kuncen Yogyakarta. Adapun yang ditunjuk sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan ini adalah KBI Mataram beserta Badan Persaudaran Kepanduan Mataram yang diketuai oleh Dr. Martohusodo. Adapun susuan pengurus penyelenggara Perkino I adalah sebagai berikut :

Pengayom	: BPH. Suryodiningrat
Ketua Mulya	: RMAA. Condroadikusumo
Majelis Pengetua	: Ki dan Nyi Hadjar Dewantara
Ketua	: Dr. R. Riyo Martohusodo
Wakil Ketua	: RT. Sastroseutro
Sekretariat	: RL. Kuwakno, Sutomo, Sumantoro, Wijokongko
Bendahara	: Ny. Samsudin, Dr. S.M. Samsudin, Bawuk, Ibnu Buldan.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 30 Desember 2004 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 745a/SB/UPT/KKP/XII/04, pakaian pandu mataram putri tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

14. Perlengkapan Ir. Soekarno Ketika Berada di Rengasdengklok

Barang-barang yang terdiri dari tempat tidur, meja dan kursi, peralatan minum adalah merupakan perlengkapan yang dipergunakan oleh Bung Karno ketika sedang berada di Rengasdengklok.

Pada saat bangsa Indonesia sudah menyelesaikan rumusan dasar Negara Indonesia merdeka, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Hampir seluruh

wilayah yang diduduki Jepang di Asia Tenggara jatuh ke tangan Sekutu. Birma jatuh ke tangan Laksamana Mountbatten. Papua Nugini dan Filipina jatuh ke tangan Jenderal Doughlas Mac Arthur. Wilayah Indonesia, yang merupakan wilayah satu-satunya di luar Jepang yang belum jatuh, sudah dibombardir Sekutu. Wilayah Jepang sendiri tidak lepas dari serangan Sekutu. Saipan yang berjarak hanya 2.000 mil dari Tokyo jatuh ke tangan Sekutu setelah pertempuran sengit dengan memakan banyak korban. Entah dengan alasan ingin mempercepat berakhirnya perang atau menguji senjata baru, pada hari Senen, 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, salah satu basis militer Jepang, dibom atom oleh pesawat pembom Amerika Serikat B – 29 Enola Gay. Hanya dalam waktu 43 detik, kota Hiroshima rata dengan tanah. Sebanyak 60.000 orang tewas seketika, 100.000 luka berat, dan sisanya luka ringan. Termasuk yang tewas dan luka berat adalah 40.000 tentara infanteri yang berpangkalan di Chugako, Hiroshima.

Setelah pemboman mengerikan itu, Jepang menawarkan perdamaian dengan Sekutu, tetapi Sekutu hanya mau Jepang menyerah tanpa syarat. Kalau tidak, bom atom kedua akan dijatuhkan di Jepang. Bom kedua dijatuhkan di Nagashaki dan membunuh ribuan orang hanya dalam tempo sekejap.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan jatuhnya bom di kota Nagashaki, Sukarno, Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Saigon atas undangan Jenderal Terauci. Dalam pertemuan itu Jenderal Terauci menyatakan bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia yang dimaksud meliputi bekas Hindia Belanda.

Hanya selang sehari setelah kepulangan Sukarno. Mohammad Hatta, dan dr. Radjiman dari Saigon, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Sutan Syahrir, yang mendengar berita penyerahan itu, termasuk tokoh pertama yang mendesak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno dan Mohammad Hatta tanpa melalui PPKI. Ia berpendapat bahwa hanya Sukarno yang mempunyai cukup pengaruh pada rakyat Indonesia. Proklamasi oleh orang lain tidak akan berarti. Hatta berpendapat proklamasi dengan atau tanpa PPKI, Belanda tetap akan mencapnya kolaborator. Sukarno dan Mohammad Hatta ingin mengecek kebenaran berita tersebut kepada Gunseikan. Akan tertapi yang berhasil ditemuinya hanya seorang wakil Gunseikan, sedangkan Gunseikan-nya sendiri sedang tidak di tempat, sehingga tidak bisa memastikan kebenaran berita itu. Selanjutnya Sukarno dan Mohammad Hatta didampingi Ahmad Subardjo menemui kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Namun Maeda pun menyatakan bahwa berita tersebut belum bisa dikatakan benar karena belum diperoleh berita dari Tokyo.

Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai proklamasi kemerdekaan telah mendorong golongan pemuda membawa Sukarno dan

Mohammad Hatta ke Rengasdengklok. Tindakan ini berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan pemuda menjelang pukul 24.00 tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, jalan Cikini 71. Rencana berjalan lancar karena mendapat bantuan dari Cudanco Latief Hendraningrat yang saat itu menggantikan Cudanco Kasman Singodimejo. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 04.00 WIB, Sukarno dibawa ke Rengasdengklok di sebelah Utara Karawang Jawa Barat oleh Sukarni, Muwardi, dan Yusuf Kunto dengan pengawalan Shodancho Singgih dengan membawa regu tentara PETA, dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Sementara itu Ibu Fatmawati dan Guntur Sukarno juga turut dibawa keluar kota.

Rengasdengklok dipilih untuk mengamankan Sukarno – Hatta karena perhitungan Militer. Antara anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan yang erat semenjak mereka mengadakan latihan bersama. Selain itu, Rengasdengklok letaknya terpencil 15 km ke dalam dari Kedung Gede, Karawang pada jalan raya Jakarta – Cirebon. Dengan demikian dapat dideteksi dengan mudah setiap gerakan tentara Jepang yang datang ke Rengasdengklok. Baik yang datang dari Jakarta maupun dari Bandung ataupun dari Jawa Tengah.

Pertimbangan lain tentang Rengasdengklok bahwa Daidacho Suryoputra di Rengasdengklok adalah seorang daidancho yang dapat dipercaya dan tentu akan membantu gerakan kemerdekaan. Komandan PETA Chuudan di Rengasdengklok sudah dikenal oleh mahasiswa sebagai chuudancho yang dapat dipercaya ialah saudara Soebeno dan Umar Bahsan. Juga Asisten Wedana Rengasdengklok yang bernama Soejono Hadipranoto adalah bekas pimpinan BAPERPI yang juga adalah pejuang kemerdekaan sejak Sekolah Tinggi Kehakiman.

Semula di Rengasdengklok Sukarno – Hatta ditempatkan di markas Tentara Peta. Namun karena dipandang tempatnya tidak layak maka Sukarno – Hatta dipindahkan ke rumah seorang Tionghoa bernama Djiaw Kie Siong yang terletak di sisi sungai Citarum. Barang-barang yang terdiri dari meja dan kursi, tempat tidur, seperangkat alat minum yang dipakai oleh Bung Karno – Hatta ini adalah milik Djiaw Kie Siong.

15. Klise mata uang ORI dan uang ORI

Klise mata uang ORI (Oeuang Repoblik Indonesia) merupakan perangkat pencetakan mata uang di Yogyakarta yang waktu itu berpusat di Percetakan Kanisius Jalan Gondomanan Yogyakarta selama tahun 1947 – 1949.

Meski dalam mata uang ORI tercantum tanggal 17 Oktober 1945, namun secara defacto mata uang resmi pemerintah RI baru terbit empat bulan setelah proklamasi. Dalam catatan sejarah, tertulis bahwa pada tanggal 30 Oktober 1946 adalah awal penerbitan mata uang RI, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Keuangan. Waktu itu wakil presiden RI Drs. Mohamadd Hatta di depan corong RRI Yogyakarta mengantarkan lahirnya uang kertas RI yang menggantikan uang Jepang dan uang de Javaasche Bank.

Emisi pertama uang keras RI ini terdiri dari pecahan 1, 5, 10, dan 50 sen. Kemudian 1, 5, 10 dan 100 rupiah. Semuanya ditandatangani oleh menteri keuangan RI Mr. A.A. Maramis. Pada pecahan 1 sampai 10 rupiah bergambar wajah presiden Soekarno. Uang RI ini disebut ORI (Oeang Repoeblik Indonesia).

Pada masa awal proklamasi kemerdekaan yang dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah adalah uang kertas Jepang. Meski demikian uang pemerintah Belanda masih tetap beredar. Uang pendudukan Jepang di Indonesia terdiri dari macam :

a. Uang yang sudah dipersiapkan sebelum Jepang menguasai Indonesia. Uang ini menggunakan bahasa Belanda, De Japanesche Regeering, dengan satuan gulden, emisi 1942, berkode "S" (untuk di Indonesia). Sedang untuk Semenanjung Malaya berkode "M" dengan satuan dollar, di Philipina berkode "P" dengan satuan pesos, di Birma berkode "B" dengan satuan rupee, di Oceania berkode "O" dengan satuan Shilling.
b. Uang yang menggunakan bahasa Indonesia, Pamerintah Dai Nipon, emisi 1943 dalam pecahan bernilai 100 rupiah saja, karena pecahan bernilai 1.000 yang sudah dicetak ternyata tidak sempat beredar.
c. Yang menggunakan bahasa Jepang, Dai Nippon Teikoku Seibu, emisi tahun 1943, antara lain bergambar Gatotkaca dalam pecahan 10 rupiah, rumah gadang dalam pecahan 5 rupiah

Ketika Sekutu datang ke Indonesia menggantikan tentara pendudukan Jepang, mereka diboncengi oleh NICA dibawah pimpinan HJ. Van Mook. Komandan Sekutu melarang anggotanya menerima uang Jepang, dan sebagai gantinya mengedarkan uang NICA (Netherlands Indies Civil Amdministration), yang dicetak di Australia tahun 1943 bergambar Ratu Wilhelmina Uang ini kemudian dikenal dengan "Uang Merah". Sisa pemerintah Belanda dalam pengasingan di Australia 1942-1945 memang mempersiapkan diri kembali ke Indonesia setelah Jepang meninggalkan RI.

Waktu itu memang RI belum mampu mencetak uang sendiri, maka melalui Maklumat Presiden RI no. 1/10, tanggal 3 Oktober 1945, menetapkan untuk sementara berlaku tiga jenis mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu Uang De Javasche Bank, Uang Pemerintah Hindia Belanda, dan uang pendudukan Jepang.

Tanggal 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan RI, Mr. A.A. Maramis, menginstruksikan Tim Serikat Buruh Percetakan G. Kolf Jakarta selaku Tim Pencari Data, untuk menemukan tempat percetakan uang. Hasilnya Percetakan G. Kolf Jakarta yang waktu itu dikuasai oleh serikat buruhnya dan Percetakan Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) di Kendalpayak Malang (Jawa Timur), dianggap memenuhi syarat.

Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusannya no. 3/RD, tanggal 7 Nopember 1945, menetapkan pembentukan Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik

Indonesia. Panitia diketuai oleh T.R.B. Sabarudin (kantor Besar Bank Rakyat Indonesia), dan beranggotakan H.A. Pandelaki (Kementrian Keuangan), M. Tabrani (Kementrian Penerangan), S. Sugiono (Bank Rakyat Indonesia), E. Kusnadi (Kas Negara), R. Aboebakar Winangoen (Kementrian Keuangan), Oesman dan Aoes Soerjatna (keduanya mewakili Serikat Buruh Percetakan). Pembuatan desain dan bahan-bahan induk berupa negatif kaca dilakukan percetakan Balai Pustaka Jakarta dan ditangani oleh Bunyamin Surjohardjo. Pelukis pertama ORI adalah Abdulsalam dan Soerono. Proses cetak offset dilakukan di Percetakan RI Salemba Jakara (dibawah kementrian Penerangan). Produksi ORI ditangani oleh R.A.S. Winarno dan Joenet Ramli. Pencetakan dilakukan setiap hari dari pukul 07.00 pagi sampai 10.00 malam, sejak Januari 1946.

Pada bulan Mei 1946, pencetakan uang ORI di Jakara terpaksa dihentikan. Pekerjaan besar itu dipindahkan dan dilanjutkan ke daerah pedalaman Republik, yang tersebar di kota-kota Yogyakarta, Surakarta, Malang dan kemudian di Ponorogo, dengan memanfaatkan berbagai percetakan swasta yang relatif modern di masa itu. Akhirnya kerja keras itu menghasilkan buahnya pada tanggal 30 Oktober 1946, yaitu diterbitkannya emisi pertama uang kertas ORI. Adapun pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia disampaikan sendiri oleh Wakil Presiden Moehammad Hatta, pada malam hari sebelumnya. Adapun dasar hukum penerbitan ORI ini adalah:

a. Undang-undang no. 17/1946 tanggal 1 Oktober 1946 tentang pengeluaran ORI.
b. Undang-undang no. 19/1946 tanggal 19 Oktober 1946 tentang nilai tukar 1 rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang di pulau Jawa, atau 100 rupiah uang Jepang di pulau Sumatra.
c. Keputusan Menteri Keuangan RI no. Ss/1/35 tanggal 29 Oktober 1946 tentang berlakunya secara sah ORI sejak 30 Oktober 1946 pukul 00.00, serta jangka waktu penarikan uang Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang dari peredaran.

Sementara itu, ketika tentara Sekutu masih melaksanakan tugas di Indonesia, Panglima Sekutu Sir Montagne Topford, pada tanggal 6 Maret 1946, mengumumkan bahwa hanya uang NICA saja yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah pendudukan Sekutu. Oleh karena itu ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, tanggal 21 Juli 1947, Belanda hanya tinggal melanjutkan kebijakan Sekutu tersebut. Meski demikian ORI tetap saja memasuki daerah pendudukan Belanda, mengingat daerah tersebut juga memerlukan kebutuhan pokok yang harus dibeli dengan ORI. Waktu itu TNI mempertaruhkan ORI untuk melawan uang NICA.

Sejak Oktober 1946 sampai dengan Desember 1949, pemerintah RI melakukan emisi uang kertas ORI sampai dengan lima kali. Emisi pertama, telah dijelaskan dimuka. Emisi kedua, ditanda tangani oleh Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara, di Yogyakara tanggal 1 Januari 1947. Emisi ketiga, ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis, di Yogyakarta tanggal 26 Juli 1947. Emisi keempat, ditanda tangani oleh Menteri Keuangan ad interim Dr. Mohammad Hattak di Yogyakarta tanggal 23 Agustus 1948. Beberapa nilai nominal seri ini memiliki keunikan, yaitu 40, 75, 400 dan

600 rupiah, tetapi yang 6000 rupiah belum sempat diedarkan. Ada kesan kuat bahwa hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan susunan peringkat nilai uang yang pernah ada. Emisi kelima, ditandatangani oleh Menteri Keuangan Lukman Hakim, di Yogyakarta tanggal 17 Agustus 1949, dengan kata-kata Rupiah Baru. Dari emisi kedua sampai dengan ke lima dicetak di Percetakan Kanisius Jalan Gondomanan Yogyakarta.

Selain ORI, dikenal pula adanya ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah), yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah tingkat propinsi, karesidenan dan bahkan kabupaten semasa perang kemerdekaan 1947 – 1949. Terbitnya ORIDA atas izin pemerintah pusat RI guna memecahkan dan mengatasi kekurangan uang tunai di daerah akibat terputusnya komunikasi normal antara Pussat dan Daerah karena pendudukan Belanda dalam agresi militer Belanda pertama (21 Juli 1947) dan kedua (19 Desember 1948).

Ketika agresi militer Belanda II yang berhasil menduduki ibukota RI dan menangkap para pemimpin RI, pemerintahan tetap berjalan dibawah PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di bawah Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra Barat. Waktu itu masalah pencetakan uang ORI dipedalaman tetap berjalan dibawah pengawasan Menteri Keuangan PDRI yaitu Dr. Lukman Hakim. Ketika "Yogya telah Kembali" tanggal 29 Juni 1949 setelah tentara pendudukan Belanda ditarik dari Yogyakarta, maka pada tanggal 1 Juli 1949 Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Menteri Negara / Koordinator Keamanan menetapkan ORI masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah disamping uang NICA yang beredar di daerah pendudukan. Berdasarkan pengamatan selama masa revolusi fisik tahun 1945 – 1949, Prof. Dr. J.K. Gailbraith seorang ahli dari AS mengatakan bahwa uang ORI adalah an instrument of revolution atau suatu alat revolusi.

16. Meja Guru Militer Akademi Yogyakarta

Meja ini merupakan meja yang dipergunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar di Militer Akademi Yogyakarta, tepatnya yang dipakai sebagai meja guru (pengajar / instruktur). Meja ini punya peran yang cukup besar dalam membentuk kader pucuk pimpinan dalam jajaran TNI.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 berdirilah TKR (Tentara Kamanan Rakyat) sebagai peleburan dari BKR. Dalam sidangnya tanggal 15 Oktober 1945 di Jakarta kabinet memutuskan bahwa markas besar umum TKR berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai kepala staf umum ditunjuk Oerip Soemohardjo dengan pangkat Letnan Jenderal. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945 (dua minggu setelah menjabat Kepala Staf Umum TKR), Letjen Oerip Soemohardjo memerintahkan untuk membentuk akademi militer nasional. Dalam hal ini yang ditunjuk oleh Letjen Oerip Soemohardjo adalah Samidjo Mangoenwirono (bekas Letnan KNIL). Segala perangkat yang diperlukan harus dicari sendiri.

Sebagai direktur Militer Akademi Yogyakarta adalah Mayor Jenderal R. Memet Rachman Ali Soewardi (mantan Kapten KNIL). Dan Kolonel Samidjo Mangoenwirono sebagai wakil. Ketika Kolonel Samidjo Mangoenwirono harus memimpin sekolah kader militer di Gombong, kedudukan wakil direktur militer akademi dijabat oleh Wardiman Wirjosapoetro.

Sebagai tenaga-tenaga instruktur di MA Yogyakarta antara lain Kapten Sukirdjan, Kapten R. Ismail, Kapten Setiaji, Kapten Moch Nor dan Kapten Soekasno. Di samping itu masih ada penambahan tenaga medis yang sudah lama dikenal di kalangan para pejuang antara lain Kapten dr. Ibrahim Ichsan dan Kapten dr. Singgih.

Pengumuman pembukaan MA Yogyakarta diterbitkan tanggal 31 Oktober 1945 (kemudian menjadi hari berdirinya MA Yogyakarta), dan dipancarluaskan melalui RRI Yogyakarta selama 3 hari berturut-turut. Harian Kedaulatan Rakyat juga memuat pengumuman dan panggilan yang ditandatangani langsung oleh Letjen Oerip Soemohardjo tanggal 1 November 1945. Pendaftaran ditutup tanggal 7 November 1945.

Syarat untuk memasuki MA Yogyakarta ini adalah pemuda Indonesia yang bersemangat kemerdekaan, minimal lulus SR (setingkat SD) bagi pendidikan kader dan lulusan Sekolah Menengah untuk MA. Lama pendidikan adalah 2 bulan baik untuk MA dan Kader. Setelah lulus dari MA berpangkat Letnan Dua dan dari Kader berpangkat Sersan Dua. Kemudian lama pendidikan ditambah untuk MA diperpanjang sampai tiga tahun dan untuk Kader diperpanjang sampai enam bulan.

Sebagai tempat dilaksanakannya proses pendidikan MA Yogyakarta adalah di Gedung Christelijk Mulo Yogyakarta (Sekarang SMU BOPKRI I Kotabaru, Yogyakarta). Di gedung itulah dididik para siswa Militer Akademi dan Sekolah Kader.

Pada tanggal 19 Oktober 1948 direktur MA Mayor Jenderal R. Memet Rachman Ali Soewardi digantikan oleh Kolonel Gusti Pangeran Haryo (GPH) Djati Koesoemo.

Pada pembukaan angkatan I, bulan November 1945 dari 3.502 pendaftar diterima 442 orang. Tersaring dalam wisudawan I tahun 1948 berjumlah 198 orang yang diwisuda pada tanggal 28 Nopember 1948 di halaman Istana Presiden Yogyakarta (Gedung Agung) oleh Presiden Soekarno. Lima orang wisudawan yang waktu itu mendapat prestasi tertinggi antara lain Letnan Dua Kun Suryatjojo, Letnan Dua Subroto, Letnan Dua Sayidiman, Letnan Dua Utoyo Notodirdjo dan Letnan Dua Susilo Sudarman.

Angkatan II yang dibuka tahun 1946 dari 400 pendaftar diterima 150 orang. Jumlah itu bertambah dengan diintegrasikannya Sekolah Kader Malang ke MA Yogyakarta. Dari jumlah yang ada berhasil diwisuda sebanyak 156 orang dalam tiga kali upacara. Satu kali di Yogyakarta yaitu tahun 1949 dan dua kali di Jakarta tahun 1950. Tahun 1957 kemudian menjelma menjadi Akademi Militer Negara (AMN) di Magelang. Tahun 1966 berintegrasi dengan akademi angkatan yang lain menjadi satu dengan nama AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 17 Desember 1991 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 298/BVY/XII/U.91, meja guru tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta bersama dengan meja siswa lainnya.

17. Perlengkapan milik Sdr. Tjilik pejuang dari Bali

Perlengkapan milik pejuang dari Bali yang bernama Tjilik terdiri dari tongkat, bumbung, perples, cangkir bambu, senter, ikat pinggang rotan, dan dokumen perjuangan. Barang-barang tersebut mempunyai peran yang cukup besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di daerah Bali dan sekitarnya pada tahun 1946 – 1949.

Untuk merealisasikan niatnya yang ingin menjajah kembali Indonesia, tentara Belanda (NICA / Netherlands Indies Civil Administration) dalam bentuk kesatuan Gajah Merah berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu yang melaksanakan melucuti senjata Jepang. Di Bali kesatuan NICA di Pantai Sanur Pantai Selatan Bali pada tanggal 2 Maret 1946. Oleh karena itu atas dasar semangat juang menghadapi penjajah, maka kesatuan ataupun organisasi mengadakan perfusian dalam bentuk ksatuan yang besar yang meliputi wilayah Sundakecil dengan nama Dewan Perjuangan Raikyat Indonesia (DPRI) dibawah pimpinan Letkan Kolonel Rai (I Gusti Ngurah Rai) dari TRI, untuk menghadapi kesatuan Gajah Merah Belanda.

Pertempuran pertama terjadi antara pihak DPRI dan Gadjah Merah di kota Denpasar pada tanggal 10 April 1946, yang kemudian segera disusul dengan pertempuran-pertempuran lain di berbagai pelosok di wilayah Sunda Kecil. Puncak pertempuran terjadi ketka diadakan Long march ke Gunung Agung pada bulan Juni-Juli 1946, dimana rakyat Bali dengan pemuda-pemuda gerilyanya mendukung perjuanga PDRI, meski dengan nyawa taruhannya. Setelah peristiwa tersebut menyusul pertempuran hebat yang mengakibatkan gugurnya pimpinan DPRI Letkol I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 20 November 1949 di dekat Desa Marga. Peristiwa tersebut dikenal dengan Puputan Margaragana, karena seluruh pasukan dibawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur.

Setelah peristiwa Puputan Margarana 20 November 1946, yang mengakibatkan gugur sebagian pucuk pimpin TRI di Bali termasuk di antaranya Letkol I. Gusti Ngurah RI, maka pimpinan DPRI dipegang oleh empat orang tokoh pemuda pejuang antara lain : Made Widjakusuma (Pucuk pimpinan), K. Widjana, W. Noor Rai, dan Nyoman Mantik.

Perundingan Renville yang berhasil ditandatangani oleh RI dan Belanda pada bulan Januari 1948 memberikan pengaruh besar terhadap perjuangan rakyat Bali. Pada tanggal 14 Mei 1948 dengan segala keterpaksaan anggota DPRI mengadakan penyerahan umum demi mentaati hasil perundingan Renville. Meski demikian bukan berarti perjuangan para pemuda pupus begitu saja. Para pemuda pejuang tetap melanjutkan perjuangannya hingga tercapai pengakuan kedaulatan RIS tanggal 27 Desember 1949. Dibawah pimpinan Tjilik, Poeng Tanaya dan Sentosa mereka berjuang dengan panji LANJUTAN PERJUANGAN yang kemudian dinamakan Pemerintah Daurat Republik Indonesia (PDRI). Mereka yang tergabung di dalam PDRI antara lain : Ida Bagus Tantera (pucuk pimpinan), Tjilik, Tjokorda Anom Sandat, Ida Bagus Tamu. Kesatuan-kesatuan pemuda yang bersimpati terhadap PDRI selalu bergerak mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Dengan menggunakan pakaian serba hitam para pemuda mengadakan operasi di daerah Buleleng. Mereka melaksanakan tugas dibawah pimpinan Tjilik. Mereka membentuk Markas Besar di Daerah Buleleng, yang kemudian dikenal dengan Markas Besar Buleleng. PDRI ini baru dibubarkan pada tanggal 15 Januari 1950.

Setelah keadaan terkendali dan suasana perang sudah tidak muncul di Bali, maka para pemuda pejuang yang kembali ke masyarakat dan menjadi masyarakat sipil ditampung dan dikumpulkan. Mereka kemudian membentuk sebuah yayasan yang dikenal dengan Yayasan Kebaktian Pejuang (YKP) dibawah pimpinan Tjilik.

Untuk meyakinkan suatu keamanan yang terjamin atas rakyat Bali, maka Presiden Soekarno telah memanggil ketigabelas pemuda pejuang yang memegang pimpinan dalam Perjuangan Rakyat di sundakecil selama revolusi antara lain : Made Widjakusuma, Ketut Widjanan, Njoman Mantik, Wajan Noor Rai, Ida Bagus Mahadewa, Ida bagus Tantera, Gde Puger, Sutedja, Tjilik, Bondjoran, Made Sugita, Ida Bagus Tamu dan I. Gusti Gde Subana pada tanggal 31 Desember 1951 dengan menghadap ke Jakarta guna membicarakan masalah-masalah keamanan dan pembangunan di Pulau Bali khususnya dan Sunda Kecil umumnya, dimana antara lain sdr Tjilik mengusulkan agar para pejuang yang kini ditahan oleh pamerintah karena exces revolusi dapat ditinjau kembali.

18. Bambu Runcing

Bambu runcing ini menjadi senjata andalan Hardjowiyono seorang pelaku gerilyawan, Dusun gondang Donokerto Turi Sleman Yogyakarta

Pada masa awal perjuangan, semangat rakyat dalam membela kemerdekaan begitu berapi-api. Meski dengan senjata seadanya mereka dengan gagah berani dan sikap optimis tampil ke depan sebagai laskar pejuang pembela kemerdekaan.

Pada masa perjuangan revolusi fisik (1945-1949) senjata populer rakyat dan gerilyawan adalah bambu runcing. Waktu itu bambu runcing yang terkenal adalah bambu runcing yang telah diberi mantra oleh Kyai Subchi dari Parakan Temanggung Jawa Tengah. Bambu runcing itu termasuk yang telah diberi mantra oleh Kyi Haji Subchi.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 8 Maret 1994 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 253/BVY/III/U.1994, bambu runcing tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

19. Sepeda Kurir BKR

Sepeda ini merupakan alat transportasi yang mempunyai andil besar dalam sejarah perjuangan. Sepeda ini digunakan sebagai sarana pengantaran surat/informasi antar pucuk pimpinan perjuangan dan sarana transportasi para kurir Badan Keamanan Rakyat pada tahun 1948 – 1949.

20. Perlengkapan Soekimin Anggota TP

Peralatan Soekimin seorang anggota TP (Tentara Pelajar) terdiri dari buku Buku arsip surat-surat penting Brigade XVIII TP, Buku catatan harian, Topi pakaian TP, dan Bendera Merah Putih.

Soekimin mulai aktif dan terlibat dalam kegiatan TRIP Jatim sejak tahun 1946. Pada tahun 1947 masuk TP YK dan menjadi komandan Kompi PHB dengan pangkat letnan II. Buku arsip memuat arsip surat-penting dari TP untuk koordinasi pasukan dalam pertempuran. Buku harian (besar) ditulis sejak masuk TRIP Jatim, (kecil) sejak masuk TP Yogyakarta. Topi pakaian sejak masuk TRIP Jatim dan dipakai hingga bertugas di Yogyakarta sampai 1950. Bendera semula dipasang di senjata laras panjang jika PHB terpaksa harus turut bertempur. Peristiwa-peristiwa penting ditulis dalam lembaran merah.

Alamat terakhir Soekimin adalah di Jl. Brigjen Katamso No. 9 Yogyakarta. Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Juli 199 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 174/F4.113/J3/1999, Buku arsip surat-surat penting Brigade XVIII TP, Buku catatan harian, Topi pakaian TP, dan Bendera Merah Putih tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

21. Mesin Ketik Condro Sudarmo

Condro Sudarmo adalah seorang tokoh masyarakat dari daerah Randusongo, Donokerto, Turi, Sleman yang berperan penting saat masa perjuangan fisik tahun 1948-1949. Rumah beliau pernah dijadikan markas Tentara Pelajar pimpinan Kapten Martono saat melakukan perlawanan secara bergerilya.

Mesin ketik ini pernah digunakan oleh pasukan Tentara Pelajar tersebut untuk mendukung perjuangan. Terbatasnya perlengkapan pasukan Tentara Pelajar dapat terbantu karena peran-peran warga seperti Bapak Condro Sudarmo ini.

22. Pedang dan Knop

Pada masa agresi milliter Belanda I, rumah Soemo Amidjojo (wakil manteri polisi pamong praja) di Desa Gerbosari menjadi sasaran penyerangan Belanda. Suto Darmo, anggota polisi Pamong Praja yang pada saat itu berada di rumah tersebut selamat dari penyerangan tersebut, meskipun harus kehilangan satu kaki. Pedang dan Knop ini merupakan sejata Suto Darmo sewaktu menjabat sebagai anggota Polisi Pamong Praja.

23. Perlengkapan SPN (sekolah polisi negara) di Nanggulan

Perlengkapan yang terdiri dari meja kursi, kenthongan, dan lampu senthir (cublik), merupakan benda-benda bersejarah saksi keberadaan SPN (Sekolah Polisi Negara) pada masa revolusi fisik di Nanggulan, Sendangagung, Minggir, Sleman.

Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengumumkan bahwa polisi termasuk di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Tanggal 30 Agustus 1945 orang-orang Indonesia yang berkerja sebagai pegawai Pemerintah Jepang secara bulan menyatakan diri sebagai pegawai Pemerintah RI, termasuk polisi di dalmnya. Selanjutnya tanggal 2 September 1945, pemerintah melalui maklumat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam negeri, Menteri Kehakiman, dan jaksa Agung mengangkat kepala kepolisian negara yang pertama yaitu : R. Soekanto Tjokroatmojo. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD tertanggal 25 Juni 1946 dikeluarkan dari Departemen Dalam negeri dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri sebagai jawatan tersendiri. Penetapan ersebut berlaku mulai tanggal 1 Juli 1946. Kemudian tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai hari Bhayangkara.

Pada saat terjadi agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, seluruh lapisan masyarakat terpanggil untuk bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan. Mereka bersatu padu mendukung perjuangan dengan cara-cara yang bisa mereka kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Selain mengakibatkan jatuhnya ibukota RI dan di tawannya para pemimpin RI oleh Belanda, juga mengakibatkan adanya gerak arus pengungsian kearah barat kota Yogyakarta. Sejak agresi militer Belanda II (Clash II), daerah Sendangagung, Minggir, Sleman menjadi markas berbagai pasukan, antara lain:

a. Pasukan KRIS/Brigade XVI yang dipimpin oleh Maulana Lapar, Sumilat Pelupesi, dan seorang yang bernama Kendangan sebagai wakil gubernur Sulawesi dengan stafnya yang berjumlah kurang lebih satu kompi.
b. Pasukan Barisan Sakit Hati yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dan isterinya yang bernama Corie yang berjumlah kurang lebih satu batalyon.
c. Pasukan dari Kepolisian dengan stafnya yang dipimpin oleh Jenderal Moh. Suryopranoto, Sosrodanukusmo, Subarkah, Sutarto, Sunaryo, Subagyo, Wiyono, Subekti, Sukirman, Herusumardi, Amirin, Pagyo, Susardi, Sumarnyo dan Hasan.

Tugas dari pasukan tersebut ialah bergerilya dan menjaga batas kota, khususnya Yogyakarta bagian barat, serta membuat kekacauan terhadap berbagai pos tentara Belanda yang ada di wilayah itu dan memata-matai jalan masuk kota, baik siang maupun malam hari.

Bagi Moh. Suryopranoto di samping bergerilya juga membuka pendidikan siswa calon polisi di Desa Nanggulan, Kelurahan Sendangagung, Minggir, Sleman. Lembaga pendidikan itu berlangsung cukup lama yaitu hingga 27 Desember 1949.

Tahap pertama di SPN ini diterima siswa berjunlah 120 orang dan tahap kedua menerima 350 orang. Mengenai sumber dana untuk penyelenggaraan SPN ini diambilkan dari sumbagan 7 (tujuh) kecamatan di Sleman Barat. Selama dalam pendidikan siswa memperoleh makanan berupa syur dan sayur besengek. Penduduk yang rumahnya ditempati untuk pendidikan itu tidak pernah dibayar dengan uang, tetapi mendapat pembayaran berupa beras dari Kepala Polisi Negara yang bersangkutan. Rumah-rumah penduduk yang ditempati untuk kegiatan pendidikan Kepolisian Negara itu adalah milik Brojoseco, Harjosumarto, Surokaryo, kartorejo, Wongsodimejo, Tomoijohyo, Wongsoikromo, kariyodinomo, pawirodikromo, harjodinomo, Kasanraji, dan Martodinomo. Selama pendidikan itu berlangsung rumah Brojoseco (jagabaya) dipergunakan sebagai "Sekolahan", sedangkan yang lainnya dipergunakan sebagai asrama siswa. Dapur umum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para siswa dipusatkan di rumah Harjosumarto. Tenaga untuk kebutuhan dapur umum itu diambil dari para istri pemilik rumah yang ditempati oleh para siswa Sekolah Polisi Negara.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 23 Desember 1998 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 485/F4.113/J3/98, meja dan kursi, kenthongan dan lampu senthir (cublik) tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

24. Kentongan markas kesekretariatan MBKD

Kenthongan ini merupakan benda bersejarah yang dipakai sebagai kode (tanda) yang baik bahaya, aman, waspada, dll pada masa revolusi. Kenthongan ini dipasang di Markas PTTD (MBKD) bagian kesekretarian di daerah Kulon Progo.

Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda tahun 1948, Markas PTTD dipindahkan ke luar kota yaitu ke Desa Kepurun, Manisrenggo, Klaten, Jateng dan dikenal dengan MBKD (Markas Besar Komando Djawa) Pos X-1. Namun karena gerakan Belanda yang membahayakan markas maka bulan Pebruari 1949 MBKD dipindahkan ke Dusun Boro, Banjarharja, Kalibawang, Kulon Progo di rumah Bp. Nitirejo. Sedangkan untuk kesekretariatan menempati rumah Bp. Suparjan di Dusun Padaan, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo. Untuk kesekretariatan dibawah pimpinan Kapten Sukendro, dan wakilnya Letnan Karto Suwarno.

Disamping rumah Bapak Suparjan, sebagai tempat kegiatan sekretariat markas PTTD (MBKD) juga menempati rumah Pawiro Sardiyo pada dusun yang sama yangberdekatan dengan rumah Bapak Suparjan. Di rumah Bapak Pawiro Sardiyo inilah kenthongan itu dipasang dan menjadi sarana yang efektif dan efisien sebagai tanda atau kode tentang situasi pada waktu itu.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 23 Desember 1998 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 485/F4.113/J3/98, kenthongan tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

25. Perlengkapan Kepolisian

Pelengkapan Kepolisian ini adalah milik Kepolisian Gunung Kidul yang dipakai sebelum tahun 1958.

Peralatan yang terdiri dari tanda kepangkatan, senjata lantakan, dan cetakan pangkat ini merupakan perlengkapan kepolisian di Gunung Kidul pada masar revolusi fisik.

Tanda simbol korps kepolisian : Tiang, melambangkan polisi sebagai salah satu tiang negara yang kokoh senosa. Suluh (obor) : melambangkan polisi sebagai penyuluh dan peneragan yang hendaknya menerangi segala lapisan masyarakat. Padi : melambanghkan polisi sebagai alat negara yang pempertahankan keamanan, iketertiban dan kesejahteraan rakyat. Perisai : melambangkan polisi sebagai penangkis, penghalau bahaya terhadap keamanan dalam negeri. Bintang berjau lima : melambangkan pokok dasar falsafdah negara Indonesia, Pancasila.

Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengumumkan bahwa polisi termasuk di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Tanggal 30 Agustus 1945 orang-orang Indonesia yang berkerja sebagai pegawai Pemerintah Jepang secara bulan menyatakan diri sebagai pegawai Pemerintah RI, termasuk polisi di dalmnya. Selanjutnya tanggal 2 September 1945, pemerintah melalui maklumat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam negeri, Menteri Kehakiman, dan jaksa Agung mengangkat kepala kepolisian negara yang pertama yaitu : R. Soekanto Tjokroatmojo. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD tertanggal 25 Juni 1946 dikeluarkan dari Departemen Dalam negeri dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri sebagai jawatan tersendiri. Penetapan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Juli 1946. Kemudian tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai hari Bhayangkara. Setelah peristiwa agresi militer Belanda I 21 Juli 1947, membawa dampak pada perkembangan kepolisian. Mulai tanggal 1 Desember 1947, Jawatan Kepolisian Negara ditetapkan berkedudukan di Yogyakarta.

Karena penyerbuan tentara Belanda ke Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, terpaksa Polisi bersama alat perlengkapan negara bersama TNIi meninggalkan kota. Diluar kota, berpusat Pemerintahan Militer di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang dibantu oleh Staf Keamanan, terdiri dari Jaksa Agung Tentara sebagai Kepala Staf, P.d. Kepala Jawatan Kepolisian Negara dan Komandan Corps Polisi Militer Jawa, masing-masing sebagai Wakil Kepala I dan II. Pada Markas Besar Tentara

Komando Jawa, Staf keamanan dan terdiri dari wakil Jawatan Kepolisian negara dan komando C.P.M. Tiap-tiap Gubernur Militer mempunyai staf keamanan.

Perlengkapan polisi ini dipakai sebelum tahun 1958 untuk penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian di Gunung Kidul.

26. Meja kursi tamu Kapten Widodo

Meja dan kursi ini menjadi saksi sejarah perjuangan Kapten Widodo sebagai komandan kompi dalam jajaran TNI SWK (Sub Wehrkreise) 102 pimpinan Mayor Sarjono di daerah Bantul.

Hasil konsulidasi pasukan TNI yang tercerai berai setelah agresi militer Belanda II, pasukan dibagi dalam beberapa SWK. Untuk daerah Bantul menjadi SWK 102 dibawah pimpinan Mayor Sardjono. Kompi Widodo berada di dalamnya. Sebagai salah satu penerapan siasat gerilya adalah dengan melakukan perjuangan dengan markas yang selalu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Salah satu markas perjuangan yang dipakai oleh Kapten Widodo waktu itu (tahun 1948-1949) adalah rumah Broto Sudarmo di dusun Jetis Bajang, Gilangharjo, Pandak, Bantul. Untuk menghindari identitasnya diketahui oleh musuh, maka Kapten Widodo selalu berusaha membaur dengan penduduk. Kadang-kadang beliau berdada di rumah Martowiyarjo (petani), dan kadang-kadang pula berada di rumah Mulyodidono (petani). Bahkan tak jarang juga berada di rumah Darmorejo (pamong desa).

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 12 September 1992 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 156.a/BVY/IX/U.92, Meja dan kursi tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta bersama dengan benda lain yang berperan sama yaitu cangkir, teko, tempat sayur, dan nampan.

27. Radio Perjuangan

Radio ini mempunyai peran yang cukup penting dalam penyebaran berita perjuangan ke dunia internasional. Sejak adanya kekuatan asing (NICA) yang ingin menjajah lagi Indonesi sebagai negara yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, usaha-usaha menegakkan kemerdekaan selalu digerakkan. Selain dengan mengandalkan kekuatan fisik bersenjata, juga ditempuh dengan cara diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin negara di meja perundingan.

Perjuangan dengan sistem diplomasi mempunyai kelebihan dibanding dengan perjuangan yang mengandalkan kekuatan fisik, yaitu adanya pengakuan dunia internasional tentang keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dengan adanya kemauan dunia internasional (PBB) untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda. Dengan demikian keberadaan Indonesia secara defacto dan deyure dunia telah mengakuinya.

Untuk menghadapi hal ini, maka Belanda sering menggunakan taktik "provokasi" yaitu dengan menyebar kabar bohong tentang hancurnya RI dan TNI nya seperti halnya yang dilakukan oleh Belanda setelah jatuhnya kota Yogyakarta ke tangan Belanda akibat agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Propaganda yang bersifat provokatif tersebut dilakukan dengan menggunakan siaran radio. Hal ini memberikan ispirasi bagi bangsa Indonesia untuk melakukan hal yang sama, dengan maksud menangkis pernyataan apa yang disampaikan oleh Belanda tersebut. Sehingga radio-radio pada masa perjuagnan waktu itu merupakan senjata yang ampuh bagi bangsa Indonesia untuk mendukung perjuangan para diplomat RI dan mempertahankan kemerdekaan di meja perundingan. Peristiwa-peristiwa yang "disembunyikan" oleh Belanda dari "mata dan telinga" dunia internasional, mampu dibeberkan dengan gamblang oleh radio-radio perjuangan waktu itu kepada dunia. Hal ini membuat Belanda menjadi terpojok dalam percaturan politik internasional. Salah satu dari radio-radio itu adalah seperangkat radio penyiaran berita-berita perjuangan milik PTT Bandung ini. Perangkat ini memiliki peran besar dalam penyiaran berita-berita perjuangan pada masa revolusi fisik.

28. Perlengkapan Rumah Sakit Santo Yusup Boro

Rumah Sakit ini didirikan pada tahun 1930 di Kalibbawang oleh para Suter Katolik sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi warga miskin di daerah Boro, Kulonprogo. Pada masa revolusi fisik tahun 1948-1949 rumah sakit ini berperan dalam upaya menolong korban perang dari berbagai daerah. Peralatan seperti stetoskop dan pispot diserahkan ke Museum Benteng Vredeburg untuk dijadikan koleksi museum.

29. Lumpang Batu

Lumpang batu ini merupakan saksi sejarah perjuangan Tentara Genie Pelajar (TGP) di daerah Seyegan Sleman yang waktu bermarkas di rumah Bapak Mulyo Sewoyo di Klangkapan, Margoluwih, Seyegan, Sleman.

Pada masa agresi militer Belanda II, TGP turut berjuang di wilayah Yogya barat. Salah satu markas TGP adalah rumah Bp. Mulyo Sewoyo di Klangkapan, Margoluwih, Seyegan, Sleman, Yogyakarta. TGP waktu itu dipimpin oleh Bambang Triantoro. Peralatan tersebut berperan dalam melayani kebutuhan logistik para pejuangan TGP di daerah Yogyakarta Barat khususnya yang bermarkas di rumah Bp. Mulyo Sewoyo (lurah waktu itu)

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 15 Oktober 1996 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 133/BPP.MBY/X/U.96, lumpang batu tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta bersama dengan benda lainnya yaitu dandang, kenceng, nampan, lepek, cangkir, bokor, dan peralatan makan lainnya.

30. Tas kulit Drs. Mohamad Hattta

Tas kulit ini adalah tas kuli milik Bung Hatta yang dulu pernah dipergunakan sebagai tas kerja tempat menyimpan dokumen-dokumen penting dalam rangka perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan RI di dalam Perundingan KMB yang berlangsung 23 Agustus – 2 November 1949 di Den Haag Belanda.

Tanggal 23 Agustus 1949 bertempat di Riderzaal, Den haag dibuka sidang KMB. Dalam sidang tersebut delegasi RI diketuai oleh Drs. M. Hatta, delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen sedangkan UNCI (United Nations Commision for Indonesia) diketuai oleh Chritchley.

Setelah sidang berjalan dengan alot selama kurang lebih 3 bulan, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan Piagam Persetujuan tentang konstitusi RI di kota Scheveningen, Nederland. Pada tanggal 2 Nopember 1949 dilangsungkan upacara penutupan KMB di Riderzaal, Den Haag dengan hasil ketentuan bahwa Kedaulatan Belanda di Indonesia akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

31. Peralatan minum Pangsar Jenderal Soedirman

Peralatan minum ini merupakan saksi sejarah perjuangan Pangsar Jenderal Soedirman. Peralatan minum dipergunakan oleh Pangsar Jenderal Soedirman ketika beristirahat di Rumah Bapak Bajuri, dusun Kreja, Genjahan, Ponjong, Gunung Kidul tanggal 8 Juli 1949.

Meski dalam keadaan sakit, Jenderal Soedirman memilih meninggalkan kota Yogyakarta untuk melanjutkan perlawanan secara bergerilya, ketika Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta dan menawan para pemimpin RI pada tanggal 19 Desember 1948. Setelah membakar semua dokumen yang ada di kediamannya Jl. Bintaran Wetan 3 Yogyakarta, kurang lebih pukul 11.30 Pangsar Soedirman segera meninggalkan Bintaran dan menuju Kadipaten melalui Mergangsan, Gading, Alun-alun Kidul. Atas laporan kolonel Abdul Latif maka diputuskan Pangsar Soedirman segera meninggalkan kota Yogyakarta. Saat itulah perjalanan gerilya Pangsar Jenderal Soedirman yang dikenal dengan "Wiralelana" dimulai. Dari hari ke hari perjalanan pasukan Pangsar Jenderal Soedirman semakin jauh meninggalkan kota Yogyakarta dan diikuti oleh para pengikut dan anak buahnya yang setia dalam suka dan dukanya perjuangan. Perjalanan rombongan Pangsar Jenderal Soedirman berkahir di suatu desa yang aman yaitu dukuh Sobo, desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Disinilah tempat yang paling lama didiami oleh Pangsar Jenderal Soedirman sampai menjelang beliau beserta pasukannya pulang ke Yogyakarta. Baru setelah Tentara Belanda berhasil ditarik mundur dari Kota Yogyakarta yang dikenal dengan "Peristiwa Yogya Kembali" tanggal 29 Juni 1949, Jenderal Soedirman mulai kembali masuk Kota Yogyakarta pada bulan Juli 1949.

Setelah Yogya kembali tanggal 29 Juni 1949, TNI sudah kembali ke Yogyakarta. Keamanan sudah pulih dan terjamin. Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Drs. M. Hatta dan para pemimpin yang lain tiba di Maguwo (Adisucipto sekarang) dari pengasingannya. Waktu itu hanya tinggal Pangsar Soedirman yang belum tiba. Oleh karena itu Letkol Soeharto diperitahkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk kembali ke hutan, ke markas gerilya Pangsar Jenderal Soedirman dan meyakinkan beliau agar mau masuk Kota Yogyakarta.

Dengan membawa surat yang dikirim oleh Sri Sultan HB IX dan Kolonel Gatot Subroto, Letkol Soeharto berangkat menuju markas gerilya Pangsar Soedirman. Setelah berdiskusi selama berjam-jam maka Pangsar Soedirman salah seorang yang kontra terhadap Perundingan Roem Royen akhirnya menerima permintaan untuk kembali ke Yogyakarta.

Akhirnya pada tanggal 7 Juli 1949 dengan dilepas oleh rakyat di Sobo, berangkatlah Pangsar Jenderal Soedirman menuju Yogyakarta. Tanggal 8 Juli 1949 Pangsar Jenderal Jenderal Sudirman singgah di Rumah Ibu Bajuri di dusun Kreja, Genjahan, Ponjong, Gunung Kidul. Untuk menjamu Pangsar Jenderal Soedirman dipinjamkan perlengkapan meja kursi dan perlengkapan mimun milik Ibu Harjo Suwito yaitu orang tua bapak Imam Supardi yang rumahnya dekat Ibu Bajuri.

Pada tanggal 9 Juli 1949 Pangsar Jendera Soedirman dengan para pengawal beserta dengan Letkol Soeharto yang disertai Mayor Dr. Irsan, wartawan Rosihan Anwar dan wartawan foto F.S. Mendur selaku missi pertama penjemputan melakukan perjalanan menuju Yogyakarta.

Perjalanan Pangsar Soedirman di Piyungan dan para pengawalnya beristirahat selama 1 malam. Pagi harinya tanggal 10 Juli 1949 datang misi penjemputan kedua dipimpin Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo dan Kolonel T.B. Simatupang. Selanjutnya Pangsar Soedirman naik kendaraan Jeep yang telah disiapkan menuju Yogyakarta, diikuti oleh Letkol Soeharto dan para pengawal lainnya.

Pangsar Jenderal Soedirman langsung menuju Gedung Agung dan bertemu dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Kolonel TB. Simatupang. Setelah selesai menghadap Presiden dan memberikan laporan, kemudian Pangsar Jenderal Soedirman menuju ke Alun-alun Utara untuk menerima devile penyambutan. Pada waktu itu berlangsung parade kebesaran dari pasukan TNI dan barisan pejuang lainnya.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 19 Januari 1998 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 433/F4.113/J3/1998, peralatan minum tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta bersama dengan benda lainnya yaitu meja dan kursi.

32. Perlengkapan Kolonel Zulkifli Lubis

Peralatan ini merupakan saksi sejarah perjuangan Zulkifli Lubis di daerah Srunggo Selopamioro Imogiri Bantul pada masa revolusi fisik. Gogok ini merupakan tempat candu yang merupakan aset perjuangan. Hasil penjualan candu ini dapat dipakai sebagai modal berjuang. Sedangkan poci ini merupakan peralatan minum yang dipakai oleh Kolonel Zulkifli Lubis yang waktu itu bermarkas di dusun Srunggo, Selopamioro, Imogiri, Bantul.

Akibat serangan Belanda di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948, pasukan TNI tercerai berai dan segera mengadakan gerakan mundur ke luar kota. Salah satu daerah yang dijadikan tempat bertahan adalah desa Srunggo, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Pasukan TNI diterima dengan baik oleh warga masyarakat dibawah pimpinan Lurah Sastrowiharjo. Waktu itu pimpinan militer yang mundur ke wilayah Srunggo dibawah pimpinan Kolonel Zulkifli Lubis yang dibantu oleh para pembesar militer yang lain yaitu Kapten Sutrisno (bagian perlengkapan), Yadi dan Karli (tata usaha), Ilham (dokumentasi), Himawan Sukoco dan Santoso (sekretaris). Waktu itu kurang lebih 20 rumah yang dipergunakan sebagai tempat menginap pasukan Zulkifli Lubis, disamping juga para pembesar sipil. Kolonel Zulkifli Lubis bersama beberapa pembantunya menginap di rumah Kertosari. Sedangkan rumah Joikromo digunakan sebagai tempat penyimpan candu oleh MBKD (Markas Besar Komando Djawa). Rumah Darjono digunakan untuk menyimpan amunisi, sedangkan rumah-rumah yang lain dipakai sebagai tempat penyimpan candu. Rumah-rumah tersebut antara lain rumah Projokromo, Poncosetiko, Resosentono, Patemorejo, Saigeno, Mertoijoyo, Partorejo dan Irosanimo. Mengenai darimana asal candu tersebut tidak diketahui, karena cara mengangkutnya dengan sembunyi-sembunyi dan dikawal oleh dua atu tiga tentara. Pengelolaan candu di Srunggo ini dipegang oleh Karli yang juga mengurusi tata usaha.

Pada mulanya candu ditempatkan dalam kaleng-kaleng, tetapi setelah sampai di desa Srunggo, lalu dimasak atau dicairkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Pemasakan candu dilaksanakan di rumah Soigeno. Dipasarkan kemana candu-candu tersebut juga warga tidak tahu, yang pasti pemasaran candu itu mendatangkan dana yang besar untuk biaya perjuangan TNI. Para pengungsi di Srunggo meninggalkan Srunggo setelah keadaan aman bulan Juni 1949.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 7 Oktober 1996 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 139/PP.MBY/X/U.96, peralatan minum tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta bersama dengan benda lainnya yaitu meja dan kursi.

33. Perlengkapan Letkol Soeharto di Markas Perjuangan Kulon Progo.

Peralatan ini merupakan saksi sejarah perjuangan Letkol Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan. Perlengkapan dipergunakan oleh Letkol Soeharto ketika bermarkas di di rumah Bapak Padmodiharjo di Palihan, Palihan Temon Kulon Progo pada akhir tahun 1948.

Adanya agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, selain berhasil menduduki kota Yogyakarta dan menawan para pemimpin RI, juga menyebabkan pasukan TNI tercerai berai dan melakukan gerakan mundur ke luar kota Yogyakarta. Oleh karena itulah maka guna mengadakan koordinasi antar pucuk pimpinan TNI memerlukan waktu yang cukup lama, karena antara pucuk pimpinnan yang satu dengan yang lain tidak saling mengetahui dimana keberadaannya. Untuk mencari informasi tentang kekuatan TNI di Yogyakarta selatan, Letkol Soeharto selaku komandan WK III memerintahkan Mayor Sardjono.

Satu hari setelah jatuhnya kota Yogyakarta ketangan Belanda, Letkol Soeharto segera mengadakan konsulidasi untuk menghimpun kekuatan TNI di daerah WK III. Dari hasil konsulidasi dapat dirinci kekuatan pasukan bersenjata di Yogyakarta. Dengan melihat cukup besarnya kekuatan pasukan bersenjata yang ada serta simpati rakyat yang begitu besar terhadap perjuangan maka direncanakan serangan balasan terahadap Belanda di kota maupun pos-posnya yang berada di luar kota. Serangan balasan pertama kali yang dilakukan oleh gerilyawan TNI setelah agresi Belanda II yang telah direncanakan sejak tanggal 26 Desember 1948, dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1948. Serangan tersebut dipimpin oleh Letkol Soeharto.

Serangan tersebut dilaksanakan setelah dari hasil konsulidasi pasukan TNI WK III dibagi menjadi Sub WK – Sub WK. Setelah diadakan perubahan susunan anggota berdasarkan perimbangan kekuatan, maka barulah serangan dilaksanakan. Pembagian WK III dalam beberapa SWK (Sub Wehrkreise) inilah yang nantinya akan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Dalam mengadakan konsulidasi inilah, Letkol Soeharto pernah bermalam di rumah Bapak Padmodiharjo di Palihan, Palihan Temon Kulon Progo pada akhir tahun 1948. Sedangkan perlengkapan kapstok dan nampan itu pernah dipergunakannya.

Mengingat benda tersebut bernilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 16 Oktober 1996 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 135/BPP.MBY/X/U.96, kaca hias, nampan dan longsong mortir tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta bersama dengan benda lainnya yaitu meja dan kursi.

BAB IV

PENUTUP

Tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan momen historis yang harus dimunculkan dan dikomunikasikan kepada generasi muda sebagai cermin kebesaran bangsa di masa silam. Dari sanalah akhirnya proyeksi masa depan akan dapat dilihat sehingga sebuah generasi akan dapat melangkah secara bijak dalam menyongsong masa depan.

Dengan demikian adanya Museum Perjuangan Yogyakarta kita semua berharap bahwa:

1. Masyarakat khususnya generasi muda dan pelajar mengenal Museum Perjuangan Yogyakarta sebagai museum yang menyajikan benda-benda bersejarah dimana nilai-nilai luhur banyak terkandung didalamnya.
2. Kelampauan yang berkaitan dengan proses jalannya sejarah bangsa Indonesia dalam rangka merintis, mencapai, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan merupakan bagian dari pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang.
3. Museum Perjuangan Yogyakarta sebagai salah satu sumber informasi, dapat melayani masyarakat untuk melakukan "perlawatan ke masa silam" melalui koleksi-koleksinya.
4. Keberadaan Museum Perjuangan Yogyakarta dapat menjadi media apresiasi bagi masyarakat. Dengan berkunjung ke museum masyarakat dapat mengetahui, mencermati, serta memahami makna yang terkandung dalam sajian materi koleksi sehingga dapat menumbuhkan aspirasi guna mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang positif.
5. Kepada pengunjung museum diharapkan peran sertanya dalam ikut membantu memelihara dan mempublikasikan keberadaan Museum Perjuangan Yogyakarta kepada masyarakat luas sehingga fungsi edukatif, rekreatif dan inspiratifnya dapat terlaksana dengan baik.
6. Masyarakat dapat berperan aktif membantu tugas museum untuk menyelamatkan benda-benda bukti material peristiwa sejarah yang masih banyak berada di masyarakat.

Dengan demikian keberadaan Museum Perjuangan Yogyakarta bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk satu dua orang saja, bukan untuk sekelompok orang saja. Akan tetapi, Museum Perjuangan Yogyakarta dibuka untuk kita semua tak terkecuali. Oleh karena itu, manfaatkanlah museum secara proporsional menurut fungsinya sebagai media studi, penelitian, dan rekreasi.

Pengakuan keberadaan sebuah generasi, bukan ditentuk oleh sejarah. Tetapi, pengakuan keberadaan sebuah generasi ditentukan oleh bagaimana generasi tersebut membuat sejarah. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan ketika Bung Karno dalam sebuah pidatonya menyampaikan bahwa: "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" (Jali merah) serta "Belajarlah dari sejarah untuk membuat sejarah". Semoga museum menjadi satu media alternatif yang representatif untuk mewujudkan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dandun Widoyoko. 1993. Selayang Pandang Museum Perjuangan Yogyakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Daud Sinjal. 1996. Laporan Kepada Bangsa: Militer Akademi Yogyakarta. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Depdikbud. 1977. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Djamal Marsudi, dkk. 1985. Yogyakarta Benteng Proklamasi. Jakarta: Penerbit Barahmus DIY Perwakilan Jakarta.

Hadisutjipto, S.Z, Drs. 1966. Gedung STOVIA Sebagai Cagar Sejarah. (Cetakan ke IV). Jakarta: Depdikbud.

Nagazumi Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908 – 1918. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Nani Mulyani, dkk. 1995. 50 Tahun Indonesia Merdeka 1965 – 1995. Jakarta: PT. Citra Media Persada.

Panitia Setengah Abad Kebangkitan Nasional Jogjakarta. 1961. Sedjarah Musium Perdjuangan Jogjakarta.

Pringgodigdo, A.K, SH. 1986. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. (Cetakan 11). Jakarta: PT. Dian Rakyat.

Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Yogyakarta. 1984. Buku Informasi Koleksi I Museum Perjuangan Yogyakarta. Jakarta: Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Saleh, RHA. 1994. Akademi Militer Tangerang dan Peristiwa Lengkong. Yayasan Pustaka bekerjasama dengan Sebelas Maret University Press, Yogyakarta.

Simbolon, Parakirti, T. 1995. Menjadi Indonesia Buku I: Akar-akar Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Kompas-Grasindo.

Soebagijo, I.N. 1987. Perjuangan Pelajar IPI – IPPI. Cetakan I. Balai Pustaka, Jakarta.

Soedarsono, R.G. 1985. Peranan Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan. (Cetakan I). Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.

Sudirjo, Radik Utoyo. 1983. Album Perang Kemerdekaan, 1945 – 1950. (Cetakan VI). Jakarta: Penerbit Almanak RI/BP ALDA.

Suhartono, Dr. 1984. Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampi Proklamasi 1908 – 1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Suhatno. 2001. Kepanduan Bangsa Indonesia, Suatu Kajian Sejarah Tahun 1930 – 1961. Yogyakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Yogyakarta.

Suryo Haryono, P, Drs, Dkk. 1987. Monumen Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta: Depdikbud.

Tashadi, dkk. 1995. Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta, Sebuah Lintasan Sejara. Panitia Gabungan Peringatan HUT Ke 50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi Propinsi DIY,.

Yayasan 19 Desember 1948. 1994. Perang Rakyat Semesta 1948 – 1949. (Cetakan I). Jakarta: Balai Pustaka.

Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Perum Peruri. 1991. Banknotes and Coins From Indonesia 1945 – 1990. Jakarta: PT. Mahendra Sampana.

LAMPIRAN

Candrasengkala penanda tahun dibangunnya Museum Perjuangan Yogyakarta tahun 1959.

Pemasangan batu terakhir oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Relief Perjuangan

Relief terbentuknya Republik Indonesia Serikat.

Relief Berdirinya organisasi Muhammadiyah.

Koleksi Relief Patung Kepala Pahlawan Nasional

Relief Kepala Pahlawan Sultan Hasanudin.

Relief Kepala Pahlawan Pangeran Diponegoro.

Koleksi-koleksi tata pameran *indoor*

Koleksi tempat tidur Ir. Soekarno saat diamankan di Rengasdengklok.

Tas kulit Drs. Mohamad Hatta yang digunakan saat perundingan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda.

Koleksi Meriam yang ditemukan di kompleks Benteng Vredeburg.

Tugu Kepanduan Bangsa Indonesia sebagai simbol menyatunya berbagai macam organisasi kepanduan.

Miniatur Seragam Kepanduan.

Koleksi Patung Dada Pahlawan KH. Ahmad Dahlan.

Patung Dada Pahlawan Dewi Sartika.

Koleksi Lukisan Amanat 5 September 1945.

Pengeboman Balai Mataram oleh tentara sekutu pada 27 November 1945.

JAM BUKA DAN TIKET MASUK MUSEUM

Jam Buka Museum

• Senin – Kamis	:	08.00 – 16.00 WIB
• Jumat	:	08.00 – 16.30 WIB
• Senin, Minggu dan Libur Nasional	:	Tutup

Tiket Masuk Museum

• Dewasa (perorangan)	:	Rp	3.000
• Dewasan (rombongan)	:	Rp	2.000
• Anak-anak (perorangan)	:	Rp	2.000
• Anak-anak (rombongan)	:	Rp	1.000
• Wisatawan Mancanegara	:	Rp	10.000

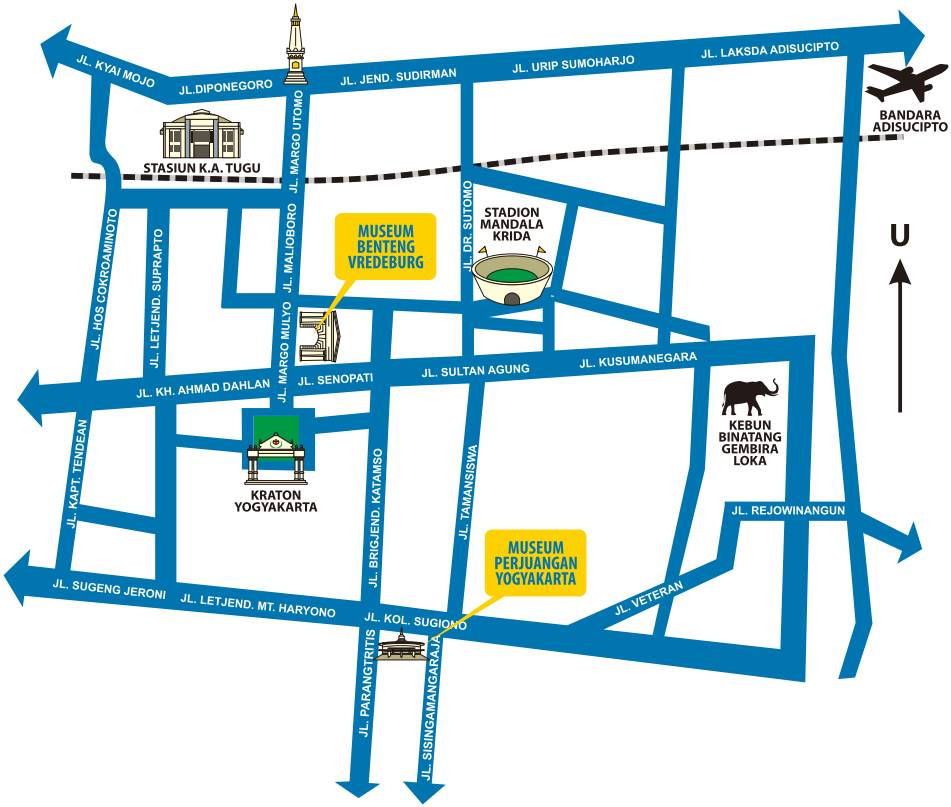

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM PERJUANGAN YOGYAKARTA
(MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA UNIT II)

Jl. Kolonel Sugiyono No. 24 Yogyakarta
Telp./Fax. 0274-387576
vredeburg@kemdikbud.go.id
www.vredeburg.id
museum benteng vredeburg yogyakarta
museum.benteng.vredeburg
@b_vredeburg